



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

LKJIP

DISKOMINFO KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

2024

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika disusun pada akhir periode anggaran pelaksanaan program/kegiatan memiliki dua fungsi yaitu merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja utama organisasi yang telah ditetapkan, serta sebagai sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 – 2026 dijadikan landasan dalam penyusunan dokumen LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 untuk mengukur pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Akhir kata, kami berharap dengan adanya laporan ini dapat memperoleh umpan balik yang bermanfaat guna mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika kepada pemberi mandat dan sarana perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Kutai Kartanegara, Februari 2025
Pit. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

SOLIHIN, S.Sos., MT
NIP. 19721029 199102 1 001



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Dasar Hukum.....	5
1.3 Tupoksi	5
1.4 Permasalahan dan Isu Strategis	6
1.5 Uraian Singkat Organisasi	8
1.6 Keadaan Pegawai.....	9
1.7 Keuangan.....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	12
2.1 Perencanaan Strategis.....	12
2.2 Perjanjian Kinerja.....	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1 Capaian Kinerja	24
3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2024	42
BAB IV PENUTUP	46
4.1 Kesimpulan	46
4.2 Perbaikan Kedepan	47
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP PMR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalisme, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan kewenangan

pengelolaan sumber daya dengan didasarkan sesuatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Komunikasi dan Informatika, mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan

Tugas Pembantuan di Bidang Komunikasi dan Informatika.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- b. Pelaksanakan kebijakan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati

Diskominfo Kab.Kukar senantiasa berusaha menjalankan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika dengan baik, namun ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Faktor yang paling berpengaruh terletak pada para pihak yang terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan itu berjalan juga dapat mempengaruhi keberhasilan yang dimaksud.

Memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi Diskominfo Kab. Kukar dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Diskominfo selalu berusaha meningkatkan kapasitas perencanaan melalui koordinasi-koordinasi dengan stakeholder yang terkait dan selalu berusaha meningkatkan kapasitas sumber daya yang dimiliki.

1.4 Permasalahan dan Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan Telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut :

1. SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan Pemerintahan yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

Hal ini seperti yang tertuang pada peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE di tujukan untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

2. Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, layanan masyarakat yang termasuk urusan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara akan dilayani berbasis TIK. Layanan masyarakat yang semula secara manual, (misalnya : Perizinan, pendapatan daerah, pengadaan barang / jasa dll) secara bertahap akan dilayani berbasis TIK.
3. Tuntutan Publik akan terbukaan Informasi Publik dan Transparansi, pola pikir masyarakat yang semakin maju dan berkembang akan semakin menuntut berbagai informasi yang dibutuhkan. Masyarakat semakin kritis dan berani untuk menyampaikan pendapat, akan terus berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan situasi kondisi yang dihadapinya.
4. Sejak terbitnya peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (SDI), Pemerintah Indonesia semakin mengandalkan peran data sebagai dasar perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, hingga pengendalian pembangunan. SDI pun di bidik sebagai strategi perbaikan tata kelola data untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga mampu menjadi pondasi penentuan kebijakan yang efektif dan tepat.

5. Keamanan Siber telah menjadi isu prioritas seluruh Negara di dunia semenjak teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam aspek sosial, ekonomi, hukum, organisasi, kesehatan, pendidikan, budaya, pemerintahan, keamanan, pertahanan, dan lain sebagainya. Berbanding lurus dengan tingginya tingkat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tersebut, tingkat resiko dan ancaman penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi juga semakin tinggi dan semakin kompleks.

1.5 Uraian Singkat Organisasi

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari sekretariat 1 (Satu) Subbag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian, 4 (Empat) Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana, UPTD Yaitu :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika



KEPALA DINAS

1. Sekretaris
 - Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan
2. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP)
3. Bidang Aplikasi Informatika (APTIKA)
4. Bidang Statistik
5. Bidang Persandian
- ❖ Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
- ❖ UPTD

1.6 Keadaan Pegawai

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi tersebut, jumlah pegawai lingkungan Diskominfo Kab. Kukar sampai dengan bulan Januari 2024 sebanyak 73 Orang, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1 Daftar Pegawai Berdasarkan Golongan

Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
IV	7	1	8
III	19	13	32
II	16	9	25
I	1	-	1
Total	43	23	66

Sumber : Diskominfo Kab. Kukar

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pegawai Diskominfo Kab. Kukar Golongan IV 8 Orang, golongan III 32 orang dan golongan II 25 Orang sedangkan golongan I memiliki jumlah paling sedikit yaitu 1 Orang.

Tabel 1.2 Daftar Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
S2	8	1	9
S1	13	13	26
D3	4	1	5
D1	-	-	-
SLTA	17	8	25
SLTP	1		1
SD	-	-	-
Total	43	23	66

Sumber : Diskominfo Kab. Kukar

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pegawai diskominfo Kab.Kukar lebih banyak lulusan SLTA yaitu sebanyak 17 orang laki-laki dan 8 orang perempuan. Sedangkan lulusan SLTP paling sedikit yaitu dengan jumlah 1 orang laki-laki .

1. DAFTAR PEGAWAI BERDASARKAN ESSELONERING

Eselon	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
II	1	-	1
III	5	0	5
IV	6	4	10
STAF	30	20	50

Total	42	24	66
--------------	-----------	-----------	-----------

Sumber : Diskominfo Kab.Kukar

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pegawai Diskominfo Kab.Kukar yang menjabat sebagai eselon terbanyak adalah pejabat Esselon IV dengan jumlah 6 orang laki-laki dan 3 orang perempuan.

1.7 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Diskominfo Kab.Kukar pada tahun 2024 berasal dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 168.255.543.353 (*Seratus Enam Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*) yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung. Belanja langsung yang berasal dari APBD tersebut didukung oleh 5 Program 14 Kegiatan dan 48 Sub kegiatan .

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

2.1.1 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Visi Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 yaitu “Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul Dan Berbudaya;
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif;
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Antar Wilayah;
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berwawasan Lingkungan

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah, maka misi yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Misi ke-1 (Satu) yaitu. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani.

Kemudian merujuk kepada misi tersebut, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 - 2026 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Matrik Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi :				
“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”				
Misi yang Relevan	Tujuan		Sasaran	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
Memantapkan Birokrasi yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani	Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks SPBE	Meningkatnya Kualitas Domain Tata Kelola SPBE	Indeks Domain Tata Kelola SPBE
			Meningkatnya Kualitas Domain Layanan SPBE	Indeks Domain Layanan SPBE
			Meningkatnya Kualitas Domain Managemen SPBE	Indeks Domain Managemen SPBE
			Meningkatnya Kualitas Domain Kebijakan SPBE	Indeks Domain Kebijakan SPBE

2.1.3 Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk periode 2021- 2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pengelolaan Aplikasi Informatika
2. Meningkatkan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
3. Meningkatkan Penyelenggaraan Statistik Sektor
4. Meningkatkan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

2.1.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk kongkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada organisasi agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 - 2026 yang dikorelasikan dengan strategi pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel
Strategi dan Arah Kebijakan

No.	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan Pengelolaan Aplikasi Informatika	Menyiapkan Data Kondisi Jaringan Internet sampai di level desa dan kelurahan
		Mengidentifikasi dan menyusun alternatif penyediaan jaringan internet disetiap desa yang belum memiliki akses internet
		Melakukan rewiuw dokumen perencanaan SPBE dan Smart City
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM di bidang IT

		Mempersiapkan rancangan masterplant pelaksanaan pelayanan pemerintahan berbasis digital untuk mendukung pelaksanaan RPJMD 2021 - 2026
		Melakukan penyesuaian regulasi tata kelola SPBE di Pemda
		Melakukan Koordinasi perangkat daerah dalam pengembangan aplikasi
		Inventarisasi dan evaluasi pelaksanaan aplikasi pelayanan public berbasis teknologi informasi di setiap perangkat daerah
2	Meningkatkan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatkan sumber daya pengelola informasi dan komunikasi publik
		Meningkatkan koordinasi terkait pelaksanaan pengelolaan publikasi dan kerjasama media
		Meningkatkan pemahaman tentang produk hukum berkaitan dengan informasi, komunikasi dan pelayanan publik
		Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam rangka penyebaran (Diseminasi) informasi program dan kebijakan pemerintah

3	Meningkatkan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Meningkatkan Kapasitas aparatur data statistic sektoral melalui pendidikan dan pelatihan
		Merekrut aparatur dengan kompetensi bidang data / statistik
		Melaksanakan sosialisasi / Desiminasi Metadata terhadap penyelenggara data statistik data sektoral
		Meningkatkan Pembinaan terhadap Produsen Data terkait Metadata
		Membangun Infrastruktur Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
		Membangun Sistem informasi Data Statistik Sektoral yang terintegrasi dari Produsen Data hingga Walidata
		Meningkatkan Produsen Data yang menerapkan Prinsip Satu Data dalam pelaksanaan Pendataan melalui Pembinaan dan pengawasan
		Membangun Sistem Informasi Data Statistik Sektoral yang bisa di akses Internet dan Publik
		Melaksanakan Sosialisasi / diseminasi Interoperabilitas Data Statistik Sektoral terhadap penyelenggara Data Statistik Sektoral

4	Meningkatkan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Membuat Perkada yang mengatur tentang keamanan informasi dan Persandian
		Melakukan rekrutmen dan / atau meningkatkan kapasitas SDM di bidang keamanan informasi dan persandian
		Meningkatkan sarana dan prasarana di bidang informasi dan persandian

2.1.5 Program

Program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran strategis pada tahun 2024, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel

Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)		Indeks SPBE	
	Meningkatnya Kualitas Domain Tata Kelola SPBE	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

	Meningkatnya Kualitas Domain Layanan SPBE	Indeks Domain Layanan SPBE	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
	Meningkatnya Kualitas Domain Managemen SPBE	Indeks Domain Managemen SPBE	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
	Meningkatnya Kualitas Domain Kebijakan Internal SPBE	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.2.1

Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keterangan / Rumus Penghitungan
Meningkatnya Kualitas Domain Tata Kelola SPBE	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Nilai	3,06	Nilai Indeks Domain Tata Kelola SPBE
Meningkatnya Kualitas Domain Layanan SPBE	Indeks Domain Layanan SPBE	Nilai	3,35	Nilai Indeks Domain Layanan SPBE
Meningkatnya Kualitas Domain Manajemen SPBE	Indeks Domain Manajemen SPBE	Nilai	3,15	Nilai Indeks Domain Manajemen SPBE
Meningkatnya Kualitas Domain Kebijakan Internal SPBE	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	Nilai	3,03	Nilai Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE

Selain perjanjian kinerja yang berdasarkan dari dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan informatika, terdapat perjanjian kinerja tambahan yang merupakan amanat dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada seluruh Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai berikut :

Tabel 2.2.2 Perjanjian Kinerja Tambahan Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat kepatuhan serta kelengkapan LHKPN pertanggal 31 maret setiap tahun	Persen	100
	Tingkat kepatuhan LHKASN pertanggal 31 maret setiap tahun	Persen	100

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100
Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP	Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan aplikasi SIRUP per Akhir Februari setiap tahun	Persen	100
Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% pertanggal 10 setiap bulan	Persen	100
Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan RKBMD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) 100% sesuai dengan Barang Milik Daerah (BMD) yang akan diadakan	Persen	100
Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan SHS (Standar Harga Satuan)	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Standar Harga Satuan (SHS) perangkat Daerah Paling lambat bulan April untuk tahun anggaran berikutnya	Persen	100
Terlaksananya ketepatan Waktu Penyampaian LKJIP	Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Perangkat Daerah paling lambat akhir	Persen	100
Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian IKK LPPD	Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Januari setiap tahun	Persen	100
Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (LK) SKPD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan SKPD per tanggal 24 Januari setiap tahun	Persen	100
Terlaksananya	Tingkat Ketepatan	Persen	100

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Perangkat Daerah	waktu Penyampaian Laporan Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Pelaporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Semester I paling lambat akhir bulan Juni dan Semester II akhir bulan Oktober setiap tahun		
Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Menilai Pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
Menyelesaikan Tindakan Laporan Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK atas audit LKPD 5 tahun	Persen	100
Terlaksanannya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SPIP	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Penilaian Mandiri Penyelenggraan SPIP Perangkat Daerah per 30 Juni Tahun berjalan	Persen	100
Penerapan Core Values ASN BerAKHLAK	Internalisasi Core Values ASN BerAKHLAK	Persen	100
Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana	Ketepatan Waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja PD (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan)	Persen	100
Terlaksanannya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan	Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit	Persen	70
Ketersediaan Dokumentasi Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	Persen	100

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Nilai Tata Kelola ARSIP Perangkat Daerah	Persen	100
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persen	100
Peningkatan Prestasi Inovasi	Prestasi Inovasi Perangkat Daerah	Persen	100
Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan Spa4n Lapor	Persen	100
Meningkatnya Pengamanan Aset	Pengamanan Aset Tanah	Persen	75
Meningkatnya Tata Kelola Aset	Pakta Integritas Pemakaian Aset BMD Tersedia sesuai dengan jumlah pejabatstruktural, fungsional dan pelaksana pada perangkat daerah	Persen	100
Terlaksananya Program pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah	Jumlah program pengentasan kemiskinan	Jumlah	1
Menurunnya Prevalensi Stanting	Prevalensi Stanting sesuai dengan target Nasional	Persen	14
Pengarustamaan Gender	Ketersediaan penggangguan pengarustamaan gender	Persen	100
Peningkatan Investasi	Capaian Investasi Kabupaten Kutai Kartanegara	Persen	7,3 T
Pengendalian Inflasi	Angka inflasi maksimal 1,5% - 3,5%	Persen	100
Kepatuhan Pelaporan P3DN	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN per tanggal 25 setiap bulan	Persen	40
Meningkanya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,6
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	73
Meningkatnya	Indeks Reformasi	Nilai	64

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovasi, akuntabel, bersih dan melayani	Birokrasi Pemerintah Daerah		
Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	49,57
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Nilai	8,95
Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Pemerintah Daerah	Predikat	Zona Hijau
Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok/Vape	Kawasan Tanpa Rokok / Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau	Persen	100
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM perangkat daerah (Aplikasi Survey Kukar)	Persen	100
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	100
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Indikator Perangkat Daerah	Persen	100
Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA) di Perangkat Daerah	Laporan Pemetaan Kemampuan Mengaji ASN Perangkat Daerah	Laporan	1
Terlaksana dan Terbentuknya Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Perangkat Daerah	Terbentuknya SK Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Perangkat Daerah	Surat Keputusan (SK)	1

Tabel 2.2.3

Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Data Awal Tahun 2022 dan target Tahun 2024

No	Tujuan	Indikator Sasaran	Satuan	Data Awal (2022)	Target (2024)	Target akhir Renstra 2026
1	Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		Nilai	3,1	3,2	3,29
2		Meningkatnya Kualitas Domain Tata Kelola SPBE	Nilai	2,96	3,06	3,16
3		Meningkatnya Kualitas Domain Layanan SPBE	Nilai	3,25	3,35	3,45
4		Meningkatnya Kualitas Domain Manajemen SPBE	Nilai	3,05	3,15	3,25
5		Meningkatnya Kualitas Domain Kebijakan Internal SPBE	Nilai	2,81	3,03	3,25

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

3.1 Capaian Kinerja

Kerangka pengukuran capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut:

a. Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai	Kriteria Penilaian
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

3.2 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Rata-rata realisasi Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2024 sebesar 99,58 %. Merujuk pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 termasuk dalam kategori peringkat kinerja sangat tinggi. Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.2

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteri Penilaian
Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks SPBE	Nilai	3,2	3,09	96,56%,	Sangat Tinggi
Meningkatnya Kualitas Domain Tata Kelola SPBE	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Nilai	3,06	2,20	71,89%	Sedang
Meningkatnya Kualitas Domain Layanan SPBE	Indeks Domain Layanan SPBE	Nilai	3,35	3,88	115,82%	Sangat Tinggi

Meningkatnya Kualitas Domain Manajemen SPBE	Indeks Domain Manajemen SPBE	Nilai	3,15	1,82	57,77%	Rendah
Meningkatnya Kualitas Domain Kebijakan Internal SPBE	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	Nilai	3,03	3,60	118,8%	Sangat Tinggi
Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatus Sipil Negara (LKASN)	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN pertanggal 31 Maret 2024	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi
	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2024	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi
Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi
Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP	Tingkat Kepatuhan Input serta pengumuman paket pengadaan aplikasi SIRUP per Akhir Februari setiap tahun	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi
Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% pertanggal 10 setiap bulan	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi
Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan RKBMD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) 100% sesuai dengan Barang Milik Daerah (BMD) yang akan diadakan	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi
Terlaksananya Kapatuhan Penyampaian Usulan SHS (Standar Harga Satuan)	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Standar Harga Satuan (SHS) perangkat Daerah Paling lambat bulan April untuk tahun anggaran berikutnya	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi
Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi
Terlaksananya ketepatan Waktu Penyampaian LKJIP	Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Perangkat Daerah paling lambat akhir	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi
Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian IKK LPPD	Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Januari setiap tahun	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi
Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (LK) SKPD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan SKPD per tanggal 24 Januari setiap tahun	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi
Terlaksananya Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Pelaporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Semester I paling lambat akhir bulan Juni dan Semester II akhir bulan Oktober setiap tahun	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi
Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Menilai Pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi
Menyelesaikan Tindakan Laporan Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK atas audit LKPD 5 tahun	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi
Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SPIP	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Perangkat Daerah per 30 Juni Tahun berjalan	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi
Penerapan Core Values ASN BerAKHLAK	Internalisasi Core Values ASN	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi

	BerAKHLAK					
Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana	Ketepatan Waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja PD (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan)	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi
Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan	Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit	Persen	70	95,51	136,44%	Sangat Tinggi
Ketersediaan Dokumentasi Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi
Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi
Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Nilai Tata Kelola ARSIP Perangkat Daerah	Predikat	Memuaskan (A) 80-90	83,39	104,23 %	Sangat Tinggi
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persen	100	68,17	68,17%	Sedang
Peningkatan Prestasi Inovasi	Prestasi Inovasi Perangkat Daerah	Persen	100	58,59	58,59%	Rendah
Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan sp4n Lapor	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi
Meningkatnya Pengamanan Aset	Pengamanan Aset Tanah	Persen	75	75	100%	Sangat Tinggi
Meningkatnya Tata Kelola Aset	Pakta Integritas Pemakaian Aset BMD Tersedia Sesuai Dengan Jumlah Pejabatstruktural, Fungsional Dan Pelaksana Pada Perangkat Daerah	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi
Terlaksananya Program Pengetasan Kemiskinan Pada Perangkat Daerah	Jumlah Program Pengetasan Kemiskinan	Jumlah	1	1	100%	Sangat Tinggi
Menurunnya Prevelensi Stunting	Pravelensi Stunting Sesuai Dengan Target Nasional	Persen	14	17,6	125%	Sangat Tinggi
Pengarusutamaan Gender	Ketersediaan pengangguran pengarusutamaan gender	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi
Peningkatan Investasi	Capaian Investasi Kabupaten Kutai Kartenegara	Persen	7,3 T	7,82	107,12%	Sangat Tinggi
Pengendalian Inflansi	Angka Inflansi maksimal 1,5% - 3,5%	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi
Kepatuhan Pelaporan P3DN	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN per tanggal 25 setiap bulan	Persen	40	97.78	244,45%	Sangat Tinggi
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,6	3,113	86,47%	Tinggi
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	73	65,92	90,30%	Tinggi
Meningkatnya manajemen birokrasi yan efektif, efesien, inovasi, akuntabel,bersih dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Nilai	64	60,12	93,93%	Sangat Tinggi
Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	49,57	58,59	118,19%	Sangat Tinggi
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Nilai	8,95	4,09	45,69%	Rendah
Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Pemerintah Daerah	Predikat	Zona Hijau	Zona Hijau	A (Kualitas Tertinggi)	Sangat Tinggi
Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah	Kawasan Tanpa Rokok / Vape adalah area atau rung yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM perangkat daerah (Aplikasi Survey Kukar)	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Indikator Perangkat Daerah	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi
Terlaksananya "Gerakan	Laporan Pemetaan	Laporan	1	1	100%	Sangat

Etam Mengaji (GEMA) di Perangkat Daerah	Kemampuan Mengaji ASN Perangkat Daerah					Tinggi
Terlaksana dan Terbentuknya Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Perangkat Daerah	Terbentuknya SK Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Perangkat Daerah	Surat Keputusan (SK)	1	1	100%	Sangat Tinggi

Indikator Tujuan Perangkat Daerah

Indikator Tujuan Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) target 3,2 (nilai) dan realisasinya atau capaian kinerja sebesar 3,09 (Laporan Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2024). Target kinerja tidak tercapai. Tim Koordinasi SPBE belum berfungsi optimal dimana seharusnya Tim Koordinasi SPBE berfungsi sebagai Tim Pengarah TIK yang bertugas untuk mengendalikan, mengarahkan, mengevaluasi dan melaksanakan perumusan kebijakan dan penerapan SPBE. Solusinya, harus didorong peningkatan peran dan fungsi Tim Koordinasi SPBE sehingga Program/Kegiatan yang dilaksanakan dapat sepenuhnya mengintervensi terhadap peningkatan indikator kinerja.

Adapun penjelasan capaian dari setiap indikator adalah sebagai berikut :

1) Indikator Kinerja ke-1

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-1” tahun 2024 adalah Meningkatnya Kualitas Domain Tata Kelola SPBE target 3,06 (nilai) dan realisasinya atau capaian kinerja sebesar 2,20 (*Laporan Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2024*). Target kinerja tidak tercapai. Penerapan dokumen perencanaan strategis serta teknologi informasi dan komunikasi belum dilakukan pada seluruh aspek. Layanan-layanan TIK seperti pembangunan aplikasi SPBE, layanan pusat data, layanan jaringan intra, serta layanan sistem penghubung layanan belum dimanfaatkan oleh seluruh unit kerja. Solusi/rekomendasinya adalah segera melengkapi dokumentasi arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE sesuai dengan cakupan dan muatan yang diatur dalam referensi penyelenggaraan SPBE serta melakukan pengaturan agar penyusunan DPA/RKA perangkat daerah dikonsultasikan dengan unit pengelola TIK.

2) Indikator Kinerja ke-2

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-2” tahun 2024 adalah Meningkatnya Kualitas Domain Layanan SPBE target 3,35 dan realisasinya atau capaian kinerja 3,88 (*Laporan Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2024*). Target Kinerja tercapai.

3) Indikator Kinerja Ke-3

Target kinerja “Indikator Kinerja Ke 3” tahun 2024 adalah Meningkatnya Kualitas Domain Manajemen SPBE target 3,15 dan realisasinya atau capaian kinerja 1,82 (*Laporan Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2024*). Target Kinerja Tidak tercapai, belum adanya pedoman pelaksanaan manajemen SPBE secara lengkap dan terarah sehingga belum memenuhi cakupan sesuai acuan penyelenggaraan SPBE. Solusi/rekomendasinya adalah menyelaraskan penganggaran pada aspek Manajemen SPBE dan Audit TIK dengan penerapan dokumen Peta Rencana SPBE. Selain itu perlu segera disusun secara formal pedoman pelaksanaan manajemen dan audit SPBE.

4) Indikator Kinerja Ke-4

Target kinerja “Indikator Kinerja Ke- 4” tahun 2024 adalah Meningkatnya Kualitas Domain Kebijakan Internal SPBE target 3,03 dan realisasinya atau capaian kinerja 3,60 (*Laporan Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2024*). Target Kinerja tercapai.

5) Indikator Kinerja Ke – 5

Target Kinerja “Indikator Kinerja Ke -5, Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LJKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)

- Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN pertanggal 31 Maret 2024 Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN dan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2024 Dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara menerapkan pedoman kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dalam rangka pengendalian terjadinya kecurangan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Persentase capaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penginputan LHKPN berjalan sudah mengisi LHKPN di website <https://elhkpn.kpk.go.id> sebelum tanggal 31 maret 2024 sebanyak 1 (satu) Pejabat Tinggi Pratama, 4 (empat) Pejabat Administrator, 15 (Lima

Belas) Pejabat Fungsional Penyetaraan dan 1 pejabat struktural (Kasubbag Umum Ketata Laksana dan Kepegawaian) sehingga jumlahnya sebanyak 21 (dua puluh satu) Orang Pejabat dilingkungan sudah melaksanakan kewajiban sehingga diperoleh realisasi capaian target sebesar 100% dengan kriteria penilaian sangat tinggi.

- Tingkat Kepatuhan Kelengkapan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2024, Target 100 % realisasi inputan berjalan sebesar 100 % Berdasarkan Laporan Pemantauan Wajib LHKASN Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara (Data wajib lapor yang masuk sistem siharka per April 2024) sebanyak 66 orang ASN Wajib Lapor dan 66 Orang ASN sudah lapor sehingga diperoleh realisasi capaian target sebesar 100 % dengan kriteria penilaian sangat tinggi.

6) Indikator Kinerja Ke-6

Target Kinerja “Indikator Kinerja Ke 6” Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

- Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun, Berdasarkan Laporan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahun 2024 menggunakan Aplikasi E-Kinerja dan Internalisasi Penyelesaian SKP Tahun 2024 sampai dengan Staf Pelaksana sehingga capaian target kinerja 100 % Predikat Sangat Tinggi.

7) Indikator Kinerja Ke -7

Target Kinerja “Indikator Kinerja Ke 7” tahun 2024 Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak diskriminatif dan. Presentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Daerah terealisasi sebesar 100%, Dinas Komunikasi dan Informatika telah melaksanakan proses seluruh rencana umum pengadaan pada aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) pada tahun 2024 dalam komitmen atas kebijakan pengadaan barang/jasa (PBJ). Persentase capaian melalui sistem informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) sudah dilakukan sebesar 100%.

8) Indikator Kinerja Ke -8

Target kinerja “indikator Kinerja Ke-8”, Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau,

- Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% pertanggal 10 setiap bulan, Berdasarkan Pelaporan Capaian Keluaran yang sudah diverifikasi oleh pejabat Eselon 3 pada Aplikasi E- Pantau Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2024 sehingga capaian target kinerja sebesar 100 % Predikat Sangat Tinggi.

9)Indikator Kinerja Ke- 9

Target Kinerja “Indikator Kinerja Ke- 9” Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan RKBMD, Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) 100% sesuai dengan Barang Milik Daerah (BMD) yang akan diadakan sehingga target kinerja tercapai dengan kriteria penilaian sangat tinggi.

10)Indikator Kinerja Ke-10

Target Kinerja “Indikator Kinerja Ke- 10” Terlaksananya Kapatuhan Penyampaian Usulan SHS (Standar Harga Satuan), Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Standar Harga Satuan (SHS) perangkat Daerah Paling lambat bulan April untuk tahun anggaran berikutnya dengan target 100% dari hasil tersebut target indikator terealisasi sesuai target Usulan SHS telah disampaikan pada *Aplikasi Simaston* sesuai dengan batas waktu sehingga target kinerja tercapai dengan kriteria penilaian sangat tinggi.

11) Indikator Kinerja Ke-11

Target Kinerja “Indikator Kinerja Ke-11” Persentase Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah, persentase keterisian data di aplikasi satu data Kukar dan Aplikasi e-Pantau dengan target sebesar 100%. Dari hasil tersebut target indikator terealisasi sesuai target (*aplikasi Becik dan aplikasi e- Pantau 2024*) sehingga capaian kinerja diperoleh sebesar 100% dengan kriteria penilaian sangat tinggi.

12) Indikator Kinerja Ke-12

Target Kinerja “Indikator kinerja Ke-12 “Terlaksananya Ketepatan Waktu penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Perangkat Daerah dengan target sebesar 100%. Dari hasil tersebut target indikator terealisasi sesuai target *pada aplikasi Sakip* sehingga capaian kinerja diperoleh sebesar 100% dengan kriteria penilaian sangat tinggi.

13) Indikator kinerja Ke- 13

Target Kinerja “ Indikator Kinerja Ke -13” Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Januari setiap tahun dengan target sebesar 100%. Dari hasil tersebut target indikator terealisasi sesuai target *aplikasi Beppadah* sehingga capaian kinerja diperoleh sebesar 100% dengan kriteria penilaian sangat tinggi.

14) Indikator Kinerja Ke- 14

Target Kinerja “Indikator Kinerja Ke-14” Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (LK) SKPD dengan target sebesar 100%. Dari hasil tersebut target indikator terealisasi sesuai target sehingga capaian kinerja diperoleh sebesar 100% dengan kriteria penilaian sangat tinggi.

15) Indikator Kinerja Ke- 15

Target Kinerja “Indikator Kinerja Ke-16” Terlaksananya Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Perangkat Daerah dengan target sebesar 100% Dari hasil tersebut target indikator terealisasi sesuai target sehingga capaian kinerja diperoleh sebesar 100% dengan kriteria penilaian sangat tinggi.

16) Indikator Kinerja Ke -16

Target Kinerja “Indikator Kinerja Ke -16 “ Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik, Menilai Pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut Forum Konsultasi Publik (FKP). Dari hasil tersebut target indikator terealisasi sesuai target sehingga capaian kinerja diperoleh sebesar 100% dengan kriteria penilaian sangat tinggi.

17) Indikator Kinerja Ke -17

Target Kinerja “ Indikator Kinerja Ke 17 “menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) / Inpektorat Daerah, temuan administrasi BPK / Inspektorat yang ditindak lanjuti, terealisasi 100 % Tindak Lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh masing-masing perangkat Daerah. Total jumlah temuan yang ditindak lanjuti di tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu 4 temuan, berdasarkan Rekapitulasi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Temuan administrasi dan Keuangan Tahun Anggaran 2018 s.d 2024 sehingga target kinerja tercapai dengan kriteria penilaian sangat tinggi.

18) Indikator Kinerja Ke-18

Target Kinerja “Indikator Kinerja Ke- 18” Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Perangkat Daerah dengan target sebesar 100% Dari hasil tersebut target indikator terealisasi sesuai target sehingga capaian kinerja diperoleh sebesar 100% dengan kriteria penilaian sangat tinggi.

19) Indikator Kinerja Ke-19

Target Kinerja “Indikator Kinerja Ke- 19” Penerapan Internalisasi Core Values ASN BerAKHLAK dengan target sebesar 100% Dari hasil tersebut target indikator terealisasi sesuai target sehingga capaian kinerja diperoleh sebesar 100% dengan kriteria penilaian sangat tinggi.

20) Indikator Kinerja Ke-20

Target Kinerja “Indikator Kinerja Ke- 20” Pelaksanaan Ketepatan Waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja PD (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan) dengan target sebesar 100% Dari hasil tersebut target indikator terealisasi sesuai target sehingga capaian kinerja diperoleh sebesar 100% dengan kriteria penilaian sangat tinggi.

21) Indikator Kinerja Ke-21

Target Kinerja “Indikator Kinerja Ke- 21” Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit dengan target 70 % dapat tercapai, dari hasil tersebut target indikator terealisasi melebihi target dengan nilai 95,51% sehingga diperoleh realisasi capaian target sebesar 136,44 % dengan kriteria penilaian sangat tinggi.

22) Indikator Kinerja Ke-22

Target Kinerja “Indikator Kinerja Ke- 22” Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan dengan target sebesar 100% Dari hasil tersebut target indikator terealisasi sesuai target sehingga capaian kinerja diperoleh sebesar 100% dengan kriteria penilaian sangat tinggi.

23) Indikator Kinerja Ke-23

Target Kinerja “Indikator Kinerja Ke- 23” Maturnisasi Nilai SPIP pada Perangkat Daerah dengan target sebesar 100% Dari hasil tersebut target indikator terealisasi sesuai target sehingga capaian kinerja diperoleh sebesar 100% dengan kriteria penilaian sangat tinggi.

24) Indikator Kinerja Ke-24

Target Kinerja “Indikator Kinerja Ke- 24” Melaksanakan Nilai Tata Kelola ARSIP Perangkat Daerah. Target Dalam rangka penerapan Peraturan Menpan-RB Nomor 30 Tahun 2018 bahwa kualitas pengelolaan arsip menjadi indikator penilaian pelaksanaan Repormasi Birokrasi. Berdasarkan penilaian monitoring tindak lanjut hasil pengawasan internal kearsipan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 memperoleh nilai 80-90 atau kategori “A” (Memuaskan) dari hasil audit tersebut Komitmen Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten untuk berusaha terus melaksanakan perbaikan pengelolaan arsip agar indicator kinerja pengelolaan arsip dapat tercapai, sehingga diperoleh realisasi capaian target sebesar 104,23 % dengan kriteria penilaian sangat tinggi.

25) Indikator Kinerja Ke-25

Target Kinerja “Indikator Kinerja Ke- 25” Meningkatnya Akuntabilitas Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target sebesar 100%, Dari hasil tersebut target indikator terealisasi capaian kinerja sebesar 68,17% dengan kriteria penilaian sedang. Target kinerja tidak tercapai. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.

26) Indikator Kinerja Ke-26

Target Kinerja “Indikator Kinerja Ke- 26” Peningkatan Prestasi Inovasi Perangkat Daerah dengan target sebesar 100%, Dari hasil tersebut target indikator terealisasi capaian kinerja sebesar 58,59% dengan Predikat Inovatif.

27) Indikator Kinerja Ke-27

Target Kinerja “Indikator Kinerja Ke- 27” Tindak Lanjut Pengaduan sp4n Lapor dengan target sebesar 100%, Dari hasil tersebut target indikator terealisasi sesuai target sehingga capaian kinerja diperoleh sebesar 100% dengan kriteria penilaian sangat tinggi.

28) Indikator Kinerja Ke-28

Target Kinerja “Indikator Kinerja Ke- 28” Meningkatnya Pengamanan Aset Tanah dengan target sebesar 75%, Dari hasil tersebut target indikator terealisasi sesuai target sehingga capaian kinerja diperoleh sebesar 100% dimana Dinas Komunikasi dan Informatika telah melakukan proses penguatan legalitas secara hukum 1 bidang Tanah dalam bentuk sertifikat.

29) Indikator Kinerja Ke-29

Target Kinerja “Indikator Kinerja Ke- 29” Meningkatnya Pakta Integritas Pemakaian Aset BMD Tersedia Sesuai Dengan Jumlah Pejabatstruktural, Fungsional Dan Pelaksana Pada Perangkat Daerah dengan target sebesar 100% Dari hasil tersebut target indikator terealisasi sesuai target sehingga capaian kinerja diperoleh sebesar 100% dengan kriteria penilaian sangat tinggi.

30) Indikator Kinerja Ke-30

Target Kinerja “Indikator Kinerja Ke- 30” Terlaksananya Jumlah Program Pengetasan Kemiskinan dengan jumlah target sebesar 1, Dari hasil tersebut target indikator terealisasi sesuai target sehingga capaian kinerja diperoleh sebesar 100% dengan kriteria penilaian sangat tinggi.

31) Indikator Kinerja Ke-31

Target Kinerja “Indikator Kinerja Ke- 31” Menurunnya Pravelensi Stanting Sesuai Dengan Target Nasional dengan jumlah target sebesar 14, Dari hasil tersebut target indikator terealisasi sebesar 17,6% , sehingga capaian kinerja diperoleh sebesar 125% dengan kriteria penilaian sangat tinggi.

32) Indikator Kinerja Ke-32

Target Kinerja “Indikator Kinerja Ke- 32” Ketersediaan pengangguran pengarusamaan gender dengan target sebesar 100%, Dari hasil tersebut target indikator terealisasi sesuai target sehingga capaian kinerja diperoleh sebesar 100% dengan kriteria penilaian sangat tinggi.

33) Indikator Kinerja Ke-33

Target Kinerja “Indikator Kinerja Ke- 33” Peningkatan Capaian Investasi Kabupaten Kutai Kartanegara dengan target 7,3 T, Dari hasil tersebut target indikator terealisasi sebesar 7,82 sehingga diperoleh capaian target sebesar 107,12 % dengan kriteria penilaian sangat tinggi.

34) Indikator Kinerja Ke-34

Target Kinerja “Indikator Kinerja Ke- 34” Pengendalian Angka Inflansi maksimal 1,5% - 3,5% dengan target sebesar 100% Dari hasil tersebut target indikator terealisasi sesuai target sehingga capaian kinerja diperoleh sebesar 100% dengan kriteria penilaian sangat tinggi.

35) Indikator Kinerja Ke-35

Target Kinerja “Indikator Kinerja Ke- 35” Persentasi Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN dengan target sebesar 40, Dari hasil tersebut target indikator terealisasi sebesar 97.78% sehingga diperoleh capaian target sebesar 244,45% dengan kriteria penilaian sangat tinggi.

36) Indikator Kinerja Ke-36

Target Kinerja “Indikator Kinerja Ke- 36” Meningkatnya Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah dengan target Nilai LPPD sebesar 3,6, Dari hasil tersebut target indikator terealisasi sebesar 3,113%, sehingga diperoleh capaian target sebesar 86,47% dengan kriteria penilaian tinggi.

37) Indikator Kinerja Ke-37

Target Kinerja “Indikator Kinerja Ke- 37” Meningkatnya Nilai SAKIP Pemerintah Daerah dengan target 73, Dari hasil tersebut target indikator terealisasi sebesar 65,92%, sehingga diperoleh capaian target sebesar 90,30% dengan kriteria penilaian tinggi.

38) Indikator Kinerja Ke-38

Target Kinerja “Indikator Kinerja Ke- 38” Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasa Pemerintah Daerah dengan target nilai 64 dapat tercapai, sehingga diperoleh realisasi capaian target sebesar 93,93 % dengan kriteria penilaian sangat tinggi.

39) Indikator Kinerja Ke-39

Target Kinerja “Indikator Kinerja Ke- 39” Meningkatnya Indeks Inovasi Daerah dengan target 49,57 dapat tercapai, sehingga diperoleh realisasi capaian target sebesar 118,19 % dengan kriteria penilaian sangat tinggi.

40) Indikator Kinerja Ke-40

Target Kinerja “Indikator Kinerja Ke- 40” Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah dengan target 8,95 sehingga diperoleh realisasi capaian target sebesar 4,09% sehingga diperoleh realisasi capaian target sebesar 45,69% dengan kriteria penilaian rendah.

41) Indikator Kinerja Ke-41

Target Kinerja “Indikator Kinerja Ke- 41” Meningkatnya Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Pemerintah Daerah Bahwa indikator kinerja Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Pemerintah Daerah teralisasi dengan Predikat Zona Hijau Nilai 94,46 capaian kinerja dengan Kategori A (Kualitas Tinggi), capaian kinerja tersebut berdasarkan Keputusan Ketua OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : 252 Tahun 2024 Tentang : Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) yang dilakukan terhadap pejabat dan Unit Pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

42) Indikator Kinerja Ke-42

Target Kinerja “Indikator Kinerja Ke- 42” Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok / Vape adalah area atau ruang yang dinyatakan dilarang untuk aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau dengan target sebesar 100% Dari hasil tersebut target indikator terealisasi sesuai target sehingga capaian kinerja diperoleh sebesar 100% dengan kriteria penilaian sangat tinggi.

43) Indikator Kinerja Ke-43

Target Kinerja “Indikator Kinerja Ke- 43” Meningkatnya IKM perangkat daerah (Aplikasi Survey Kukar) dengan target sebesar 100% Dari hasil tersebut target indikator terealisasi sesuai target sehingga capaian kinerja diperoleh sebesar 100% dengan kriteria penilaian sangat tinggi.

44) Indikator Kinerja Ke-44

Target Kinerja “Indikator Kinerja Ke- 44” Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan target sebesar 100% Dari hasil tersebut target indikator terealisasi sesuai target sehingga capaian kinerja diperoleh sebesar 100% dengan kriteria penilaian sangat tinggi.

45) Indikator Kinerja Ke-45

Target Kinerja “Indikator Kinerja Ke- 45” Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah Capaian Indikator Perangkat Daerah dengan target sebesar 100% Dari hasil tersebut

target indikator terealisasi sesuai target sehingga capaian kinerja diperoleh sebesar 100% dengan kriteria penilaian sangat tinggi.

46) Indikator Kinerja Ke-46

Target Kinerja “Indikator Kinerja Ke- 46” Terlaksananya Laporan Pemetaan Kemampuan Mengaji ASN Perangkat Daerah dengan target 1 laporan Dari hasil tersebut target indikator terealisasi sesuai target sehingga capaian kinerja diperoleh sebesar 100% dengan kriteria penilaian sangat tinggi.

47) Indikator Kinerja Ke-47

Target Kinerja “Indikator Kinerja Ke- 47” Terlaksana dan Terbentuknya SK Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Perangkat Daerah dengan target 1 Surat Keputusan (SK) Dari hasil tersebut target indikator terealisasi sesuai target sehingga capaian kinerja diperoleh sebesar 100% dengan kriteria penilaian sangat tinggi.

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2024 Nilai Indeks SPBE 3,09 sedangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya tahun 2023 Nilai Indeks SPBE 2,54. Terjadi Peningkatan kinerja sebesar 0,55. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya secara rinci tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Ket.
				Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realsiasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	
Meningkatkannya Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		Indeks SPBE	Nilai	3,15	2,54	80,63	3,2	3,09	96,56	Meningkat
	Meningkatnya Kualitas Domain Tata Kelola SPBE	Indeks Domain Tata Kelola	Nilai	3,01	1,40	46,51	3,06	2,20	71,89	Meningkat

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Ket.
				Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realsiasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	
		SPBE								
	Meningkatnya Kualitas Domain Layanan SPBE	Indeks Domain Layanan SPBE	Nilai	3,30	3,51	106,36	3,35	3,88	115,82	Meningkat
	Meningkatnya Kualitas Domain Manajemen SPBE	Indeks Domain Manajemen SPBE	Nilai	3,10	1,00	32,79	3,15	1,82	57,77	Meningkat
	Meningkatnya Kualitas Domain Kebijakan Internal SPBE	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	Nilai	2,92	3,30	113,01	3,03	3,60	118,81	Meningkat

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir Renstra (Tahun 2024)	Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2024	Persentase Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2024
Indeks SPBE	3,2	3,09	96,56
Indeks Domain Tata Kelola SPBE	3,06	2,20	71,89
Indeks Domain Layanan SPBE	3,35	3,88	115,82
Indeks Domain Manajemen SPBE	3,15	1,82	57,77
Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	3,03	3,60	118,81

3.1.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target kinerja tercapai 100% atau lebih. Penghitungannya dengan cara mengurangkan persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran. Adapun rincian efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaran	Program	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi (%)	Keterangan
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3-5)	(7)
Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		Indeks SPBE	3,09				
	Meningkatnya Kualitas Domain Tata Kelola SPBE	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	79,27	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	88,06	-8,79	Kurang efisiensi
			100	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	96,12	3,88	Efisiensi
	Meningkatnya Kualitas Domain Layanan SPBE	Indeks Domain Layanan SPBE	100	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	97,43	2,57	Efisiensi
	Meningkatnya Kualitas Domain Manajemen SPBE	Indeks Domain Manajemen SPBE	100	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	84,66	15,34	Efisiensi
	Meningkatnya Kualitas Domain Kebijakan Internal	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	100	Program Penyelenggaraan Persandian untuk	96,15	3,85	Efisiensi

	SPBE			Pengaman an Informasi			
--	------	--	--	-----------------------------	--	--	--

Berdasarkan analisis tingkat capaian sasaran dibandingkan penyerapan anggaran capaian sasaran 1 Program kurang efisiensi karena capaian tidak sesuai target kinerja dan 4 program efisiensi karena target kinerja mencapai 100%.

3.1.5 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran kinerja strategis didukung oleh seluruh program dan kegiatan pendukungnya dalam memenuhi indikator kinerja program dan target kegiatan. Keberhasilan dapat tercapai karena adanya semangat kerja, komitmen, SDM yang berkompetain, anggaran yang memadai, perencanaan kerja yang efektif, prosedur kerja dan sarana prasarana yang cukup dan juga ditunjang Pencapaian realisasi target kinerja program dan kegiatan yang relevan. Adapun capaian kinerja program Dinas Komunikasi dan Informatika yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tahun 2024 adalah nilai Sakip Perangkat Daerah tahun 2024. Di Tahun 2024 target Nilai Sakip Diskominfo 86,00 berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sakip dari Inspektorat Daerah mendapatkan nilai 68,17 sehingga realisasi di tahun 2024 sebesar 79,27 %.

Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun Sebelumnya

Hasil evaluasi implementasi SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 memperoleh nilai 93,95 dengan kategori AA dan dapat diinterpretasikan Sangat Memuaskan, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Capaian nilai angka hasil evaluasi SAKIP Tahun 2023 tersebut mengalami penurunan sebesar 25,78 jika dibandingkan dengan perolehan nilai evaluasi SAKIP Tahun 2024 yang memperoleh nilai 68,17. Nilai angka hasil evaluasi

implementasi SAKIP Tahun 2023 dan Tahun 2024 per komponen secara ringkas, sebagai berikut (ii) sub-komponen;

Tabel 3.6 Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 dan 2024

No	Komponen Yang di Nilai	Bobot	Nilai 2023	Nilai 2024	Ket
1.	Perencanaan Kinerja	30%	26,10	21,34	(4,76)
2.	Pengukuran Kinerja	30%	30,00	20,20	(9,8)
3.	Pelaporan Kinerja	15%	14,10	8,30	(5,8)
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	23,75	18,33	(5.42)
	Nilai Hasil Evaluasi	100%	93,95	68,17	25,78
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		AA	B	
	Interprestasi		Sangat Memuaskan	Baik	

Berdasarkan hasil Laporan Hasil Evaluasi yang di keluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara, Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Kutai Kartanegara dari semua komponen penilaian mengalami penurunan di tahun 2024. Berdasarkan hasil tersebut inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan rekomendasi/ tindak lanjut atas laporan evaluasi implementasi Sistem AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut :

Tabel 3.7 Rekomendasi /Tindak Lanjut atas Laporan Evaluasi AKIP Tahun 2024

No	Permasalahan	Rekomendasi Perbaikan	Tindak Lanjut	Rencana Aksi
1	Melakukan reviu seluruh dokumen perencanaan PD	Hasil reviu agar digunakan untuk perbaikan kualitas perencanaan dengan memastikan dokumen perencanaan telah mengawal kinerja sesuai dengan tingkat jabatan yang seharusnya diampu	Telah dilakukan reviu oleh inspektorat sesuai Berita Acara Pembahasan Hasil Reviu Renja 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika	Pelaksanaan Reviu Pada Tanggal 27 Juli 2023

		dan telah berorientasi outcome.		
2	Menyusun pohon kinerja/logikal framework	Pohon kinerja diharapkan dapat menjabarkan kinerja yang memenuhi unsur logis (sebabakibat) serta menyajikan alternatif kinerja yang beragam dan efektif dalam mendorong tercapainya kinerja utama. Pohon kinerja yang disusun agar dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan cascading kinerja dan dokumen perencanaan.	Telah disusun Pohon Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Pohon Kinerja telah disusun serta dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan cascading kinerja dan dokumen perencanaan.
3	Menyusun standar Operasional Prosedur (SOP)	SOP tentang EValuasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilengkapi dengan mekanisme monitoring yang efektif dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi perbaikan atas hasil evaluasi SAKIP	Menyusun standar Operasional Prosedur (SOP) tentang EValuasi Akuntabilitas Kinerja Internal Dinas Komunikasi dan Informatika	Menyusun standar Operasional Prosedur (SOP)
4	Melakukan identifikasi crosscutting kinerja sebagai bentuk sharing outcome sebagai upaya untuk mencapai suatu kinerja	Melakukan reviu terhadap dokumen IKU dan memastikan bahwa dokumen IKU telah memuat definisi operasional dan rumus perhitungan yang sesuai dan relevan dengan substansi indikator kerjanya	Melakukan reviu terhadap dokumen IKU	Melakukan reviu terhadap dokumen IKU
5	Melakukan reviu terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP)	(SOP) terkait pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang ada dengan menyesuaikan kondisi 43 Indikator.	Menyusun standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang ada dengan menyesuaikan kondisi 43 Indikator.	Melakukan reviu penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
6	Melakukan sinkronisasi data terhadap capaian output	capaian 43 Indikator program/kegiatan dan capaian Indikator sasaran strategis dalam melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja.	Reviu capaian 43 Indikator program/kegiatan dan capaian Indikator sasaran strategis dalam melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja.	Melakukan Reviu pada capaian 43 Indikator program/kegiatan dan capaian Indikator sasaran strategis dalam melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja.
7	Mengoptimalkan pemanfaatan laporan kinerja dalam perencanaan kinerja ke	Mengoptimalkan pemanfaatan laporan kinerja dalam perencanaan kinerja		

	depan sehingga target yang ditetapkan lebih realistis.			
8	Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja agar dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan perencanaan kinerja dan peningkatan capaian kinerja	Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja		
9	Melengkapi dokumen data kinerja yang menjadi pembahasan dalam pelaksanaan evaluasi atau data yang disajikan sesuai dengan keperluan pengukuran kinerja yang diharapkan	Melengkapi dokumen data kinerja yang menjadi pembahasan dalam pelaksanaan evaluasi atau data yang disajikan sesuai dengan keperluan pengukuran kinerja		

Kegiatan Pelatihan SDM Yang telah dilaksanakan



Pengadaan Fisik

 <p>Belanja Pengadaan Canopy Remot Parkir Gedung Data Center dan Smoking Area Pengadaan langsung Nilai Kontrak : 197.180.299,60 Progres : 100%</p>	 <p>Belanja Pengadaan Landscape RPK (Lanskap) Pengadaan langsung Nilai Kontrak : 148.952.204,20 Progres : 100%</p>	 <p>Belanja Command Center E-Katalog Nilai Kontrak : 7.764.200.000 Progres : 100%</p>
 <p>Belanja Pengadaan lantai Parkir di Gedung RPK Pengadaan langsung Nilai Kontrak : 197.855.502 Progres : 100%</p>	 <p>Rehabilitasi Toilet Kamar Pengadaan langsung Nilai Kontrak : 161.253.784,80 Progres : 100%</p>	 <p>Belanja Rehabilitasi Ruang Studio Siaran RPK Pengadaan langsung Nilai Kontrak : 179.868.586,00 Progres : 100%</p>

2) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Indikator kinerja Program Pengelolaan Aplikasi Informatika tahun 2024 yaitu Cakupan Aplikasi yang dikelola OPD dengan target sebesar 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100% target kinerja tercapai karena Jumlah Perangkat Daerah (59 OPD) sudah mengelola Aplikasi baik Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus dalam pemanfaatan teknologi digital sebagai penunjang melaksanakan tugas fungsi tiap OPD.

Hasil Kegiatan Program APTIKA



TINDAK LANJUT 2 DESA YANG MASUK PROGRAM KEMENTERIAN KOMINFO RI BELUM TERHUBUNG JARINGAN TELEKOMUNIKASI

Membuat Surat Ke Kementerian Kominfo RI di Tandalangan Buntar Kutar Sebagai Tindak Lanjut Belum Terhubungnya Jaringan Telekomunikasi di 2 Desa yaitu Desa Umag Dan Kecamatan Tabang dan Umag Takong Kecamatan Tabang (Program Kementerian Kominfo RI)



PENGEMBANGAN APLIKASI



3) Program Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik (IKP)

Indikator kinerja Program Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik tahun 2024 yaitu Cakupan Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik dengan target sebesar 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100% Target kinerja tercapai karena tersedianya Jumlah Informasi dan Komunikasi Publik yang informasi yang dikelola dan media patner sebagai sarana dan prasarana dalam melakukan diseminasi informasi.

Hasil Kegiatan Pengelolaan Program IKP



4) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

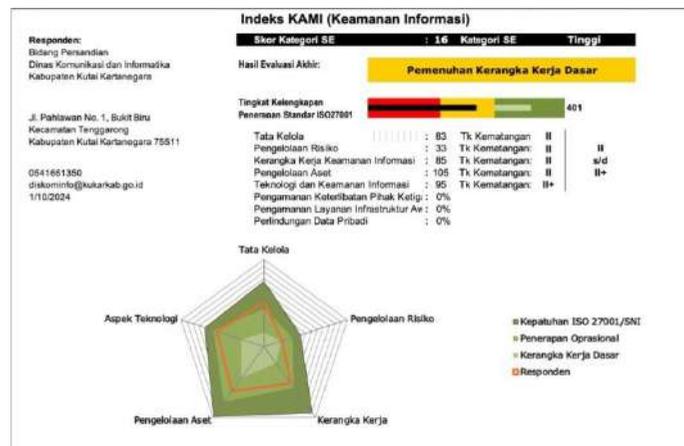
Indikator kinerja Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral tahun 2024 yaitu Cakupan/persentase OPD yang menyelenggarakan Satu Data Indonesia 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100% Target kinerja tercapai karena ketersediaan data di tiap OPD dan keaktifan OPD dalam mewujudkan Satu Data Indonesia.

Hasil Penyelenggaraan Program Statistik Sektoral



5) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Indikator kinerja Program Penyelenggaraan Persandian 2024 yaitu Cakupan OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan target sebesar 56,89% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai karena Kebijakan Kepala Daerah dan Ketersediaan Anggaran.



Tabel 3.8
Capaian Kinerja Program Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan
Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Penunjang	Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Persentase Realisasi Kinerja Program	Analisis Keberhasilan / Kegagalan
Meningkatkan Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		Indeks SPBE		3,2	3,09	96,56	Berhasil
	Meningkatkan Kualitas Domain Tata Kelola SPBE	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	86,00	68,17	79,26	Tidak Berhasil
		Cakupan Aplikasi yang dikelola OPD	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	100	100	100	Berhasil
	Meningkatnya Kualitas Domain Layanan SPBE	Cakupan Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	100	100	100	Berhasil
	Meningkatnya Kualitas Domain Manajemen SPBE	Cakupan OPD yang menyelenggarakan Satu Data Indonesia	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100	100	100	Berhasil
	Meningkatnya Kualitas Domain	Cakupan OPD yang menyelenggarakan	Program Penyelenggaraan	56,89	100	100	Berhasil

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Penunjang	Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Persentase Realisasi Kinerja Program	Analisis Keberhasilan / Kegagalan
	Kebijakan Internal SPBE	garakan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persandian Untuk Pengamanan Informasi				

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2024

Realisasi anggaran program/kegiatan Tahun Anggaran 2024 dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 95,51%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. 9
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
Meningkatnya Kualitas Domain Tata Kelola SPBE	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.486.848.774	23.323.002.961	88,06	3.163.845.813
		1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	200.000.000	184.580.247	92,29	15.419.753
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.593.896.869	9.314.431.639	80,34	2.279.465.230
		3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	125.000.000	99.166.000	98,96	25.834.000
		4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	150.000.000	148.441.500	98,96	1.558.500
		5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	900.705.462	837.238.997	92,96	63.421.465
		6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.530.094.000	7.239.990.992	96,15	290.103.008
		7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.271.139.896	3.811.857.864	89,25	459.282.032
		8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.716.012.547	1.687.250.722	98,32	28.761.825
Meningkatnya Kualitas Domain Layanan SPBE	Indeks Domain Layanan SPBE	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	80.600.357.336	78.527.739.629	97,43	2.072.617.707

		1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	80.600.357.336	78.527.739.629	97,43	2.072.617.707
Meningkatnya Kualitas Domain Manajemen SPBE	Indeks Domain Manajemen SPBE	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.300.000.000	1.947.244.470	84,66	352.755.530
		1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2.300.000.000	1.947.244.470	84,66	352.755.530
Meningkatnya Kualitas Domain Tata Kelola SPBE	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	108.824.352.470	104.602.759.325	96,12	4.221.593.145
		1. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	68.026.629.825	65.269.233.724	95,95	2.757.396.101
		2. Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	40.797.722.645	39.333.525.601	96,41	1.464.197.044
Meningkatnya Kualitas Domain Kebijakan Internal SPBE	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	1.050.000.000	1.009.529.849	96,15	40.470.151
		1. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	850.000.000	812.776.932	95,62	37.223.068
		2. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	200.000.000	196.752.917	98,38	3.247.083
Total			219.261.558.580	209.410.276.234	95,51	9.851.282.346

Sedangkan pada tahun sebelumnya (2023) realisasi anggaran sebesar 96,41%, dengan rincian sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun Sebelumnya (2023)

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
Meningkatnya Kualitas Domain Tata Kelola SPBE	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	48.241.703.541	45.425.022.273	94,16	2.816.681.268
		1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	275.000.000	226.137.232	82,23	48.862.768

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.230.351 .525	8.881.862.571	86.82	1.348.488.954
		3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	125.000.000	108.650.750	86.92	16.349.250
		4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.408.142.000	1.307.091. 752	92.82	101.050.248
		5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	9.203.410.000	8.654.094.922	94.03	549.315.078
		6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21.568.710.000	21.084.800.992	97.76	483.909.008
		7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.543.386.016	2.393.981.280	94.13	149.404.736
		8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.887.704.000	2.768.402.774	95.87	119.301.226
Meningkatnya Kualitas Domain Layanan SPBE	Indeks Domain Layanan SPBE	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	57.497.251.333	56.521.804.178	98.30	975.447.155
		1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	57.497.251.333	56.521.804.178	98.30	975.447.155
Meningkatnya Kualitas Domain Manajemen SPBE	Indeks Domain Manajemen SPBE	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.532.129.000	2.290.205.287	90.45	241.923.713
		1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2.532.129.000	2.290.205.287	90.45	241.923.713
Meningkatnya Kualitas Domain	Indeks Domain Tata	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	34.407.595.670	33.310.902. .001	96.81	1.096.693.669

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
Tata Kelola SPBE	Kelola SPBE					
		1. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	16.841.681.000	16.231.106.540	96.37	610.574.460
		2. Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	17.565.914.670	17.079.795.461	97.23	486.119.209
Meningkatnya Kualitas Domain Kebijakan Internal SPBE	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	700.000.000	690.173.749	98.60	9.826.251
		1. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	500.000.000	490.614.603	98.12	9.385.397
		2. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaen / Kota	200.000.000	199.559.146	99,78	440.854
Total			143.378.679.544	138.238.107.488	96.41	5.140.572.056

Dengan demikian, pada tahun 2024 terjadi penurunan realisasi anggaran sebesar 95,51%. Dibandingkan dengan tahun 2023 dengan realisasi anggaran 96,41% atau mengalami penurunan sebesar 0,9 %.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024, merupakan instrumen dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan dan kinerja sasaran. Dalam LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika ada beberapa hal yang dapat diambil kesimpulan yaitu :

1. Berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2024 Capaian Kinerja Indikator Utama Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu Indeks SPBE memperoleh nilai 3,09 (Baik), mencapai target sesuai Rencana Strategis Diskominfo 2021-2026 yaitu 3,2 (baik) dan mengalami Peningkatan pada tahun sebelumnya dimana pada tahun 2023 memperoleh nilai 2,54 (Cukup) atau terjadi peningkatan sebesar 0,55 dengan rincian sebagai berikut ;

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ sasaran	Satuan	Realisasi Kinerja 2023	Realisasi Kinerja 2024	Persentase Realisasi Kinerja	Keterangan
Meningkatkan Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		Indeks SPBE	Nilai	2,54	3,09	0,55	Meningkat
	Meningkatnya Kualitas Domain Tata Kelola SPBE	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Nilai	1,40	2,20	0,8	Meningkat
	Meningkatnya Kualitas Domain Layanan SPBE	Indeks Domain Layanan SPBE	Nilai	3,51	3,88	0,37	Meningkat
	Meningkatnya Kualitas Domain Manajemen SPBE	Indeks Domain Manajemen SPBE	Nilai	1,00	1,82	0,82	Meningkat

	SPBE						
	Meningkatnya Kualitas Domain Kebijakan Internal SPBE	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	Nilai	3,30	3,60	0,3	Meningkat

Sumber data : Indeks SPBE Th 2023 dan Laporan Pemantauan SPBE Th 2024

Secara umum capaian kinerja Program Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 rata-rata sebesar 99,63 % (Sangat Tinggi), dengan rincian sebagai berikut :

- a) Capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 79,27 % (Tinggi)
- b) Capaian kinerja Program Informasi dan Komunikasi sebesar 100% (Sangat Tinggi)
- c) Capaian kinerja Program Pengelolaan Aplikasi Informatika sebesar 100% (Sangat Tinggi)
- d) Capaian kinerja Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial sebesar 100% (Sangat Tinggi)
- e) Capaian kinerja Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi sebesar 100% (Sangat Tinggi).

Capaian kinerja Program tahun 2024 meningkat dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2023 capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar 99,58% atau terjadi peningkatan kinerja sebesar 0,05 %.

4.2 Perbaikan Kedepan

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja utama tahun 2024, maka rencana perbaikan kedepan adalah sebagai berikut :

- 1) Penguatan tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE dalam mengendalikan, mengarahkan, mengevaluasi dan melaksanakan perumusan kebijakan dan penerapan SPBE;
- 2) Melakukan koordinasi yang intensif dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat guna mewujudkan infrastruktur dan layanan SPBE yang terpadu;
- 3) Menetapkan secara formal dokumen perencanaan dan pedoman pelaksanaan SPBE serta memastikan penerapannya di seluruh perangkat daerah;

- 4) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia guna menunjang penerapan SPBE di seluruh perangkat daerah;
- 5) Meninjau kembali relevansi Indeks SPBE sebagai indikator kinerja utama pada Dinas Komunikasi dan Informatika;

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja selanjutnya.

Tenggarong, Februari 2024

Pt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA

SOLIHIN, S.Sos., MT
NIP. 19721029 199102 1 001

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SOLIHIN, S.Sos, MT
Jabatan : Plt. KEPALA DINAS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.
Jabatan : BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target dalam Rancana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perengakat Daerah yang saya pimpin.
2. Mewujudkan Tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)
3. Melaksanakan penilaian dan rencana kinerja pegawai serta nilai-nilai ASN "BerAKHLAK"
4. Melaksanakan Pengelolaan Barang dan Jasa secara efektif, transparan dan akuntabel

5. Melaksanakan secara konsisten proses tata kelola keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan.
6. Melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang Milik Daerah;
7. Melaksanakan Upaya peningkatan kualitas pelayanan public melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan Masyarakat, tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat, mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indek Pelayanan Publik;
8. Melaksanakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) / Inspektorat Daerah;
9. Melaksanakan upaya mitigasi risiko dalam [elaksanaan kegiatan pembangunan agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efesien;
10. Melaksanakan Manajemen Resiko Program dan kegiatan Perangkat Daerah;
11. Memastikan terlaksananya pembangunan yang berbasis kesetaraan gender;
12. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
13. Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan Pembangunan secara efektif dan efesien;
14. Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah;
15. Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan kemiskinan dan penurunan stanting;
16. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan Masyarakat;
17. Melaksanakana upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup Kabupaten Kutai Kartanegara;
18. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;

- 19 Melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara
- 20 Melaksanakan “Gerakan Etam Mengaji (GEMA)” di Perangkat Daerah;
- 21 Terbentuknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Perangkat Daerah;
- 22 Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang;

Pihak kedua:

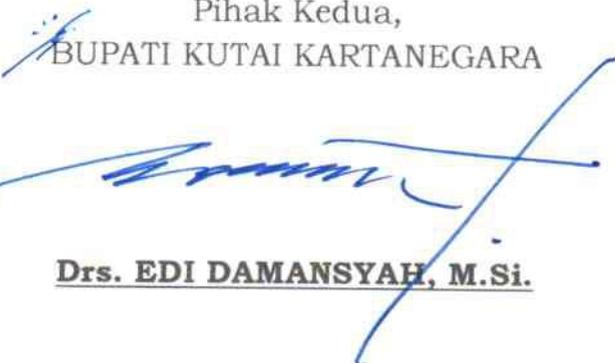
1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Kedua,

BUPATI KUTAI KARTANEGARA


Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.

Pihak Pertama,
Plt.KEPALA DINAS


SOLIHIN, S. SosMT
Pembina TK.I (IV/b)
NIP.19721029 199102 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Domain Tata Kelola SPBE	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Nilai	3,06
2	Meningkatnya Kualitas Domain Layanan SPBE	Indeks Domain Layanan SPBE)	Nilai	3,35
3	Meningkatnya Kualitas Domain Manajemen SPBE	Indeks Domain Manajemen SPBE	Nilai	3,15
4	Meningkatnya Kualitas Domain Kebijakan Internal SPBE	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	Nilai	3,03
5	Mewujudkan Tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% per tanggal 31 Maret setiap tahun	Persen	100
6	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% paling lambat akhir bulan Februari setiap tahun	Persen	100
7	Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP	Tingkat Kepatuhan Input serta pengumumam paket pengadaan aplikasi SIRUP per Akhir Februari setiap tahun	Persen	100
8	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% pertanggal 10 setiap bulan	Persen	100
9	Terlaksananya Kepatuhan	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan	Persen	100

	Penyampaian Usulan SHS (Standar Harga Satuan	Standar Harga Satuan (SHS) perangkat Daerah Paling lambat bulan April untuk tahun anggaran berikutnya		
10	Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100
11	Terlaksananya ketepatan Waktu Penyampaian LKJIP	Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Perangkat Daerah paling lambat akhir	Persen	100
12	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian IKK LPPD	Tingkat Ketepatan Waktu penyampaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Januari setiap tahun	Persen	100
13	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (LK) SKPD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan SKPD per tanggal 24 Januari setiap tahun	Persen	100
14	Terlaksananya Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Pelaporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Semester I paling lambat akhir bulan Juni dan Semester II akhir bulan Oktober setiap tahun	Persen	100

15	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Menilai Pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
16	Menyelesaikan Tindakan Laporan Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK atas audit LKPD 5 tahun	Persen	100
17	Terlaksanannya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SPIP	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Penilaian Mandiri Penyelenggraan SPIP Perangkat Daerah per 30 Juni Tahun berjalan	Persen	100
18	Penerapan Core Values ASN BerAKHLAK	Internalisasi Core Values ASN BerAKHLAK	Persen	100
19	Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai ke Pelaksana	Ketepatan Waktu penyusunan dan penyampaian perjanjian kinerja PD (maksimal 1 bulan setelah APBD ditetapkan)	Persen	100
20	Terlaksanannya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang diterbitkan	Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang terbit	Persen	70
21	Ketersediaan Dokumentasi Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
22	Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	Persen	100
23	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Nilai Tata Kelola ARSIP Perangkat Daerah	Persen	100
24	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persen	100

	Perangkat Daerah			
25	Peningkatan Prestasi Inovasi	Prestasi Inovasi Perangkat Daerah	Persen	100
26	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan Spa4n Lapor	Persen	100
27	Meningkatnya Pengamanan Aset	Pengamanan Aset Tanah	Persen	75
28	Meningkatnya Tata Kelola Aset	Pakta Integritas Pemakaian Aset BMD Tersedia sesuai dengan jumlah pejabat struktural, fungsional dan pelaksana pada perangkat daerah	Persen	100
29	Terlaksananya Program pengentasan Kemiskinan pada Perangkat Daerah	Jumlah program pengentasan kemiskinan	Jumlah	1
30	Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting sesuai dengan target Nasional	Persen	14
31	Pengarustamaan Gender	Ketersediaan pengganggu gender pengarustamaan gender	Persen	100
32	Peningkatan Investasi	Capaian Investasi Kabupaten Kutai Kartanegara	Persen	7,3 T
33	Pengendalian Inflasi	Angka inflasi maksimal 1,5% - 3,5%	Persen	100
34	Kepatuhan Pelaporan P3DN	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN per tanggal 25 setiap bulan	Persen	40
35	Meningkanya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,6
36	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	73

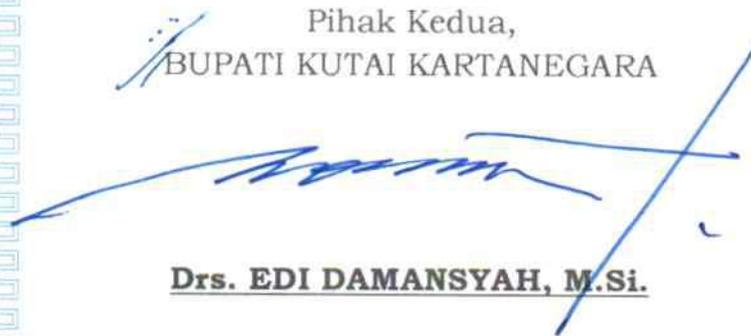
37	Meningkatnya manajemen birokrasi yan efektif, efesien, inovasi, akuntabel,bersih dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasa Pemerintah Daerah	Nilai	64
38	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	49,57
39	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Nilai	8,95
40	Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Standar Peayanan Pemerintah Daerah	Predikat	Zona Hijau
41	Terwujudnya Kawasa Tanpa Rokok/Vape	Kawasan Tanpa Rokok / Vape adalah area atau rung yang dinyatakan dilarang untik aktivitas merokok atau mempromosikan produk tembakau	Persen	100
42	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM perangkat daerah (Aplikasi Survey Kukar)	Persen	100
43	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	100
44	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Indikator Perangkat Daerah	Persen	100
45	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA) di Perangkat Daerah	Laporan Pemetaan Kemampuan Mengaji ASN Perangkat Daerah	Laporan	1
46	Terlaksana dan Terbentuknya Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Perangkat Daerah	Terbentuknya SK Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Perangkat Daerah	Surat Keputusan (SK)	1

PROGRAM DAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

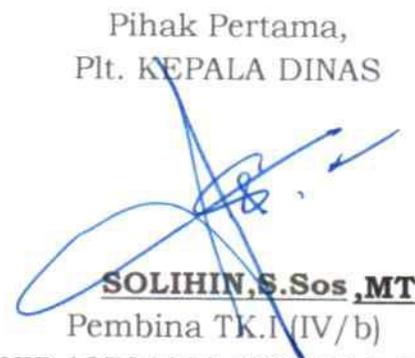
NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.486.848.774,00	APBD-P
2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	80.600.357.336,00	APBD-P
3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	108.824.352.470,00	APBD-P
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.300.000.000,00	APBD-P
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	1.050.000.000,00	APBD-P
JUMLAH ANGGARAN		219.261.558.580,00	

Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA


Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.

Pihak Pertama,
Plt. KEPALA DINAS


SOLIHIN, S.Sos, MT
Pembina TK.I (IV/b)
NIP.19721029 199102 1 001



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

LAPORAN HASIL EVALUASI SPBE TAHUN 2024

PEMERINTAH KAB. KUTAI KARTANEGARA



Sinergi untuk Indonesia Maju

KATA PENGANTAR

Puji syukur dihaturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga seluruh agenda tahapan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat dilaksanakan pada Tahun 2024. Pelaksanaan kegiatan evaluasi SPBE merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Besar harapan kami bahwa hasil evaluasi SPBE tahun 2024 dapat menggambarkan progres kemajuan penerapan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga memberikan panduan bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk peningkatan penerapan SPBE dalam rangka keterpaduan penerapan SPBE yang selaras dengan kebijakan nasional. Dengan semangat tersebut, maka dampak terciptanya layanan SPBE berkualitas, terintegrasi, dan berdaya guna yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta bermanfaat bagi masyarakat luas dapat diwujudkan secara konkret.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya atas upaya yang telah dilakukan oleh seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan progres penerapan SPBE, serta sinergi yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian/Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional dan Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, sehingga pelaksanaan Evaluasi SPBE tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik dan berjalan lancar.

Jakarta, 1 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :

NANIK MURWATI

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata
Laksana

NIP. 197208081996032001

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan Evaluasi SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Evaluasi SPBE ini, diharapkan dapat dimanfaatkan dalam menentukan arah tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada masyarakat dan terwujudnya Pemerintah Digital dalam kerangka Transformasi Digital Pemerintah.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE diukur dengan model tingkat kematangan SPBE, di mana setiap tingkat kematangan akan dideskripsikan dengan suatu kriteria yang menggambarkan karakteristik kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE yang terdiri atas 5 (lima) tingkatan, di mana semakin tinggi tingkat kematangan yang dimiliki oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menunjukkan semakin tinggi kapabilitas Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut.

Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu Penilaian Mandiri, Penilaian Dokumen, Penilaian Interview, serta Penilaian Visitasi (pada lokus tertentu).

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

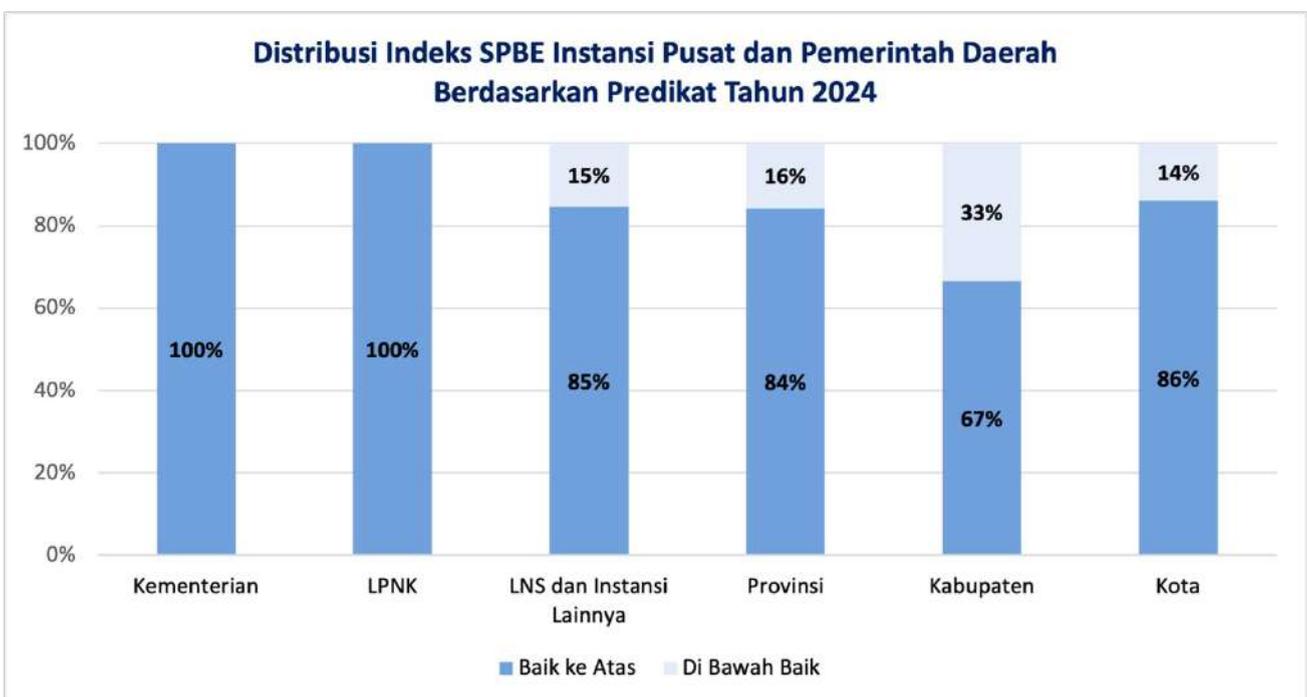


EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024

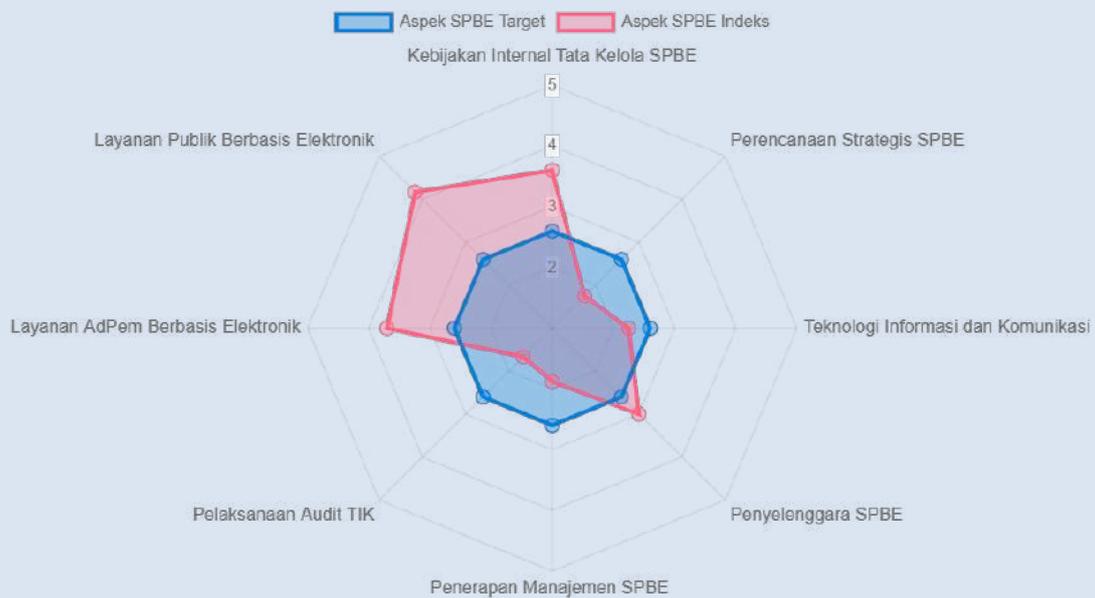
Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Predikat Indeks SPBE																				
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>NILAI INDEKS</th> <th>PREDIKAT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4,2 – 5,0</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3,5 – < 4,2</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,6 – < 3,5</td> <td>Baik *)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1,8 – < 2,6</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>< 1,8</td> <td>Kurang</td> </tr> </tbody> </table>	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 – < 3,5	Baik *)	4	1,8 – < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang		
NO	NILAI INDEKS		PREDIKAT																			
1	4,2 – 5,0		Memuaskan																			
2	3,5 – < 4,2		Sangat Baik																			
3	2,6 – < 3,5		Baik *)																			
4	1,8 – < 2,6	Cukup																				
5	< 1,8	Kurang																				
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%																					
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%																					
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%																					
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%																					
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%																					
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%																					
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%																					
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%																					
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%																					
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%																					
Aspek 8 - Layanan Publik	18%																					

*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Indeks	Rata-Rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	LNS dan Instansi Lainnya	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	3,12	4,03	3,82	3,37	3,42	2,45	3,39
Domain Kebijakan	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	2,51	3,64
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	3,23	3,64
Domain Tata Kelola	2,62	3,92	3,65	3,11	3,07	1,69	2,94
Perencanaan Strategis	2,41	3,74	3,68	3,01	2,84	1,54	2,60
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,75	4,06	3,75	3,11	3,26	1,76	3,10
Penyelenggaraan SPBE	2,80	4,00	3,40	3,32	3,14	1,85	3,31
Domain Manajemen	1,86	2,87	2,61	2,31	2,17	1,13	2,03
Penerapan Manajemen SPBE	1,91	2,96	2,68	2,38	2,19	1,16	2,09
Audit TIK	1,73	2,64	2,44	2,13	2,12	1,07	1,88
Domain Layanan SPBE	3,78	4,44	4,26	3,81	3,98	3,32	4,05
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,77	4,35	4,20	3,90	3,95	3,40	3,99
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,80	4,58	4,36	3,67	4,04	3,21	4,15



Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



Nama Indeks	Nilai 2024
SPBE	3,09
Domain Kebijakan SPBE	3,60
<i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>	<i>3,60</i>
Domain Tata Kelola SPBE	2,20
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	<i>1,75</i>
<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	<i>2,25</i>
<i>Penyelenggara SPBE</i>	<i>3,00</i>
Domain Manajemen SPBE	1,82
<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	<i>1,88</i>
<i>Audit TIK</i>	<i>1,67</i>
Domain Layanan SPBE	3,88
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	<i>3,70</i>
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	<i>4,17</i>

KEKUATAN DAN KELEMAHAN

A. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan, penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE sudah dipenuhi seluruhnya oleh Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu dengan adanya Kebijakan Internal Arsitektur SPBE, Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE, Kebijakan Internal Manajemen Data, Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE, Kebijakan Internal Layanan Pusat Data, Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra, Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan, Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi, Kebijakan Internal Audit TIK, dan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE.

- **Kekuatan**
Pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola ini dapat terlihat adanya Kebijakan Internal untuk Arsitektur SPBE (indikator 1), Peta Rencana SPBE (indikator 2), Manajemen Data (indikator 3), Pembangunan Aplikasi SPBE (indikator 4), Layanan Pusat Data (indikator 5), Penggunaan Sistem Penghubung Layanan (indikator 7), Manajemen Keamanan Informasi (indikator 8), dan Audit TIK (indikator 9) menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Kabupaten Kutai Kartanegara. Kebijakan Internal Tata Kelola dibuktikan dengan adanya Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 sebagai dasar hukum pengaturan penerapan serta norma arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, manajemen data, pembangunan aplikasi SPBE, layanan pusat data, penggunaan sistem penghubung layanan, serta audit TIK di lingkup pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Peraturan Bupati tersebut telah mencakup seluruh ruang lingkup sesuai dengan referensi penyelenggaraan SPBE dan telah melalui proses reviu.
- **Kelemahan**
Namun di sisi lain, Kabupaten Kutai Kartanegara masih belum memiliki Kebijakan Internal untuk Layanan Jaringan Intra (indikator 6) dan Tim Koordinasi SPBE (indikator 10) secara lengkap sesuai dengan cakupan dan muatan referensi penyelenggaraan SPBE.

B. Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE yang sudah dipenuhi oleh Kabupaten Kutai Kartanegara adalah dengan adanya Perencanaan Strategis Arsitektur SPBE dan Perencanaan Strategis Peta Rencana SPBE.

- **Kekuatan**
Belum ada indikator yang menunjukkan kekuatan pada Aspek Perencanaan Strategis di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- **Kelemahan**
Namun di sisi lain, Kabupaten Kutai Kartanegara masih belum melaksanakan Perencanaan Strategis Arsitektur SPBE (indikator 11), Perencanaan Strategis Rencana dan Anggaran (indikator 13), dan Perencanaan Strategis Inovasi Proses Bisnis SPBE (indikator 14) secara lengkap sesuai dengan cakupan dan muatan referensi penyelenggaraan SPBE. Belum ada dokumentasi arsitektur SPBE sesuai dengan pedoman yang berlaku. Selain itu, penyusunan DPA/RKA belum dikonsultasikan dengan unit pengelola TIK. Lebih jauh lagi, Proses Bisnis SPBE belum disusun sesuai pedoman yang berlaku.

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sudah dipenuhi oleh Kabupaten Kutai Kartanegara adalah dengan adanya Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE, Kematangan Layanan Pusat Data, Kematangan Layanan Jaringan Intra, dan Kematangan Sistem Hubung Layanan.

- **Kekuatan**
Belum ada indikator yang menunjukkan kekuatan pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- **Kelemahan**
Namun di sisi lain, Kabupaten Kutai Kartanegara masih belum memiliki Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE (indikator 15), Layanan Pusat Data (indikator 16), dan Layanan Jaringan Intra (indikator 17) secara lengkap sesuai dengan cakupan dan muatan referensi penyelenggaraan SPBE. Layanan pusat data dan layanan jaringan intra belum terlihat dimanfaatkan oleh seluruh unit kerja. Selain itu, belum ada dokumentasi formal pengembangan aplikasi SPBE sesuai dengan siklus pengembangan aplikasi.

D. Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penyelenggara SPBE yang sudah dipenuhi oleh Kabupaten Kutai Kartanegara adalah dengan adanya Kematangan Tim Koordinasi SPBE dan Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE.

- Kekuatan
Belum ada indikator yang menunjukkan kekuatan pada Aspek Penyelenggara SPBE di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Kelemahan
Tidak ada indikator yang menunjukkan kelemahan pada Aspek Penyelenggara SPBE di Kabupaten Kutai Kartanegara.

E. Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE yang sudah dipenuhi oleh Kabupaten Kutai Kartanegara adalah dengan adanya Penerapan Manajemen Risiko SPBE, Penerapan Manajemen Keamanan Informasi, Penerapan Manajemen Data, Penerapan Manajemen Aset TIK, Penerapan Kompetensi SDM, Penerapan Manajemen Pengetahuan, serta Penerapan Manajemen Layanan SPBE.

- Kekuatan
Belum ada indikator yang menunjukkan kekuatan pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Kelemahan
Pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE ini dapat terlihat bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara masih belum melaksanakan Penerapan Manajemen Risiko SPBE (indikator 21), Penerapan Manajemen Keamanan Informasi (indikator 22), Penerapan Manajemen Data (indikator 23), Penerapan Manajemen Aset TIK (indikator 24), Penerapan Kompetensi SDM (indikator 25), Penerapan Manajemen Pengetahuan (indikator 26), Penerapan Manajemen Perubahan (indikator 27), serta Penerapan Manajemen Layanan SPBE (indikator 28) sesuai dengan cakupan dan muatan referensi penyelenggaraan SPBE. Kabupaten Kutai Kartanegara belum mulai menerapkan manajemen perubahan SPBE. Pada aspek manajemen untuk indikator-indikator lainnya, Kabupaten Kutai Kartanegara telah mulai menerapkan manajemen SPBE namun belum memenuhi cakupan sesuai acuan penyelenggaraan SPBE.

F. Pelaksanaan Audit TIK

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Audit TIK yang sudah dipenuhi oleh Kabupaten Kutai Kartanegara adalah dengan adanya Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE.

- Kekuatan
Belum ada indikator yang menunjukkan kekuatan pada Aspek Audit TIK di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Kelemahan
Pada Aspek Audit TIK ini dapat terlihat bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara masih belum melaksanakan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE (indikator 29) dan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE (indikator 30) sesuai dengan cakupan dan muatan referensi penyelenggaraan SPBE. Kabupaten Kutai Kartanegara belum melakukan audit infrastruktur SPBE maupun audit aplikasi SPBE.

G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Kabupaten Kutai Kartanegara adalah dengan adanya Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan Dinamis, Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Layanan Pengawasan Internal Pemerintah, Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dan Layanan Kinerja Pegawai.

- Kekuatan
Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik ini dapat terlihat adanya Layanan Perencanaan (indikator 32), Layanan Penganggaran (indikator 33), Layanan Keuangan (indikator 34), Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (indikator 35), Layanan Kepegawaian (indikator 36), Layanan Kearsipan Dinamis (indikator 37), Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (indikator 40), dan Layanan Kinerja Pegawai (indikator 41) menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Kabupaten Kutai Kartanegara. Kabupaten Kutai Kartanegara telah memanfaatkan berbagai aplikasi umum dan berbagi pakai dalam mendukung layanannya. Adapun aplikasi-aplikasi yang digunakan antara lain SIPD (untuk layanan perencanaan, penganggaran, dan keuangan), SPSE (untuk layanan pengadaan barang dan jasa), SIASN (untuk layanan kepegawaian), Srikandi (untuk layanan kearsipan dinamis), e-SAKIP (untuk layanan akuntabilitas kinerja organisasi), dan e-Kinerja (untuk layanan kinerja pegawai).

- Kelemahan
Namun di sisi lain, pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, Kabupaten Kutai Kartanegara belum memiliki Layanan Pengawasan Internal (indikator 39) sesuai dengan pedoman. Kabupaten Kutai Kartanegara memanfaatkan aplikasi SIMPETAL yang belum mendukung fitur transaksional.

H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Kabupaten Kutai Kartanegara adalah dengan adanya Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Data Terbuka, Layanan JDIH, Layanan Publik Sektor 1, Layanan Publik Sektor 2, dan Layanan Publik Sektor 3.

- Kekuatan
Pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik ini dapat terlihat adanya Layanan Pengaduan Pelayanan Publik (indikator 42), Layanan Data Terbuka (indikator 43), Layanan JDIH (indikator 44), Layanan Publik Sektor 1 (indikator 45), Layanan Publik Sektor 2 (indikator 46), dan Layanan Publik Sektor 3 (indikator 47) menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Kabupaten Kutai Kartanegara. Kabupaten Kutai Kartanegara telah memanfaatkan SP4N LAPOR! untuk layanan pengaduan publik, telah memiliki portal satu data yang terintegrasi dengan Satu Data Indonesia, serta telah menggunakan JDIH yang terintegrasi dengan JDIHN. Layanan Publik Sektor yang digunakan oleh Kabupaten Kutai Kartanegara antara lain MPP Digital, aplikasi layanan beasiswa yang terintegrasi dengan SIMPEG dan layanan beasiswa provinsi, serta aplikasi kependudukan online yang terintegrasi dengan berbagai aplikasi lain.
- Kelemahan
Tidak ada indikator yang menunjukkan kelemahan pada Aspek Layanan Publik di Kabupaten Kutai Kartanegara.

REKOMENDASI

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE, akan mendorong peningkatan penerapan SPBE Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu dengan nilai indeks 3.0855, sudah dapat menggambarkan predikat Baik dalam penerapan SPBE, sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan.

Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Kabupaten Kutai Kartanegara adalah pada penerapan Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE, Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik. Keunggulan ini terlihat dari adanya Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 sebagai dasar hukum penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kebijakan tersebut telah mencakup muatan-muatan sesuai pedoman penyelenggaraan SPBE secara lengkap. Pada aspek layanan, baik layanan administrasi pemerintahan maupun layanan publik, Kabupaten Kutai Kartanegara telah memanfaatkan berbagai aplikasi umum maupun aplikasi berbagi pakai, antara lain SIPD, SPSE, SIASN, Srikandi, e-SAKIP, e-Kinerja, dan SP4N LAPOR!. Kabupaten Kutai Kartanegara juga memiliki MPP Digital, layanan beasiswa, serta layanan kependudukan online yang pengelolaannya dilakukan secara berkala. Seluruh kebijakan dan pemanfaatan layanan tersebut memberikan gambaran pelaksanaan SPBE di internal Kabupaten Kutai Kartanegara yang terorganisir dan menyeluruh dalam lingkup perangkat daerah, sehingga kinerja pemerintah daerah menjadi optimal.

Namun di sisi lain, Kabupaten Kutai Kartanegara masih menunjukkan beberapa kelemahan, khususnya pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE, Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi, Aspek Penerapan Manajemen SPBE, dan Aspek Audit TIK. Dari segi perencanaan strategis serta teknologi informasi dan komunikasi, Kabupaten Kutai Kartanegara telah mulai menerapkan aspek-aspek tersebut namun hanya mencakup sebagian muatan. Dari segi penerapan manajemen SPBE sekaligus audit TIK, Kabupaten Kutai Kartanegara sudah mulai menerapkan manajemen SPBE namun belum mengacu pada pedoman yang berlaku. Oleh karena itu, hasil pelaksanaan manajemen SPBE tersebut belum dapat dikatakan memenuhi standar yang berlaku, yang membuat pelaksanaan SPBE menjadi kurang optimal.

Kabupaten Kutai Kartanegara telah berhasil memperoleh predikat Baik untuk penerapan SPBE di lingkup daerahnya, dan itu patut diapresiasi. Pencapaian tersebut tentunya diperoleh melalui kolaborasi dan kerja sama semua pihak. Terhadap semua aspek yang dapat dikatakan unggul, seperti Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE, Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik, Kabupaten Kutai Kartanegara hendaknya terus berusaha untuk menjaga keberlangsungan pencapaian aspek-aspek tersebut, sehingga optimalitas pelaksanaan SPBE tetap terjaga, serta di evaluasi berikutnya, nilainya bisa meningkat atau paling tidak tetap terjaga baik. Adapun untuk aspek-aspek yang masih dianggap lemah, Kabupaten Kutai Kartanegara hendaknya memberikan perhatian khusus terhadap pemenuhan indikator dan kriteria penilaian yang disesuaikan dengan target. Secara spesifik, pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE, hal yang kiranya dapat dilakukan adalah melengkapi dokumentasi arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE sesuai dengan cakupan dan muatan yang diatur dalam referensi penyelenggaraan SPBE. Selain itu, Kabupaten Kutai Kartanegara juga dapat memastikan layanan-layanan TIK seperti pembangunan aplikasi SPBE, layanan pusat data, layanan jaringan intra, serta layanan sistem penghubung layanan dimanfaatkan oleh seluruh unit kerja. Pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE dan Aspek Audit TIK, Kabupaten Kutai Kartanegara hendaknya dapat menyesuaikan penerapan manajemen SPBE dengan pedoman yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar penerapan manajemen SPBE di Kabupaten Kutai Kartanegara memenuhi standar yang berlaku, sehingga dapat mendukung optimalitas penyelenggaraan SPBE nasional.

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2024
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi	4
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi	4
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	4
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	4
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	4
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	2
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung	4
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	4
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	4
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi	2
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	1
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	1
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	2
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	2
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah	3
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	2
19	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi	3
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	3
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	2
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	2
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	2
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	2
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	2
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	2
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	2
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	3
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	4
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	3
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	2
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	4
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	4

42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	4
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi	5
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	4
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	4
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	4



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



Sinergi untuk Indonesia Maju

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2024



Report Pelaporan Penyelenggara Negara

Penarikan Data per Tanggal : 26/02/2025 00:10:05



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA - REIQVMgS09NVU5JS0FTSSBEQU4gSU5GT1JNQVRJS0FCM2JoNGYxZDRAa1U

LAPORAN

Tahun Pelaporan
2024

Jenis Laporan
All

Status Pelaporan
All

Tepat/Terlambat
All

INSTANSI DAN JABATAN

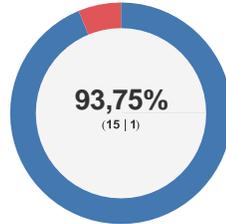
Tingkat
All

Eselon
All

Status UU
All

Subunit Kerja
All

Persentase Pelaporan



Sudah Lapor Belum Lapor

Sudah Lapor	Belum Lapor	Wajib Lapor
15	1	16

Persentase Ketepatan

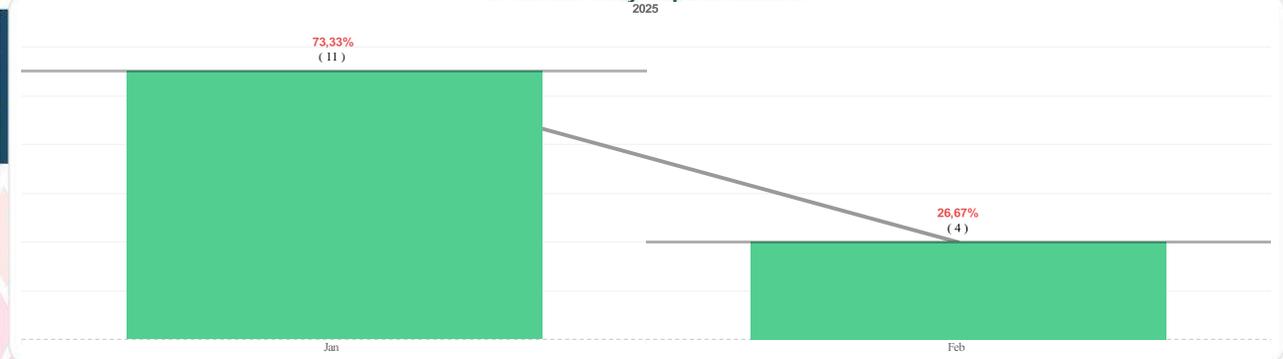


Tepat Waktu

Tepat Waktu	Sudah Lapor
15	15

Lihat Data Detail

Grafik Penyampaian LHKPN 2025



Cut off date per tanggal 27 Februari 2025

**PEMANTAUAN PELAPORAN SPT TAHUNAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIK
30 JANUARI 2025**

No	Nama	Nomor Tanda Terima Elektronik	Tanggal Laporan	Keterangan
1	MUHAMAD YANI	928341064472552074514	07 Januari 2025	SUDAH LAPOR
2	MASLAN	640321064992551075508	07 Januari 2025	SUDAH LAPOR
3	PUIJI LESTARI	644421063452563085315	08 Januari 2025	SUDAH LAPOR
4	IPAHA	823291064342551094309	09 Januari 2025	SUDAH LAPOR
5	TOUFIKKURRAHMAN,SE	64749106402257709331	09 Januari 2025	SUDAH LAPOR
6	AGUST WIRAKUSUMAH,Amd	30707106446257709541	09 Januari 2025	SUDAH LAPOR
7	IRWAN FITRIANSYAH	25756106404257709141	09 Januari 2025	SUDAH LAPOR
8	DEWI MAYASARI	75882106379253908411	08 Januari 2025	SUDAH LAPOR
9	SUGENG NURHUDA, A. Md	13113106461256109301	09 Januari 2025	SUDAH LAPOR
10	ZAINUL EFFENDI JOESOEF	34834206313256103141	03 Februari 2025	SUDAH LAPOR
11	YULIANTI	70855106493257713621	13 Januari 2025	SUDAH LAPOR
12	ANGGORO PRASTOWO,SH	85657106315255113301	13 Januari 2025	SUDAH LAPOR
13	TILAWATI, SH	61571106324253713051	13 Januari 2025	SUDAH LAPOR
14	MUHAMMAD IWAN SARWANI	23579106422252813321	13 Januari 2025	SUDAH LAPOR
15	NILA EKA CHANDRA,SE	94806106336257713551	13 Januari 2025	SUDAH LAPOR
16	FAJAR HARYADI	64419106316256113901	13 Januari 2025	SUDAH LAPOR
17	NURBAYATI REGUSTINA BS	722641063292541147211	14 Januari 2025	SUDAH LAPOR
18	NURHAYATI,SH	424151063242542140409	14 Januari 2025	SUDAH LAPOR
19	RUSNA JEMAIN	447981064972577072112	07 Januari 2025	SUDAH LAPOR
20	SURIYADI, S.Sos	058631063442577140110	14 Januari 2025	SUDAH LAPOR
21	ERIKA HERDIYANTI	801111064272561086316	08 Januari 2025	SUDAH LAPOR
22	CATUR MISIRAN, S.Sos	74081106378255109240	09 Januari 2025	SUDAH LAPOR
23	ERWINSYAH	859201064082537143208	14 Januari 2025	SUDAH LAPOR
24	H. ANDRI AFIAT, SE. M.Si	207261063482576142211	14 Januari 2025	SUDAH LAPOR
25	WAHYU ARIFYANDI, S.Sos	634381063062551152409	15 Januari 2025	SUDAH LAPOR
26	BUDIAN NOOR	751831063752551154509	15 Januari 2025	SUDAH LAPOR
27	ANDRY PRAMUDYA DWINATA R.A.S.STP	02072106351255115750	15 Januari 2025	SUDAH LAPOR
28	MAULIDA SAVITRI, SP	82561106305255216150	16 Januari 2025	SUDAH LAPOR
29	SITI NURANI,SE	937861063352542168308	16 Januari 2025	SUDAH LAPOR
30	HERI AULIA	71705106331255121500	21 Januari 2025	SUDAH LAPOR
31	FITRIYADI	41871106448257714630	14 Januari 2025	SUDAH LAPOR
32	MURJIANTI,SE/HARI YANTO	845431064242570218407	21 Januari 2025	SUDAH LAPOR
33	SOFIYAN AGUS,ST	017961063772595152007	15 Januari 2025	SUDAH LAPOR
34	M.AGRI WINATA	93377106463252408911	08 Januari 2025	SUDAH LAPOR
35	A. HAIRI PUTRA	524581063982551068514	06 Januari 2025	SUDAH LAPOR
36	AHMAD RAHADIAN	359781063492551302409	30 Januari 2025	SUDAH LAPOR
37	RODIANSYAH	10986106435255123800	23 Januari 2025	SUDAH LAPOR
38	HERIYANTO	211381063142595303310	30 Januari 2025	SUDAH LAPOR
39	TANTRI SAPTA DEWI	251951063252552144408	14 Januari 2025	SUDAH LAPOR
40	SOLIHIN, S.Sos, MT	913241063412596311408	31 Januari 2025	SUDAH LAPOR
41	ERY HARIYONO	12453106391254310910	10 Januari 2025	SUDAH LAPOR
42	SUSANTI	516832063482542062116	06 Februari 2025	SUDAH LAPOR
43	SUHARRIANI NUR	50835106393255114610	14 Januari 2025	SUDAH LAPOR
44	HARTONO KUSBANDI	224851064952552301116	30 Januari 2025	SUDAH LAPOR
45	HERMAWAN	82926206393258604221	04 Februari 2025	SUDAH LAPOR
46	HI. MISLIANI/RAKHMADI	71784206336254104500	04 Februari 2025	SUDAH LAPOR
47	MUHAMMAD SUBHAN	037152064082577033111	03 Februari 2025	SUDAH LAPOR
48	EMA HANDAYANI	430591064122597308111	30 Januari 2025	SUDAH LAPOR
49	DAHLANSYAH	342591063672596079313	07 Januari 2025	SUDAH LAPOR
50	M.ALI YUSNI	058221064332577068416	06 Januari 2025	SUDAH LAPOR
51	RIDWANSYAH	11508206371255105130	05 Februari 2025	SUDAH LAPOR
52	KHAIRUNNISA, JA	311481063332537152014	15 Januari 2025	SUDAH LAPOR
53	WIDIANTORO	343321063862551217208	21 Januari 2025	SUDAH LAPOR
54	RUDI IRWANSYAH	54250106329255731920	31 Januari 2025	SUDAH LAPOR
55	ACHMADIN	731062064962551102313	10 Februari 2025	SUDAH LAPOR
56	ADI LISTIONO	35042206394255103511	03 Februari 2025	SUDAH LAPOR
57	RINA WARDANI	048142064492577036008	03 Februari 2025	SUDAH LAPOR
58	MAIZARA DEWI UTOMO	35919206416255203011	03 Februari 2025	SUDAH LAPOR
59	MUSLIDAR	153931064852537076309	07 Januari 2025	SUDAH LAPOR
60	BUDI ARTHA SYUHADA	45847206304251703411	03 Februari 2025	SUDAH LAPOR
61	H. ASDI	106972063562541034508	03 Februari 2025	SUDAH LAPOR
62	SUDARMAN	84203106391257413321	13 Januari 2025	SUDAH LAPOR
63	RAHMAWATI	05157206605255119911	19 Februari 2025	SUDAH LAPOR
64	EKA JERTI LISSUTANTI			
65	ICHWAN EFENDI			

KETERANGAN

JUMLAH WAJIB LAPOR
JUMLAH SUDAH LAPOR
JUMLAH YANG BELUM LAPOR

Orang
Orang
Orang

REKAP PENGADAAN BARANG DAN JASA

SENIN 30/12/2024

NO	OPD	RUP		REALISASI		PERSENTASE		KETERANGAN	
		PAKET	PAGU	PAKET	PAGU	PAKET	PAGU	PROSES	SELESAI
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	69	4.059.176.000	25	3.353.923.500	36%	83%	22 Proses	3 Selesai
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	51	11.502.417.150	29	8.581.430.150	57%	75%	0 Proses	29 Selesai
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	101	27.268.618.718	67	24.509.014.150	66%	90%	31 Proses	36 Selesai
4	Badan Pendapatan Daerah	112	26.284.645.385	53	25.323.366.380	47%	96%	25 Proses	28 Selesai
5	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	161	4.407.058.060	89	3.792.192.325	55%	86%	23 Proses	66 Selesai
6	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	216	42.826.448.816	89	39.314.511.559	41%	92%	56 Proses	33 Selesai
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	50	9.411.802.694	42	8.818.808.894	84%	94%	38 Proses	4 Selesai
8	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	225	13.784.201.608	186	13.332.105.992	83%	97%	0 Proses	186 Selesai
9	Dinas Kelautan dan Perikanan	912	534.738.368.010	791	515.525.113.337	87%	96%	244 Proses	547 Selesai
10	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	418	56.237.916.634	249	43.913.162.968	60%	78%	190 Proses	59 Selesai
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	15	4.902.624.602	15	4.902.624.602	100%	100%	7 Proses	8 Selesai
12	Dinas Ketahanan Pangan	144	16.198.043.220	133	16.061.961.220	92%	99%	37 Proses	96 Selesai
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	605	190.235.858.538	505	185.961.666.715	83%	98%	333 Proses	172 Selesai
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	125	13.739.873.305	49	12.643.862.400	39%	92%	25 Proses	24 Selesai
15	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	366	66.484.247.785	82	62.834.254.710	22%	95%	47 Proses	35 Selesai
16	Dinas Pariwisata	185	104.362.050.338	130	90.764.986.449	70%	87%	75 Proses	55 Selesai
17	Dinas Pekerjaan Umum	2.697	2.880.533.077.556	1.600	2.779.704.502.679	59%	96%	226 Proses	1374 Selesai
18	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	206	31.417.423.929	59	28.242.142.007	29%	90%	28 Proses	31 Selesai
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	368	115.027.962.400	311	105.790.771.552	85%	92%	134 Proses	177 Selesai
20	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	148	14.995.263.774	72	13.603.688.700	49%	91%	31 Proses	41 Selesai
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	127	5.494.099.535	29	3.585.649.288	23%	65%	18 Proses	11 Selesai
22	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.061	1.143.956.186.266	1.518	1.074.497.668.465	74%	94%	250 Proses	1268 Selesai
23	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	40	7.279.454.014	28	6.216.396.014	70%	85%	13 Proses	15 Selesai
24	Dinas Perhubungan	572	186.707.250.865	382	165.972.265.675	67%	89%	60 Proses	322 Selesai
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	304	64.200.836.484	174	61.671.135.669	57%	96%	42 Proses	132 Selesai
26	Dinas Perkebunan	156	27.169.976.755	151	27.065.706.755	97%	100%	75 Proses	76 Selesai
27	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	136	8.541.277.841	105	7.995.320.864	77%	94%	59 Proses	46 Selesai
28	Dinas Pertanian dan Peternakan	431	148.605.850.549	342	140.003.883.011	79%	94%	123 Proses	219 Selesai
29	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.504	581.738.266.127	1.348	579.808.478.065	90%	100%	85 Proses	1263 Selesai
30	Dinas Sosial	80	16.425.946.366	78	16.300.746.366	98%	99%	44 Proses	34 Selesai
31	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	158	22.012.032.100	101	21.152.261.800	64%	96%	45 Proses	56 Selesai
32	Inspektorat Kabupaten	152	37.652.246.682	61	33.362.598.550	40%	89%	54 Proses	7 Selesai
33	Kecamatan Anggana	788	53.591.324.611	404	52.508.251.202	51%	98%	41 Proses	363 Selesai
34	Kecamatan Kembang Janggut	203	9.841.921.425	85	8.822.505.300	42%	90%	20 Proses	65 Selesai
35	Kecamatan Kenohan	142	7.356.552.767	84	6.640.904.000	59%	90%	34 Proses	50 Selesai
36	Kecamatan Kota Bangun	264	14.189.639.297	147	13.420.429.275	56%	95%	12 Proses	135 Selesai
37	Kecamatan Kota Bangun Darat	381	23.549.430.089	203	23.004.915.000	53%	98%	6 Proses	197 Selesai
38	Kecamatan Loa Janan	744	41.617.225.342	384	40.508.503.486	52%	97%	15 Proses	369 Selesai
39	Kecamatan Loa Kulu	850	46.215.768.645	555	45.135.758.360	65%	98%	5 Proses	550 Selesai
40	Kecamatan Marangkayu	270	25.686.196.601	157	18.318.765.718	58%	71%	23 Proses	134 Selesai
41	Kecamatan Muara Badak	632	33.340.439.518	323	31.826.783.286	51%	95%	41 Proses	282 Selesai
42	Kecamatan Muara Kaman	461	24.366.594.758	178	22.225.866.765	39%	91%	8 Proses	170 Selesai
43	Kecamatan Muara Muntai	194	12.087.722.886	146	10.269.673.431	75%	85%	18 Proses	128 Selesai
44	Kecamatan Muara Wis	164	9.963.705.000	94	9.963.705.000	57%	100%	0 Proses	94 Selesai
45	Kecamatan Sebulu	414	22.775.553.324	158	20.860.092.835	38%	92%	13 Proses	145 Selesai
46	Kecamatan Tabang	142	8.650.642.007	59	6.174.361.634	42%	71%	20 Proses	39 Selesai
47	Kecamatan Tenggaraong Seberang	1.069	66.519.497.738	561	65.981.724.444	52%	99%	80 Proses	481 Selesai
48	Satuan Polisi Pamong Praja	56	3.711.999.549	29	3.622.915.439	52%	98%	19 Proses	10 Selesai
49	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	151	91.622.395.830	99	85.665.844.680	66%	93%	48 Proses	51 Selesai
50	Kecamatan Muara Jawa	1.254	60.376.789.269	975	55.441.007.942	78%	92%	56 Proses	919 Selesai
51	Kelurahan Dondang	23	764.240.000	22	762.240.000	96%	100%	8 Proses	14 Selesai
52	Kelurahan Muara Jawa Ilir	34	760.380.000	29	760.380.000	85%	100%	7 Proses	22 Selesai
53	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	37	772.804.000	36	768.304.000	97%	99%	10 Proses	26 Selesai
54	Kelurahan Muara Jawa Tengah	35	817.020.000	22	799.840.000	63%	98%	6 Proses	16 Selesai
55	Kelurahan Muara Jawa Ulu	34	812.820.000	34	812.820.000	100%	100%	7 Proses	27 Selesai
56	Kelurahan Muara Kembang	33	793.482.700	21	789.542.700	64%	100%	1 Proses	20 Selesai
57	Kelurahan Tama Pole	29	764.010.000	28	761.260.000	97%	100%	8 Proses	20 Selesai
58	Kelurahan Teluk Dalam	39	614.103.000	28	606.763.000	72%	99%	15 Proses	13 Selesai
59	Kecamatan Samboja	1.811	103.497.654.193	1.134	101.196.944.174	63%	98%	14 Proses	1120 Selesai
60	Kelurahan Handil Baru	26	857.790.300	20	815.277.500	77%	95%	2 Proses	18 Selesai
61	Kelurahan Handil Baru Darat	33	810.770.500	22	769.832.000	67%	95%	3 Proses	19 Selesai
62	Kelurahan Kampung Lama	32	774.787.500	19	668.310.000	59%	86%	6 Proses	13 Selesai
63	Kelurahan Kuala Samboja	33	1.013.057.500	21	948.110.000	64%	94%	2 Proses	19 Selesai
64	Kelurahan Muara Sembilang	44	844.753.500	20	698.732.189	45%	83%	0 Proses	20 Selesai
65	Kelurahan Sanipah	36	805.187.500	16	763.710.000	44%	95%	1 Proses	15 Selesai
66	Kelurahan Sungai Seluang	32	819.766.500	19	797.425.000	59%	97%	0 Proses	19 Selesai
67	Kelurahan Tanjung Harapan	43	1.333.180.500	29	729.984.000	67%	55%	6 Proses	23 Selesai
68	Kelurahan Teluk Pemedas	41	1.288.067.500	28	759.630.000	68%	59%	4 Proses	24 Selesai
69	Kelurahan Wonotirto	37	851.427.500	16	771.030.000	43%	91%	0 Proses	16 Selesai
70	Kecamatan Samboja Barat	1.287	81.926.645.967	728	79.374.203.002	57%	97%	14 Proses	714 Selesai
71	Kelurahan Ambarawang Darat	52	979.196.571	33	841.295.000	63%	86%	5 Proses	28 Selesai
72	Kelurahan Ambarawang Laut	45	869.660.000	28	861.206.300	62%	99%	0 Proses	28 Selesai
73	Kelurahan Argosari	33	766.484.000	20	658.355.000	61%	86%	2 Proses	18 Selesai
74	Kelurahan Bukit Merdeka	25	886.263.000	13	867.613.000	52%	98%	3 Proses	10 Selesai
75	Kelurahan Karya Merdeka	25	839.812.000	21	834.145.800	84%	99%	6 Proses	15 Selesai
76	Kelurahan Margomulyo	43	1.009.449.000	23	784.686.000	53%	78%	4 Proses	19 Selesai
77	Kelurahan Salok Api Darat	34	825.210.000	25	811.137.000	74%	98%	5 Proses	20 Selesai
78	Kelurahan Salok Api Laut	38	865.639.000	25	827.645.000	66%	96%	3 Proses	22 Selesai
79	Kelurahan Sungai Merdeka	36	1.343.632.878	13	848.319.905	36%	63%	4 Proses	9 Selesai
80	Kecamatan Sanga Sanga	289	27.287.427.216	286	27.301.449.716	99%	100%	27 Proses	259 Selesai
81	Kelurahan Jawa	18	790.173.000	18	790.173.000	100%	100%	0 Proses	18 Selesai
82	Kelurahan Pendingin	20	794.277.000	19	787.557.000	95%	99%	1 Proses	18 Selesai
83	Kelurahan Sangasanga Dalam	19	752.012.000	19	752.012.000	100%	100%	1 Proses	18 Selesai
84	Kelurahan Sangasanga Muara	21	789.069.000	18	757.467.000	86%	96%	1 Proses	17 Selesai
85	Kelurahan Sarjaya	19	787.595.000	19	787.595.000	100%	100%	0 Proses	19 Selesai
86	Kecamatan Tenggaraong	1.260	73.379.429.109	1.199	73.765.994.836	95%	101%	44 Proses	1155 Selesai
87	Kelurahan Baru	49	779.833.000	48	772.535.500	98%	99%	0 Proses	48 Selesai
88	Kelurahan Bukit Biru	25	825.944.000	25	825.944.000	100%	100%	3 Proses	22 Selesai
89	Kelurahan Jahab	27	844.640.000	27	844.640.000	100%	100%	17 Proses	10 Selesai
90	Kelurahan Loa Ipuh	24	805.750.000	24	805.750.000	100%	100%	0 Proses	24 Selesai
91	Kelurahan Loa Ipuh Darat	18	826.590.000	18	826.590.000	100%	100%	6 Proses	12 Selesai
92	Kelurahan Loa Tebu	30	819.810.000	30	819.810.000	100%	100%	10 Proses	20 Selesai
93	Kelurahan Maluhu	20	782.806.000	20	782.806.000	100%	100%	14 Proses	6 Selesai
94	Kelurahan Mangkurawang	35	788.623.000	29	788.623.000	83%	100%	0 Proses	29 Selesai
95	Kelurahan Melayu	33	799.444.000	34	792.794.000	103%	99%	1 Proses	33 Selesai
96	Kelurahan Panji	25	806.570.000	25	806.570.000	100%	100%	11 Proses	14 Selesai

NO	OPD	RUP		REALISASI		PERSENTASE		KETERANGAN	
		PAKET	PAGU	PAKET	PAGU	PAKET	PAGU	PROSES	SELESAI
97	Kelurahan Sukarame	30	831.826.000	29	708.170.650	97%	85%	15 Proses	14 Selesai
98	Kelurahan Timbau	22	639.100.000	21	634.700.000	95%	99%	14 Proses	7 Selesai
99	Dinas Kesehatan	641	306.951.907.453	423	283.769.938.585	66%	92%	104 Proses	319 Selesai
100	Puskesmas Badak Baru	46	1.224.849.799	32	960.136.338	70%	78%	4 Proses	28 Selesai
101	Puskesmas Batuah	32	608.512.264	20	356.200.800	63%	59%	18 Proses	2 Selesai
102	Puskesmas Bunga Jadi	24	881.161.969	10	491.081.600	42%	56%	2 Proses	8 Selesai
103	Puskesmas Handil Baru	23	772.772.160	19	593.056.626	83%	77%	6 Proses	13 Selesai
104	Puskesmas Jonggon Jaya	27	854.573.219	19	557.381.094	70%	65%	6 Proses	13 Selesai
105	Puskesmas Kahala	16	320.358.936	5	149.986.000	31%	47%	4 Proses	1 Selesai
106	Puskesmas Kembang Janggut	39	907.143.605	14	566.111.948	36%	62%	5 Proses	9 Selesai
107	Puskesmas Kota Bangun	8	1.649.156.989	6	1.604.956.989	75%	97%	0 Proses	6 Selesai
108	Puskesmas Loa Duri	43	1.398.394.978	24	861.340.428	56%	62%	10 Proses	14 Selesai
109	Puskesmas Loa Ipuh	49	1.203.204.631	26	806.127.731	53%	67%	14 Proses	12 Selesai
110	Puskesmas Loa Janan	13	925.173.771	13	925.173.771	100%	100%	6 Proses	7 Selesai
111	Puskesmas Loa Kulu	49	1.468.575.104	21	778.878.045	43%	53%	4 Proses	17 Selesai
112	Puskesmas Mangkurawang	46	1.788.745.110	33	1.562.985.110	72%	87%	29 Proses	4 Selesai
113	Puskesmas Marang Kayu	30	635.164.996	16	361.048.191	53%	57%	0 Proses	16 Selesai
114	Puskesmas Muara Badak	27	719.836.166	19	645.021.041	70%	90%	5 Proses	14 Selesai
115	Puskesmas Muara Jawa	29	1.403.915.686	14	862.238.682	48%	61%	6 Proses	8 Selesai
116	Puskesmas Muara Kaman	16	558.448.863	4	251.791.000	25%	45%	4 Proses	0 Selesai
117	Puskesmas Muara Muntai	33	924.469.060	8	386.491.000	24%	42%	0 Proses	8 Selesai
118	Puskesmas Muara Wis	8	254.792.572	4	224.029.453	50%	88%	3 Proses	1 Selesai
119	Puskesmas Prangat	31	690.346.231	12	162.536.959	39%	24%	9 Proses	3 Selesai
120	Puskesmas Rapak Mahang	35	1.728.414.908	27	1.264.632.908	77%	73%	0 Proses	27 Selesai
121	Puskesmas Rimba Ayu	23	679.806.949	14	381.414.800	61%	56%	2 Proses	12 Selesai
122	Puskesmas Ritan	17	372.720.678	7	113.982.000	41%	31%	5 Proses	2 Selesai
123	Puskesmas Samboja	30	1.674.948.012	18	932.329.720	60%	56%	8 Proses	10 Selesai
124	Puskesmas Sanga-Sanga	29	766.580.874	27	649.856.874	93%	85%	4 Proses	23 Selesai
125	Puskesmas Sebulu 1	19	1.921.462.815	13	1.471.125.815	68%	77%	5 Proses	8 Selesai
126	Puskesmas Sebulu 2	30	820.049.183	17	392.911.183	57%	48%	1 Proses	16 Selesai
127	Puskesmas Sei Merdeka	28	1.098.285.757	19	614.313.757	68%	56%	3 Proses	16 Selesai
128	Puskesmas Separi 3	19	1.625.824.691	12	375.840.095	63%	23%	10 Proses	2 Selesai
129	Puskesmas Sungai Meriam	50	1.510.965.602	38	1.056.079.919	76%	70%	6 Proses	32 Selesai
130	Puskesmas Tabang	17	443.902.874	6	83.632.550	35%	19%	6 Proses	0 Selesai
131	Puskesmas Teluk Dalam	16	2.041.943.888	8	1.589.064.293	50%	78%	1 Proses	7 Selesai
132	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	81	105.933.076.300	11	86.864.535.400	14%	82%	0 Proses	11 Selesai
133	RSUD Aji Muhammad Parikesit	186	633.869.150.104	105	569.819.126.025	56%	90%	18 Proses	87 Selesai
134	RSUD Dayaku Raja	116	261.112.889.943	42	188.349.298.410	36%	72%	6 Proses	36 Selesai
135	Sekretariat Daerah								
136	Bagian Administrasi Pembangunan	17	257.490.385	10	189.747.000	59%	74%	4 Proses	6 Selesai
137	Bagian Hukum	14	90.838.000	-	-	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
138	Bagian Kerja Sama	10	250.010.400	8	256.558.400	80%	103%	1 Proses	7 Selesai
139	Bagian Kesejahteraan Rakyat	71	14.065.243.651	39	13.753.562.051	55%	98%	27 Proses	12 Selesai
140	Bagian Organisasi	24	1.428.907.000	14	795.272.000	58%	56%	13 Proses	1 Selesai
141	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	22	1.497.086.000	19	879.086.000	86%	59%	14 Proses	5 Selesai
142	Bagian Perekonomian	11	178.687.000	9	144.081.000	82%	81%	6 Proses	3 Selesai
143	Bagian Perencanaan Dan Keuangan	51	1.314.024.121	35	607.560.596	69%	46%	34 Proses	1 Selesai
144	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	53	13.549.521.424	36	12.562.496.624	68%	93%	24 Proses	12 Selesai
145	Bagian Sumber Daya Alam	15	251.574.500	9	115.406.500	60%	46%	6 Proses	3 Selesai
146	Bagian Tata Pemerintah	9	495.801.400	3	479.128.000	33%	97%	3 Proses	0 Selesai
147	Bagian Umum	158	91.812.968.761	141	89.623.882.174	89%	98%	110 Proses	31 Selesai
	Jumlah	29.489	8.764.035.792.978	19.364	8.231.279.566.365	66%	94%	3766 Proses	15598 Selesai

PAKET DIKECUALIKAN

SENIN 30/12/2024

NO	OPD	RUP		REALISASI		PERSENTASE		KETERANGAN	
		PAKET	PAGU	PAKET	PAGU	PAKET	PAGU	PROSES	SELESAI
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7	783.950.812	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
4	Badan Pendapatan Daerah	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
5	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	20	95.966.560	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
6	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	42	252.462.500	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
8	Bagian Administrasi Pembangunan	9	65.987.385	3	3.417.000	33%	5%	0 Proses	3 Selesai
9	Bagian Hukum	11	34.767.800	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
10	Bagian Kerja Sama	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
11	Bagian Kesejahteraan Rakyat	1	200	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
12	Bagian Organisasi	5	14.535.000	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
13	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	3	618.000.000	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
14	Bagian Perekonomian	3	3.519.000	3	3.519.000	100%	100%	0 Proses	3 Selesai
15	Bagian Perencanaan Dan Keuangan	7	607.126.000	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
16	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	1	1.280.000	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
17	Bagian Sumber Daya Alam	4	3.196.000	3	3.043.000	75%	95%	0 Proses	3 Selesai
18	Bagian Tata Pemerintah	5	14.794.700	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
19	Bagian Umum	17	9.931.118.387	2	7.845.681.800	12%	79%	2 Proses	0 Selesai
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	35	45.355.703	13	19.021.300	37%	42%	0 Proses	13 Selesai
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
22	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
23	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
24	Dinas Kesehatan	37	166.645.301	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
25	Dinas Ketahanan Pangan	11	6.800.000	11	6.800.000	100%	100%	0 Proses	11 Selesai
26	Dinas Komunikasi dan Informatika	8	102.960.000	1	5.100.000	13%	5%	0 Proses	1 Selesai
27	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	62	245.643.505	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
28	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2	340.000	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
29	Dinas Pariwisata	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
30	Dinas Pekerjaan Umum	300	46.854.420.000	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
31	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
32	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6	91.080.048	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
33	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6	279.534.181	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
34	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
35	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2	13.600.000	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
36	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
37	Dinas Perhubungan	151	18.449.569.058	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
38	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	51	1.237.317.295	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
39	Dinas Perkebunan	1	68.020.000	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
40	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	17	414.632.677	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
41	Dinas Pertanian dan Peternakan	5	396.864.640	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
42	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
43	Dinas Sosial	2	129.944.000	2	129.944.000	100%	100%	0 Proses	2 Selesai
44	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	8	196.271.000	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
45	Inspektorat Kabupaten	14	2.397.716.300	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
46	Kecamatan Anggana	4	41.826.000	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
47	Kecamatan Kembang Janggut	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
48	Kecamatan Kenohan	1	9.487.656	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
49	Kecamatan Kota Bangun	2	422.319.665	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
50	Kecamatan Kota Bangun Darat	7	389.734.089	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
51	Kecamatan Loa Janan	5	164.640.985	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
52	Kecamatan Loa Kulu	3	189.615.200	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
53	Kecamatan Marangkayu	3	122.150.000	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
54	Kecamatan Muara Badak	35	408.693.970	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
55	Kecamatan Muara Jawa	16	538.700.420	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
56	Kecamatan Muara Kaman	12	405.399.044	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
57	Kecamatan Muara Muntai	2	383.109.824	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
58	Kecamatan Muara Wis	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
59	Kecamatan Samboja	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
60	Kecamatan Samboja Barat	5	64.362.900	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
61	Kecamatan Sanga Sanga	1	6.120.000	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
62	Kecamatan Sebulu	5	582.949.093	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
63	Kecamatan Tabang	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
64	Kecamatan Tenggara	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
65	Kecamatan Tenggara Seberang	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
66	Kelurahan Ambarawang Darat	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
67	Kelurahan Ambarawang Laut	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
68	Kelurahan Argosari	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
69	Kelurahan Baru	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
70	Kelurahan Bukit Biru	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
71	Kelurahan Bukit Merdeka	1	550.000	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
72	Kelurahan Dondang	1	1.100.000	1	1.100.000	100%	100%	0 Proses	1 Selesai
73	Kelurahan Handil Baru	1	1.000.000	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
74	Kelurahan Handil Baru Darat	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
75	Kelurahan Jahab	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
76	Kelurahan Jawa	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
77	Kelurahan Kampung Lama	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
78	Kelurahan Karya Merdeka	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
79	Kelurahan Kuala Samboja	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
80	Kelurahan Loa Ipuh	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
81	Kelurahan Loa Ipuh Darat	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
82	Kelurahan Loa Tebu	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
83	Kelurahan Maluhu	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
84	Kelurahan Mangkurawang	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
85	Kelurahan Margomulyo	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
86	Kelurahan Melayu	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
87	Kelurahan Muara Jawa Ilir	2	21.750.000	2	21.750.000	100%	100%	0 Proses	2 Selesai
88	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	1	1.300.000	1	1.300.000	100%	100%	0 Proses	1 Selesai
89	Kelurahan Muara Jawa Tengah	1	1.100.000	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
90	Kelurahan Muara Jawa Ulu	-	-	1	600.000	0	0	0 Proses	1 Selesai
91	Kelurahan Muara Kembang	1	1.300.000	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
92	Kelurahan Muara Sembilang	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai

NO	OPD	RUP		REALISASI		PERSENTASE		KETERANGAN	
		PAKET	PAGU	PAKET	PAGU	PAKET	PAGU	PROSES	SELESAI
93	Kelurahan Panji	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
94	Kelurahan Pendingin	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
95	Kelurahan Salok Api Darat	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
96	Kelurahan Salok Api Laut	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
97	Kelurahan Sangasanga Dalam	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
98	Kelurahan Sangasanga Muara	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
99	Kelurahan Sanipah	2	2.900.000	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
100	Kelurahan Sarijaya	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
101	Kelurahan Sukarame	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
102	Kelurahan Sungai Merdeka	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
103	Kelurahan Sungai Seluang	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
104	Kelurahan Tama Pole	2	5.100.000	2	5.100.000	100%	100%	0 Proses	2 Selesai
105	Kelurahan Tanjung Harapan	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
106	Kelurahan Teluk Dalam	1	2.300.000	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
107	Kelurahan Teluk Pemedas	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
108	Kelurahan Timbau	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
109	Kelurahan Wonotirto	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
110	Puskesmas Badak Baru	8	188.820.000	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
111	Puskesmas Batuah	3	40.500.000	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
112	Puskesmas Bunga Jadi	2	16.013.780	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
113	Puskesmas Handil Baru	2	12.160.000	1	5.100.000	50%	42%	0 Proses	1 Selesai
114	Puskesmas Jonggon Jaya	2	187.371.000	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
115	Puskesmas Kahala	4	22.233.600	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
116	Puskesmas Kembang Janggut	6	111.500.000	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
117	Puskesmas Kota Bangun	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
118	Puskesmas Loa Duri	2	30.976.000	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
119	Puskesmas Loa Ipuh	5	52.822.400	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
120	Puskesmas Loa Janan	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
121	Puskesmas Loa Kulu	3	131.000.000	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
122	Puskesmas Mangkurawang	2	9.700.000	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
123	Puskesmas Marang Kayu	5	232.221.756	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
124	Puskesmas Muara Badak	1	1.990.000	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
125	Puskesmas Muara Jawa	5	210.400.000	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
126	Puskesmas Muara Kaman	1	6.400.000	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
127	Puskesmas Muara Muntai	1	3.000.000	1	3.000.000	100%	100%	0 Proses	1 Selesai
128	Puskesmas Muara Wis	2	27.674.600	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
129	Puskesmas Prangat	3	39.400.000	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
130	Puskesmas Rapak Mahang	5	177.140.000	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
131	Puskesmas Rimba Ayu	1	1.700.000	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
132	Puskesmas Ritan	2	103.008.000	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
133	Puskesmas Samboja	4	155.376.292	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
134	Puskesmas Sanga-Sanga	1	3.740.000	1	3.740.000	100%	100%	0 Proses	1 Selesai
135	Puskesmas Sebulu 1	1	3.740.000	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
136	Puskesmas Sebulu 2	9	180.310.000	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
137	Puskesmas Sei Merdeka	3	80.000.000	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
138	Puskesmas Separi 3	1	4.250.000	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
139	Puskesmas Sungai Meriam	4	154.023.620	3	116.420.000	75%	76%	0 Proses	3 Selesai
140	Puskesmas Tabang	2	10.867.000	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
141	Puskesmas Teluk Dalam	1	688.000	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
142	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	15	2.577.019.700	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
143	RSUD Aji Muhammad Parikesit	18	36.509.445.760	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
144	RSUD Dayaku Raja	39	18.487.718.170	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
145	Satuan Polisi Pamong Praja	9	538.244.200	2	524.387.000	22%	97%	0 Proses	2 Selesai
146	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
	Jumlah	1.139	147.602.380.776	53	8.699.023.100	5%	6%	2 Proses	51 Selesai

PAKET E-PURCHASING

SENIN 30/12/2024

NO	OPD	RUP		REALISASI		PERSENTASE		KETERANGAN	
		PAKET	PAGU	PAKET	PAGU	PAKET	PAGU	PROSES	SELESAI
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	68	3.907.623.500	24	3.202.371.000	35%	82%	22 Proses	2 Selesai
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	49	11.273.211.900	28	8.382.329.900	57%	74%	0 Proses	28 Selesai
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	82	24.893.655.964	56	22.993.002.208	68%	92%	31 Proses	25 Selesai
4	Badan Pendapatan Daerah	86	25.229.007.385	45	24.560.242.380	52%	97%	25 Proses	20 Selesai
5	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	133	4.305.217.200	89	3.792.192.325	67%	88%	23 Proses	66 Selesai
6	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	161	41.565.999.759	78	38.642.675.002	48%	93%	56 Proses	22 Selesai
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	46	9.014.922.694	38	8.421.928.894	83%	93%	38 Proses	0 Selesai
8	Bagian Administrasi Pembangunan	6	161.401.000	4	155.808.000	67%	97%	4 Proses	0 Selesai
9	Bagian Hukum	3	56.070.200	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
10	Bagian Kerja Sama	1	36.025.000	1	36.025.000	100%	100%	1 Proses	0 Selesai
11	Bagian Kesejahteraan Rakyat	69	12.865.243.451	38	12.553.562.051	55%	98%	27 Proses	11 Selesai
12	Bagian Organisasi	19	1.414.372.000	14	795.272.000	74%	56%	13 Proses	1 Selesai
13	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	19	879.086.000	19	879.086.000	100%	100%	14 Proses	5 Selesai
14	Bagian Perekonomian	8	175.168.000	6	140.562.000	75%	80%	6 Proses	0 Selesai
15	Bagian Perencanaan Dan Keuangan	44	706.898.121	35	607.560.596	80%	86%	34 Proses	1 Selesai
16	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	52	13.548.241.424	36	12.562.496.624	69%	93%	24 Proses	12 Selesai
17	Bagian Sumber Daya Alam	11	248.378.500	6	112.363.500	55%	45%	6 Proses	0 Selesai
18	Bagian Tata Pemerintah	4	481.006.700	3	479.128.000	75%	100%	3 Proses	0 Selesai
19	Bagian Umum	111	48.891.269.454	111	48.891.269.454	100%	100%	108 Proses	3 Selesai
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	150	10.474.405.905	134	10.049.144.692	89%	96%	0 Proses	134 Selesai
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	759	469.318.323.721	669	460.060.690.433	88%	98%	244 Proses	425 Selesai
22	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	372	48.415.505.748	219	37.295.631.968	59%	77%	190 Proses	29 Selesai
23	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	15	4.902.624.602	15	4.902.624.602	100%	100%	7 Proses	8 Selesai
24	Dinas Kesehatan	399	169.228.424.652	243	151.978.384.085	61%	90%	104 Proses	139 Selesai
25	Dinas Ketahanan Pangan	106	9.355.244.220	96	9.219.939.220	91%	99%	37 Proses	59 Selesai
26	Dinas Komunikasi dan Informatika	511	182.221.553.140	435	179.138.136.892	85%	98%	333 Proses	102 Selesai
27	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	59	12.880.681.800	47	12.186.221.400	80%	95%	25 Proses	22 Selesai
28	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	266	55.069.907.523	48	52.310.058.265	18%	95%	47 Proses	1 Selesai
29	Dinas Pariwisata	114	69.060.332.100	98	57.756.622.849	86%	84%	75 Proses	23 Selesai
30	Dinas Pekerjaan Umum	695	87.660.034.051	259	76.782.935.930	37%	88%	226 Proses	33 Selesai
31	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	103	26.440.825.192	48	24.535.570.868	47%	93%	28 Proses	20 Selesai
32	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	243	91.629.059.272	212	90.867.611.872	87%	99%	134 Proses	78 Selesai
33	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	142	14.715.729.593	71	13.266.228.700	50%	90%	31 Proses	40 Selesai
34	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	126	5.435.927.647	28	3.527.477.400	22%	65%	18 Proses	10 Selesai
35	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	522	722.557.157.127	292	674.457.938.600	56%	93%	250 Proses	42 Selesai
36	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	36	7.140.184.014	25	6.127.526.014	69%	86%	13 Proses	12 Selesai
37	Dinas Perhubungan	189	140.277.857.904	170	138.214.628.005	90%	99%	60 Proses	110 Selesai
38	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	124	8.082.176.599	74	6.977.376.951	60%	86%	42 Proses	32 Selesai
39	Dinas Perkebunan	93	19.868.828.585	91	19.834.268.585	98%	100%	75 Proses	16 Selesai
40	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	89	5.103.291.464	76	5.052.047.164	85%	99%	59 Proses	17 Selesai
41	Dinas Pertanian dan Peternakan	209	91.678.128.937	160	86.075.300.587	77%	94%	123 Proses	37 Selesai
42	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	191	110.592.776.186	119	108.516.809.050	62%	98%	85 Proses	34 Selesai
43	Dinas Sosial	60	12.181.079.056	58	12.055.879.056	97%	99%	44 Proses	14 Selesai
44	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	137	19.535.263.100	93	19.336.895.800	68%	99%	45 Proses	48 Selesai
45	Inspektorat Kabupaten	121	14.410.557.950	58	12.796.892.550	48%	89%	54 Proses	4 Selesai
46	Kecamatan Anggana	95	3.269.544.726	41	2.892.381.155	43%	88%	41 Proses	0 Selesai
47	Kecamatan Kembang Janggut	104	1.875.126.425	21	848.710.300	20%	45%	20 Proses	1 Selesai
48	Kecamatan Kenohan	50	1.388.515.111	36	963.644.000	72%	69%	34 Proses	2 Selesai
49	Kecamatan Kota Bangun	64	2.122.944.632	44	1.764.054.275	69%	83%	12 Proses	32 Selesai
50	Kecamatan Kota Bangun Darat	41	2.909.336.000	34	2.754.555.000	83%	95%	6 Proses	28 Selesai
51	Kecamatan Loa Janan	76	2.776.782.375	15	2.011.657.200	20%	72%	15 Proses	0 Selesai
52	Kecamatan Loa Kulu	94	1.369.288.911	6	511.766.399	6%	37%	5 Proses	1 Selesai
53	Kecamatan Marangkayu	33	2.288.981.071	23	1.943.057.071	70%	85%	23 Proses	0 Selesai
54	Kecamatan Muara Badak	89	2.496.859.772	41	1.822.592.681	46%	73%	41 Proses	0 Selesai
55	Kecamatan Muara Jawa	114	6.957.639.606	79	6.508.062.122	69%	94%	56 Proses	23 Selesai
56	Kecamatan Muara Kaman	106	2.655.810.869	9	926.481.920	8%	35%	8 Proses	1 Selesai
57	Kecamatan Muara Muntai	46	2.305.240.617	24	1.513.316.292	52%	66%	18 Proses	6 Selesai
58	Kecamatan Muara Wis	5	355.545.000	5	355.545.000	100%	100%	0 Proses	5 Selesai
59	Kecamatan Samboja	71	8.264.202.225	44	6.842.913.900	62%	83%	14 Proses	30 Selesai
60	Kecamatan Samboja Barat	62	10.089.692.855	39	8.651.347.715	63%	86%	14 Proses	25 Selesai
61	Kecamatan Sangga Sangga	47	3.953.537.716	46	3.907.607.716	98%	99%	27 Proses	19 Selesai
62	Kecamatan Sebulu	81	1.423.348.840	13	646.754.000	16%	45%	13 Proses	0 Selesai
63	Kecamatan Tabang	40	2.059.668.671	20	1.639.035.350	50%	80%	20 Proses	0 Selesai
64	Kecamatan Tenggara	106	9.320.949.041	104	9.275.096.041	98%	100%	44 Proses	60 Selesai
65	Kecamatan Tenggara Seberang	165	13.036.720.428	96	12.760.765.148	58%	98%	80 Proses	16 Selesai
66	Kelurahan Amborawang Darat	14	79.658.000	5	46.475.000	36%	58%	5 Proses	0 Selesai
67	Kelurahan Amborawang Laut	12	86.400.000	7	77.946.300	58%	90%	0 Proses	7 Selesai
68	Kelurahan Argosari	12	160.974.000	2	52.845.000	17%	33%	2 Proses	0 Selesai
69	Kelurahan Baru	31	253.621.926	30	246.324.426	97%	97%	0 Proses	30 Selesai
70	Kelurahan Bukit Biru	10	288.414.104	10	288.414.104	100%	100%	3 Proses	7 Selesai
71	Kelurahan Bukit Merdeka	6	134.633.000	3	116.533.000	50%	87%	3 Proses	0 Selesai
72	Kelurahan Dondang	10	112.390.000	9	110.390.000	90%	98%	8 Proses	1 Selesai
73	Kelurahan Handil Baru	7	75.390.300	2	33.877.500	29%	45%	2 Proses	0 Selesai
74	Kelurahan Handil Baru Darat	7	136.353.000	3	113.272.000	43%	83%	3 Proses	0 Selesai
75	Kelurahan Jahab	18	304.085.152	18	304.085.152	100%	100%	17 Proses	1 Selesai
76	Kelurahan Jawa	9	123.913.000	9	123.913.000	100%	100%	0 Proses	9 Selesai
77	Kelurahan Kampung Lama	15	418.480.000	6	331.880.000	40%	79%	6 Proses	0 Selesai
78	Kelurahan Karya Merdeka	8	83.612.000	6	77.941.000	75%	93%	6 Proses	0 Selesai
79	Kelurahan Kuala Samboja	5	260.894.000	2	220.224.000	40%	84%	2 Proses	0 Selesai
80	Kelurahan Loa Ipuh	15	382.342.000	15	382.342.000	100%	100%	0 Proses	15 Selesai
81	Kelurahan Loa Ipuh Darat	6	193.758.416	6	193.758.416	100%	100%	6 Proses	0 Selesai
82	Kelurahan Loa Tebu	15	213.978.176	15	213.978.176	100%	100%	10 Proses	5 Selesai
83	Kelurahan Maluhu	14	553.482.749	14	553.482.749	100%	100%	14 Proses	0 Selesai
84	Kelurahan Mangkurawang	23	342.720.932	23	342.720.932	100%	100%	0 Proses	23 Selesai
85	Kelurahan Margomulyo	12	148.429.000	4	93.626.000	33%	63%	4 Proses	0 Selesai
86	Kelurahan Melayu	24	381.804.000	25	375.154.000	104%	98%	1 Proses	24 Selesai
87	Kelurahan Muara Jawa Ilir	17	74.240.000	17	74.240.000	100%	100%	7 Proses	10 Selesai
88	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	11	105.904.000	11	105.904.000	100%	100%	10 Proses	1 Selesai
89	Kelurahan Muara Jawa Tengah	9	144.980.000	7	140.700.000	78%	97%	6 Proses	1 Selesai
90	Kelurahan Muara Jawa Ulu	7	133.000.000	7	133.000.000	100%	100%	7 Proses	0 Selesai
91	Kelurahan Muara Kembang	10	118.792.700	10	118.792.700	100%	100%	1 Proses	9 Selesai
92	Kelurahan Muara Sembilang	9	105.366.811	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
93	Kelurahan Panji	13	272.410.000	13	272.410.000	100%	100%	11 Proses	2 Selesai
94	Kelurahan Pendingin	8	254.847.415	7	248.127.415	88%	97%	1 Proses	6 Selesai
95	Kelurahan Salok Api Darat	6	78.541.000	5	71.537.000	83%	91%	5 Proses	0 Selesai
96	Kelurahan Salok Api Laut	14	117.339.000	9	79.345.000	64%	68%	3 Proses	6 Selesai

NO	OPD	RUP		REALISASI		PERSENTASE		KETERANGAN	
		PAKET	PAGU	PAKET	PAGU	PAKET	PAGU	PROSES	SELESAI
97	Kelurahan Sangasanga Dalam	10	131.872.000	10	131.872.000	100%	100%	1 Proses	9 Selesai
98	Kelurahan Sangasanga Muara	8	126.013.415	5	94.411.415	63%	75%	1 Proses	4 Selesai
99	Kelurahan Sanipah	7	48.137.500	1	9.560.000	14%	20%	1 Proses	0 Selesai
100	Kelurahan Sarijaya	7	288.316.000	7	288.316.000	100%	100%	0 Proses	7 Selesai
101	Kelurahan Sukarame	18	475.409.236	17	274.158.886	94%	58%	15 Proses	2 Selesai
102	Kelurahan Sungai Merdeka	11	113.940.000	4	57.580.000	36%	51%	4 Proses	0 Selesai
103	Kelurahan Sungai Seluang	8	49.209.000	4	44.645.000	50%	91%	0 Proses	4 Selesai
104	Kelurahan Tama Pole	10	117.770.000	9	115.020.000	90%	98%	8 Proses	1 Selesai
105	Kelurahan Tanjung Harapan	14	672.863.500	6	75.834.000	43%	11%	6 Proses	0 Selesai
106	Kelurahan Teluk Dalam	15	174.620.000	15	174.620.000	100%	100%	15 Proses	0 Selesai
107	Kelurahan Teluk Pemedas	11	552.227.500	4	23.790.000	36%	4%	4 Proses	0 Selesai
108	Kelurahan Timbau	16	245.444.000	15	241.044.000	94%	98%	14 Proses	1 Selesai
109	Kelurahan Wonotirto	14	134.450.000	3	80.030.000	21%	60%	0 Proses	3 Selesai
110	Puskesmas Badak Baru	31	996.790.224	26	812.210.338	84%	81%	4 Proses	22 Selesai
111	Puskesmas Batuah	27	498.578.264	20	356.200.800	74%	71%	18 Proses	2 Selesai
112	Puskesmas Bunga Jadi	22	865.148.189	10	491.081.600	45%	57%	2 Proses	8 Selesai
113	Puskesmas Handil Baru	17	699.281.156	17	574.115.622	100%	82%	6 Proses	11 Selesai
114	Puskesmas Jonggon Jaya	21	582.084.094	19	557.381.094	90%	96%	6 Proses	13 Selesai
115	Puskesmas Kahala	7	213.821.336	5	149.986.000	71%	70%	4 Proses	1 Selesai
116	Puskesmas Kembang Janggut	26	702.005.553	13	560.221.948	50%	80%	5 Proses	8 Selesai
117	Puskesmas Kota Bangun	8	1.649.156.989	6	1.604.956.989	75%	97%	0 Proses	6 Selesai
118	Puskesmas Loa Duri	29	905.393.798	24	861.340.428	83%	95%	10 Proses	14 Selesai
119	Puskesmas Loa Ipuh	40	900.156.731	26	806.127.731	65%	90%	14 Proses	12 Selesai
120	Puskesmas Loa Janan	13	925.173.771	13	925.173.771	100%	100%	6 Proses	7 Selesai
121	Puskesmas Loa Kulu	34	1.223.860.479	19	758.222.520	56%	62%	4 Proses	15 Selesai
122	Puskesmas Mangkurawang	41	1.673.103.110	32	1.540.146.110	78%	92%	29 Proses	3 Selesai
123	Puskesmas Marang Kayu	24	399.294.448	15	357.399.399	63%	90%	0 Proses	15 Selesai
124	Puskesmas Muara Badak	24	678.336.166	18	633.261.041	75%	93%	5 Proses	13 Selesai
125	Puskesmas Muara Jawa	21	1.108.671.686	14	862.238.682	67%	78%	6 Proses	8 Selesai
126	Puskesmas Muara Kaman	14	544.698.863	4	251.791.000	29%	46%	4 Proses	0 Selesai
127	Puskesmas Muara Muntai	21	677.043.000	7	383.491.000	33%	57%	0 Proses	7 Selesai
128	Puskesmas Muara Wis	6	227.117.972	4	224.029.453	67%	99%	3 Proses	1 Selesai
129	Puskesmas Prangat	24	555.218.231	10	153.336.959	42%	28%	9 Proses	1 Selesai
130	Puskesmas Rapak Mahang	23	1.301.860.908	21	1.157.514.908	91%	89%	0 Proses	21 Selesai
131	Puskesmas Rimba Ayu	17	390.224.449	14	381.414.800	82%	98%	2 Proses	12 Selesai
132	Puskesmas Ritan	11	158.773.678	7	113.982.000	64%	72%	5 Proses	2 Selesai
133	Puskesmas Samboja	24	1.273.265.720	18	932.329.720	75%	73%	8 Proses	10 Selesai
134	Puskesmas Sanga-Sanga	25	702.910.874	23	586.186.874	92%	83%	4 Proses	19 Selesai
135	Puskesmas Sebulu 1	18	1.917.722.815	13	1.471.125.815	72%	77%	5 Proses	8 Selesai
136	Puskesmas Sebulu 2	12	340.528.923	11	340.351.923	92%	100%	1 Proses	10 Selesai
137	Puskesmas Sei Merdeka	19	622.700.364	18	607.212.364	95%	98%	3 Proses	15 Selesai
138	Puskesmas Separi 3	16	1.397.251.691	12	375.840.095	75%	27%	10 Proses	2 Selesai
139	Puskesmas Sungai Meriam	38	1.016.011.382	30	849.065.819	79%	84%	6 Proses	24 Selesai
140	Puskesmas Tabang	12	262.701.874	6	83.632.550	50%	32%	6 Proses	0 Selesai
141	Puskesmas Teluk Dalam	13	1.686.086.888	8	1.589.064.293	62%	94%	1 Proses	7 Selesai
142	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	15	28.675.535.400	7	27.242.535.400	47%	95%	0 Proses	7 Selesai
143	RSUD Aji Muhammad Parikesit	88	347.450.553.604	79	342.316.498.373	90%	99%	16 Proses	63 Selesai
144	RSUD Dayaku Raja	48	40.672.977.850	32	36.975.906.850	67%	91%	6 Proses	26 Selesai
145	Satuan Polisi Pamong Praja	47	3.173.755.349	27	3.098.528.439	57%	98%	19 Proses	8 Selesai
146	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	114	84.337.428.165	66	78.189.748.265	58%	93%	48 Proses	18 Selesai
	Jumlah	9.808	3.229.484.664.005	6.303	3.045.397.830.901	64%	94%	3762 Proses	2541 Selesai

PAKET NON TENDER

SENIN 30/12/2024

NO	OPD	RUP		REALISASI		PERSENTASE		KETERANGAN	
		PAKET	PAGU	PAKET	PAGU	PAKET	PAGU	PROSES	SELESAI
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	151.552.500	1	151.552.500	100%	100%	0 Proses	1 Selesai
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2	229.205.250	1	199.100.250	50%	87%	0 Proses	1 Selesai
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11	964.788.500	10	889.788.500	91%	92%	0 Proses	10 Selesai
4	Badan Pendapatan Daerah	26	1.055.638.000	8	763.124.000	31%	72%	0 Proses	8 Selesai
5	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	8	5.874.300	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
6	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	13	1.007.986.557	11	671.836.557	85%	67%	0 Proses	11 Selesai
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	396.880.000	4	396.880.000	100%	100%	0 Proses	4 Selesai
8	Bagian Administrasi Pembangunan	2	30.102.000	3	30.522.000	150%	101%	0 Proses	3 Selesai
9	Bagian Hukum	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
10	Bagian Kerja Sama	9	213.985.400	7	220.533.400	78%	103%	0 Proses	7 Selesai
11	Bagian Kesejahteraan Rakyat	1	1.200.000.000	1	1.200.000.000	100%	100%	0 Proses	1 Selesai
12	Bagian Organisasi	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
13	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
14	Bagian Perekonomian	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
15	Bagian Perencanaan Dan Keuangan	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
16	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
17	Bagian Sumber Daya Alam	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
18	Bagian Tata Pemerintah	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
19	Bagian Umum	20	1.612.180.920	18	1.508.530.920	90%	94%	0 Proses	18 Selesai
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	39	2.793.549.200	38	2.793.049.200	97%	100%	0 Proses	38 Selesai
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	117	9.648.121.494	98	8.842.884.284	84%	92%	0 Proses	98 Selesai
22	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	45	5.013.760.886	29	3.808.881.000	64%	76%	0 Proses	29 Selesai
23	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
24	Dinas Kesehatan	159	14.320.962.500	140	12.908.405.000	88%	90%	0 Proses	140 Selesai
25	Dinas Ketahanan Pangan	18	2.535.529.000	17	2.534.752.000	94%	100%	0 Proses	17 Selesai
26	Dinas Komunikasi dan Informatika	82	5.549.215.398	66	4.696.299.823	80%	85%	0 Proses	66 Selesai
27	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	3	198.378.000	1	42.471.000	33%	21%	0 Proses	1 Selesai
28	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	90	3.202.624.262	27	2.467.716.445	30%	77%	0 Proses	27 Selesai
29	Dinas Pariwisata	64	4.271.192.290	25	1.977.837.600	39%	46%	0 Proses	25 Selesai
30	Dinas Pekerjaan Umum	781	56.068.952.345	474	47.809.054.209	61%	85%	0 Proses	474 Selesai
31	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	102	3.156.095.737	9	945.709.139	9%	30%	0 Proses	9 Selesai
32	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	76	3.639.904.080	67	2.486.272.680	88%	68%	0 Proses	67 Selesai
33	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	1	337.460.000	0	0	0 Proses	1 Selesai
34	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	58.171.888	1	58.171.888	100%	100%	0 Proses	1 Selesai
35	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.220	69.884.385.025	939	64.279.547.166	77%	92%	0 Proses	939 Selesai
36	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4	139.270.000	3	88.870.000	75%	64%	0 Proses	3 Selesai
37	Dinas Perhubungan	207	15.062.712.687	194	14.840.526.453	94%	99%	0 Proses	194 Selesai
38	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	111	8.170.361.833	83	7.104.153.961	75%	87%	0 Proses	83 Selesai
39	Dinas Perkebunan	53	3.249.420.244	51	3.247.730.244	96%	100%	0 Proses	51 Selesai
40	Dinas Pertanian dan Penataan Ruang	28	1.468.493.700	27	1.388.413.700	96%	95%	0 Proses	27 Selesai
41	Dinas Pertanian dan Peternakan	174	10.464.670.112	141	9.941.240.564	81%	95%	0 Proses	141 Selesai
42	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.053	72.735.824.827	970	68.780.182.859	92%	95%	0 Proses	970 Selesai
43	Dinas Sosial	16	1.797.181.500	16	1.797.181.500	100%	100%	0 Proses	16 Selesai
44	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	10	631.649.000	6	560.117.000	60%	89%	0 Proses	6 Selesai
45	Inspektorat Kabupaten	15	462.912.432	1	184.646.000	7%	40%	0 Proses	1 Selesai
46	Kecamatan Anggana	689	50.279.953.885	363	49.615.870.047	53%	99%	0 Proses	363 Selesai
47	Kecamatan Kembang Janggut	99	7.966.795.000	64	7.973.795.000	65%	100%	0 Proses	64 Selesai
48	Kecamatan Kenohan	91	5.958.550.000	48	5.677.260.000	53%	95%	0 Proses	48 Selesai
49	Kecamatan Kota Bangun	198	11.644.375.000	103	11.656.375.000	52%	100%	0 Proses	103 Selesai
50	Kecamatan Kota Bangun Darat	333	20.250.360.000	169	20.250.360.000	51%	100%	0 Proses	169 Selesai
51	Kecamatan Loa Janan	663	38.675.801.982	369	38.496.846.286	56%	100%	0 Proses	369 Selesai
52	Kecamatan Loa Kulu	753	44.656.864.534	549	44.623.991.961	73%	100%	0 Proses	549 Selesai
53	Kecamatan Marangkayu	234	23.275.065.530	134	16.375.708.647	57%	70%	0 Proses	134 Selesai
54	Kecamatan Muara Badak	508	30.434.885.776	282	30.004.190.605	56%	99%	0 Proses	282 Selesai
55	Kecamatan Muara Jawa	1.124	52.880.449.243	896	48.932.945.820	80%	93%	0 Proses	896 Selesai
56	Kecamatan Muara Kaman	343	21.305.384.845	169	21.299.384.845	49%	100%	0 Proses	169 Selesai
57	Kecamatan Muara Muntai	146	9.399.372.445	122	8.756.357.139	84%	93%	0 Proses	122 Selesai
58	Kecamatan Muara Wis	159	9.608.160.000	89	9.608.160.000	56%	100%	0 Proses	89 Selesai
59	Kecamatan Samboja	1.739	94.924.580.968	1.089	94.045.159.274	63%	99%	0 Proses	1.089 Selesai
60	Kecamatan Samboja Barat	1.220	71.772.590.212	689	70.722.855.287	56%	99%	0 Proses	689 Selesai
61	Kecamatan Sanga Sanga	241	23.327.769.500	240	23.393.842.000	100%	100%	0 Proses	240 Selesai
62	Kecamatan Sebulu	328	20.769.255.391	145	20.213.338.835	44%	97%	0 Proses	145 Selesai
63	Kecamatan Tabang	102	6.590.973.336	39	4.535.326.284	38%	69%	0 Proses	39 Selesai
64	Kecamatan Tenggara	1.153	63.718.106.568	1.094	64.150.525.295	95%	101%	0 Proses	1.094 Selesai
65	Kecamatan Tenggara Seberang	904	53.482.777.310	465	53.220.959.296	51%	100%	0 Proses	465 Selesai
66	Kelurahan Amborawang Darat	38	899.538.571	28	794.820.000	74%	88%	0 Proses	28 Selesai
67	Kelurahan Amborawang Laut	33	783.260.000	21	783.260.000	64%	100%	0 Proses	21 Selesai
68	Kelurahan Argosari	21	605.510.000	18	605.510.000	86%	100%	0 Proses	18 Selesai
69	Kelurahan Baru	18	526.211.074	18	526.211.074	100%	100%	0 Proses	18 Selesai
70	Kelurahan Bukit Biru	15	537.529.896	15	537.529.896	100%	100%	0 Proses	15 Selesai
71	Kelurahan Bukit Merdeka	18	751.080.000	10	751.080.000	56%	100%	0 Proses	10 Selesai
72	Kelurahan Dondang	12	650.750.000	12	650.750.000	100%	100%	0 Proses	12 Selesai
73	Kelurahan Handil Baru	18	781.400.000	18	781.400.000	100%	100%	0 Proses	18 Selesai
74	Kelurahan Handil Baru Darat	26	674.417.500	19	656.560.000	73%	97%	0 Proses	19 Selesai
75	Kelurahan Jahab	9	540.554.848	9	540.554.848	100%	100%	0 Proses	9 Selesai
76	Kelurahan Jawa	9	666.260.000	9	666.260.000	100%	100%	0 Proses	9 Selesai
77	Kelurahan Kampung Lama	17	356.307.500	13	336.430.000	76%	94%	0 Proses	13 Selesai
78	Kelurahan Karya Merdeka	15	756.200.000	15	756.204.800	88%	100%	0 Proses	15 Selesai
79	Kelurahan Kuala Samboja	28	752.163.500	19	727.886.000	68%	97%	0 Proses	19 Selesai
80	Kelurahan Loa Ipuh	9	423.408.000	9	423.408.000	100%	100%	0 Proses	9 Selesai
81	Kelurahan Loa Ipuh Darat	12	632.831.584	12	632.831.584	100%	100%	0 Proses	12 Selesai
82	Kelurahan Loa Tebu	15	605.831.824	15	605.831.824	100%	100%	0 Proses	15 Selesai
83	Kelurahan Maluhu	6	229.323.251	6	229.323.251	100%	100%	0 Proses	6 Selesai
84	Kelurahan Mangkurawang	12	445.902.068	6	445.902.068	50%	100%	0 Proses	6 Selesai
85	Kelurahan Margomulyo	31	861.020.000	19	691.060.000	61%	80%	0 Proses	19 Selesai
86	Kelurahan Melayu	9	417.640.000	9	417.640.000	100%	100%	0 Proses	9 Selesai
87	Kelurahan Muara Jawa Ilir	15	664.390.000	10	664.390.000	67%	100%	0 Proses	10 Selesai
88	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	25	665.600.000	24	661.100.000	96%	99%	0 Proses	24 Selesai
89	Kelurahan Muara Jawa Tengah	25	670.940.000	15	659.140.000	60%	98%	0 Proses	15 Selesai
90	Kelurahan Muara Jawa Ulu	27	679.820.000	26	679.220.000	96%	100%	0 Proses	26 Selesai
91	Kelurahan Muara Kembang	22	673.390.000	11	670.750.000	50%	100%	0 Proses	11 Selesai
92	Kelurahan Muara Sembilang	35	739.386.689	20	698.732.189	57%	95%	0 Proses	20 Selesai
93	Kelurahan Panji	12	534.160.000	12	534.160.000	100%	100%	0 Proses	12 Selesai
94	Kelurahan Pendingin	12	539.429.585	12	539.429.585	100%	100%	0 Proses	12 Selesai

NO	OPD	RUP		REALISASI		PERSENTASE		KETERANGAN	
		PAKET	PAGU	PAKET	PAGU	PAKET	PAGU	PROSES	SELESAI
95	Kelurahan Salok Api Darat	28	746.669.000	20	739.600.000	71%	99%	0 Proses	20 Selesai
96	Kelurahan Salok Api Laut	24	748.300.000	16	748.300.000	67%	100%	0 Proses	16 Selesai
97	Kelurahan Sangasanga Dalam	9	620.140.000	9	620.140.000	100%	100%	0 Proses	9 Selesai
98	Kelurahan Sangasanga Muara	13	663.055.585	13	663.055.585	100%	100%	0 Proses	13 Selesai
99	Kelurahan Sanipah	27	754.150.000	15	754.150.000	56%	100%	0 Proses	15 Selesai
100	Kelurahan Sarijaya	12	499.279.000	12	499.279.000	100%	100%	0 Proses	12 Selesai
101	Kelurahan Sukarame	12	356.416.764	12	434.011.764	100%	122%	0 Proses	12 Selesai
102	Kelurahan Sungai Merdeka	25	1.229.692.878	9	790.739.905	36%	64%	0 Proses	9 Selesai
103	Kelurahan Sungai Seluang	24	770.557.500	15	752.780.000	63%	98%	0 Proses	15 Selesai
104	Kelurahan Tama Pole	17	641.140.000	17	641.140.000	100%	100%	0 Proses	17 Selesai
105	Kelurahan Tanjung Harapan	29	660.317.000	23	654.150.000	79%	99%	0 Proses	23 Selesai
106	Kelurahan Teluk Dalam	23	437.183.000	13	432.143.000	57%	99%	0 Proses	13 Selesai
107	Kelurahan Teluk Pemedas	30	735.840.000	24	735.840.000	80%	100%	0 Proses	24 Selesai
108	Kelurahan Timbau	6	393.656.000	6	393.656.000	100%	100%	0 Proses	6 Selesai
109	Kelurahan Wonotirto	23	716.977.500	13	691.000.000	57%	96%	0 Proses	13 Selesai
110	Puskesmas Badak Baru	7	39.239.575	6	147.926.000	86%	377%	0 Proses	6 Selesai
111	Puskesmas Batuah	2	69.434.000	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
112	Puskesmas Bunga Jadi	-	-	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
113	Puskesmas Handil Baru	4	61.331.004	1	13.841.004	25%	23%	0 Proses	1 Selesai
114	Puskesmas Jonggon Jaya	4	85.118.125	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
115	Puskesmas Kahala	5	84.304.000	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
116	Puskesmas Kembang Janggut	7	93.638.052	1	5.890.000	14%	6%	0 Proses	1 Selesai
117	Puskesmas Kota Bangun	-	-	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
118	Puskesmas Loa Duri	12	462.025.180	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
119	Puskesmas Loa Ipuh	4	250.225.500	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
120	Puskesmas Loa Janan	-	-	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
121	Puskesmas Loa Kulu	12	113.714.625	2	20.655.525	17%	18%	0 Proses	2 Selesai
122	Puskesmas Mangkurawang	3	105.942.000	1	22.839.000	33%	22%	0 Proses	1 Selesai
123	Puskesmas Marang Kayu	1	3.648.792	1	3.648.792	100%	100%	0 Proses	1 Selesai
124	Puskesmas Muara Badak	2	39.510.000	1	11.760.000	50%	30%	0 Proses	1 Selesai
125	Puskesmas Muara Jawa	3	84.844.000	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
126	Puskesmas Muara Kaman	1	7.350.000	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
127	Puskesmas Muara Muntai	11	244.426.060	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
128	Puskesmas Muara Wis	-	-	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
129	Puskesmas Prangat	4	95.728.000	2	9.200.000	50%	10%	0 Proses	2 Selesai
130	Puskesmas Rapak Mahang	7	249.414.000	6	107.118.000	86%	43%	0 Proses	6 Selesai
131	Puskesmas Rimba Ayu	5	287.882.500	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
132	Puskesmas Ritan	4	110.939.000	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
133	Puskesmas Samboja	2	246.306.000	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
134	Puskesmas Sanga-Sanga	3	59.930.000	3	59.930.000	100%	100%	0 Proses	3 Selesai
135	Puskesmas Sebulu 1	-	-	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
136	Puskesmas Sebulu 2	9	299.210.260	6	52.559.260	67%	18%	0 Proses	6 Selesai
137	Puskesmas Sei Merdeka	6	395.585.393	1	7.101.393	17%	2%	0 Proses	1 Selesai
138	Puskesmas Separi 3	2	224.323.000	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
139	Puskesmas Sungai Meriam	8	340.930.600	5	90.594.100	63%	27%	0 Proses	5 Selesai
140	Puskesmas Tabang	3	170.334.000	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
141	Puskesmas Teluk Dalam	2	355.169.000	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
142	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	48	12.986.771.200	1	2.000.000.000	2%	15%	0 Proses	1 Selesai
143	RSUD Aji Muhammad Parikesit	60	24.979.799.065	8	1.912.966.000	13%	8%	1 Proses	7 Selesai
144	RSUD Dayaku Raja	23	47.575.585.363	6	343.100.000	26%	1%	0 Proses	6 Selesai
145	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	0	0	0%	0%	0 Proses	0 Selesai
146	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	36	5.824.967.665	32	6.021.430.915	89%	103%	0 Proses	32 Selesai
Jumlah		16.740	1.086.298.859.468	11.336	951.554.613.825	68%	88%	1 Proses	11335 Selesai

PAKET TENDER

SENIN 30/12/2024

NO	OPD	RUP		REALISASI		PERSENTASE		KETERANGAN	
		PAKET	PAGU	PAKET	PAGU	PAKET	PAGU	PROSES	SELESAI
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	626.223.442	1	626.223.442	100%	100%	0 Proses	1 Selesai
4	Badan Pendapatan Daerah	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
5	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
6	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
8	Bagian Administrasi Pembangunan	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
9	Bagian Hukum	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
10	Bagian Kerja Sama	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
11	Bagian Kesejahteraan Rakyat	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
12	Bagian Organisasi	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
13	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
14	Bagian Perekonomian	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
15	Bagian Perencanaan Dan Keuangan	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
16	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
17	Bagian Sumber Daya Alam	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
18	Bagian Tata Pemerintah	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
19	Bagian Umum	10	31.378.400.000	10	31.378.400.000	100%	100%	0 Proses	10 Selesai
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1	470.890.800	1	470.890.800	100%	100%	0 Proses	1 Selesai
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	36	55.771.922.795	24	46.621.538.620	67%	84%	0 Proses	24 Selesai
22	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1	2.808.650.000	1	2.808.650.000	100%	100%	0 Proses	1 Selesai
23	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
24	Dinas Kesehatan	45	120.341.064.000	40	118.883.149.500	89%	99%	0 Proses	40 Selesai
25	Dinas Ketahanan Pangan	9	4.300.470.000	9	4.300.470.000	100%	100%	0 Proses	9 Selesai
26	Dinas Komunikasi dan Informatika	4	2.362.130.000	3	2.122.130.000	75%	90%	0 Proses	3 Selesai
27	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1	415.170.000	1	415.170.000	100%	100%	0 Proses	1 Selesai
28	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	8	8.211.376.000	7	8.056.480.000	88%	98%	0 Proses	7 Selesai
29	Dinas Pariwisata	7	31.030.526.000	7	31.030.526.000	100%	100%	0 Proses	7 Selesai
30	Dinas Pekerjaan Umum	921	2.689.949.671.160	867	2.655.112.512.540	94%	99%	0 Proses	867 Selesai
31	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1	1.820.503.000	2	2.760.862.000	200%	152%	0 Proses	2 Selesai
32	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	43	19.667.919.000	32	12.436.887.000	74%	63%	0 Proses	32 Selesai
33	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
34	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
35	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	316	350.156.343.400	287	335.760.182.699	91%	96%	0 Proses	287 Selesai
36	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
37	Dinas Perhubungan	25	12.917.111.216	18	12.917.111.217	72%	100%	0 Proses	18 Selesai
38	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	18	46.710.980.757	17	47.589.604.757	94%	102%	0 Proses	17 Selesai
39	Dinas Perkebunan	9	3.983.707.926	9	3.983.707.926	100%	100%	0 Proses	9 Selesai
40	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	2	1.554.860.000	2	1.554.860.000	100%	100%	0 Proses	2 Selesai
41	Dinas Pertanian dan Peternakan	43	46.066.186.860	41	43.987.341.860	95%	95%	0 Proses	41 Selesai
42	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	260	398.409.665.114	259	402.511.486.156	100%	101%	0 Proses	259 Selesai
43	Dinas Sosial	2	2.317.741.810	2	2.317.741.810	100%	100%	0 Proses	2 Selesai
44	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	3	1.648.849.000	2	1.255.249.000	67%	76%	0 Proses	2 Selesai
45	Inspektorat Kabupaten	2	20.381.060.000	2	20.381.060.000	100%	100%	0 Proses	2 Selesai
46	Kecamatan Anggana	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
47	Kecamatan Kembang Janggut	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
48	Kecamatan Kenohan	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
49	Kecamatan Kota Bangun	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
50	Kecamatan Kota Bangun Darat	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
51	Kecamatan Loa Janan	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
52	Kecamatan Loa Kulu	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
53	Kecamatan Marangkayu	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
54	Kecamatan Muara Badak	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
55	Kecamatan Muara Jawa	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
56	Kecamatan Muara Kaman	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
57	Kecamatan Muara Muntai	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
58	Kecamatan Muara Wis	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
59	Kecamatan Samboja	1	308.871.000	1	308.871.000	100%	100%	0 Proses	1 Selesai
60	Kecamatan Samboja Barat	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
61	Kecamatan Sanga Sanga	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
62	Kecamatan Sebulu	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
63	Kecamatan Tabang	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
64	Kecamatan Tenggara	1	340.373.500	1	340.373.500	100%	100%	0 Proses	1 Selesai
65	Kecamatan Tenggara Seberang	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
66	Kelurahan Amborawang Darat	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
67	Kelurahan Amborawang Laut	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
68	Kelurahan Argosari	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
69	Kelurahan Baru	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
70	Kelurahan Bukit Biru	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
71	Kelurahan Bukit Merdeka	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
72	Kelurahan Dondang	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
73	Kelurahan Handil Baru	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
74	Kelurahan Handil Baru Darat	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
75	Kelurahan Jahab	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
76	Kelurahan Jawa	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
77	Kelurahan Kampung Lama	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
78	Kelurahan Karya Merdeka	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
79	Kelurahan Kuala Samboja	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
80	Kelurahan Loa Ipuh	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
81	Kelurahan Loa Ipuh Darat	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
82	Kelurahan Loa Tebu	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
83	Kelurahan Maluhu	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
84	Kelurahan Mangkurawang	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
85	Kelurahan Margomulyo	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
86	Kelurahan Melayu	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
87	Kelurahan Muara Jawa Ilir	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
88	Kelurahan Muara Jawa Pesisir	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
89	Kelurahan Muara Jawa Tengah	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
90	Kelurahan Muara Jawa Ulu	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
91	Kelurahan Muara Kembang	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
92	Kelurahan Muara Sembilang	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai

NO	OPD	RUP		REALISASI		PERSENTASE		KETERANGAN	
		PAKET	PAGU	PAKET	PAGU	PAKET	PAGU	PROSES	SELESAI
93	Kelurahan Panji	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
94	Kelurahan Pendingin	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
95	Kelurahan Salok Api Darat	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
96	Kelurahan Salok Api Laut	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
97	Kelurahan Sangasanga Dalam	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
98	Kelurahan Sangasanga Muara	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
99	Kelurahan Sanipah	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
100	Kelurahan Sarijaya	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
101	Kelurahan Sukarame	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
102	Kelurahan Sungai Merdeka	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
103	Kelurahan Sungai Seluang	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
104	Kelurahan Tama Pole	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
105	Kelurahan Tanjung Harapan	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
106	Kelurahan Teluk Dalam	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
107	Kelurahan Teluk Pemedas	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
108	Kelurahan Timbau	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
109	Kelurahan Wonotirto	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
110	Puskesmas Badak Baru	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
111	Puskesmas Batuah	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
112	Puskesmas Bunga Jadi	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
113	Puskesmas Handil Baru	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
114	Puskesmas Jonggong Jaya	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
115	Puskesmas Kahala	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
116	Puskesmas Kembang Janggut	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
117	Puskesmas Kota Bangun	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
118	Puskesmas Loa Duri	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
119	Puskesmas Loa Ipuh	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
120	Puskesmas Loa Janan	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
121	Puskesmas Loa Kulu	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
122	Puskesmas Mangkurawang	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
123	Puskesmas Marang Kayu	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
124	Puskesmas Muara Badak	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
125	Puskesmas Muara Jawa	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
126	Puskesmas Muara Kaman	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
127	Puskesmas Muara Muntai	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
128	Puskesmas Muara Wis	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
129	Puskesmas Prangat	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
130	Puskesmas Rapak Mahang	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
131	Puskesmas Rimba Ayu	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
132	Puskesmas Ritan	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
133	Puskesmas Samboja	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
134	Puskesmas Sanga-Sanga	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
135	Puskesmas Sebulu 1	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
136	Puskesmas Sebulu 2	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
137	Puskesmas Sei Merdeka	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
138	Puskesmas Separi 3	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
139	Puskesmas Sungai Meriam	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
140	Puskesmas Tabang	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
141	Puskesmas Teluk Dalam	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
142	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	3	61.693.750.000	3	57.622.000.000	100%	93%	0 Proses	3 Selesai
143	RSUD Aji Muhammad Parikesit	21	227.824.162.675	18	225.589.661.652	86%	99%	1 Proses	17 Selesai
144	RSUD Dayaku Raja	6	154.376.608.560	4	151.030.291.560	67%	98%	0 Proses	4 Selesai
145	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	0	0	0	0	0 Proses	0 Selesai
146	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1	1.460.000.000	1	1.454.665.500	100%	100%	0 Proses	1 Selesai
	Jumlah	1.801	4.299.305.188.015	1.672	4.225.628.098.539	93%	98%	1 Proses	1671 Selesai



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN
MONITORING DAN EVALUASI
PENCAPAIAN KINERJA

#2.16.2.20.2.21.01.0000

Dinas Komunikasi dan Informatika

TRIWULAN IV
2024



REKAP CAPAIAN KELUARAN (AKUMULATIF)

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					PERMASALAHAN
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.16.2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
2.16.01.2.01 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rp.100,000,000	Rp.86,157,029	86.16%				
1	2.16.01.2.01.0001.01 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3.00	100.00%	Selesai	Tahapan Penyusunan Draft Studi Pendahuluan Renstra	100 % Progres pelaksanaan sesuai target rencana	
2.16.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Rp.100,000,000	Rp.98,423,218	98.42%				
2	2.16.01.2.01.0006.01 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	7.00	100.00%	Selesai	1.Penyusunan Laporan Monev Kegiatan Bulan November dan Desember 2024 2.Laporan LKJIP telah disusun 3.Melaksanakan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP TW IV 2024 4.Monitoring Capaian IKK LPPD TW IV Tahun 2024	100 % Progres pelaksanaan sesuai target rencana	
2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Rp.11,282,604,705	Rp.9,028,535,039	80.02%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					PERMASALAHAN
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
3	2.16.01.2.02.0001.01 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	888 Orang/Bulan	766.00	86.26%	Selesai	Pembayaran Gaji Bulan Desember	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Rp.311,292,164	Rp.285,896,600	91.84%				
4	2.16.01.2.02.0007.01 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4.00	100.00%	Selesai	Pembayaran Honor PA/KPA,PPK,Bendahara pengeluaran,BPP ,dll bulan oktober s/d desember 2024 dan Laporan keuangan bulan desember 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
2.16.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
2.16.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Rp.125,000,000	Rp.99,166,000	79.33%				
5	2.16.01.2.03.0005.01 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4.00	100.00%	Selesai	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah TA 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
2.16.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Rp.150,000,000	Rp.148,441,500	98.96%				
6	2.16.01.2.05.0009.01 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	14 Orang	14.00	100.00%	Selesai	Pelatihan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					PERMASALAHAN
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah								
2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp.100,000,000	Rp.96,649,750	96.65%				
7	2.16.01.2.06.0002.01 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp.242,119,808	Rp.233,255,564	96.34%				
8	2.16.01.2.06.0004.01 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	Pekrjaan selesai dilaksanakan dan telah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Rp.50,000,000	Rp.39,692,709	79.39%				
9	2.16.01.2.06.0005.01 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.00	100.00%	Selesai	paket telah selesai dan di manfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp.304,000,000	Rp.295,335,846	97.15%				
10	2.16.01.2.06.0009.01 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	72.00	96.00%	Selesai	paket pekerjaan selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
2.16.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Rp.204,585,654	Rp.172,350,128	84.24%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					PERMASALAHAN
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
11	2.16.01.2.06.0010.01 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	paket telah selesai dan telah dimanfaatkan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
2.16.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Rp.1,830,094,000	Rp.1,803,384,952	98.54%				
12	2.16.01.2.07.0010.01 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3.00	100.00%	Selesai	paket telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Rp.5,700,000,000	Rp.5,436,606,040	95.38%				
13	2.16.01.2.07.0011.01 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25 Unit	25.00	100.00%	Selesai	paket pekerjaan telah selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2.16.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Rp.5,100,000	Rp.5,100,000	100.00%				
14	2.16.01.2.08.0001.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	Penyediaan Surat Menyurat	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp.1,049,748,680	Rp.879,160,816	83.75%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					PERMASALAHAN
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
15	2.16.01.2.08.0002.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	pekerjaan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana, Penganggaran Kurang Terhadap Target Output
2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp.3,216,291,216	Rp.2,927,597,048	91.02%				
16	2.16.01.2.08.0004.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3.00	100.00%	Selesai	pekerjaan telah dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2.16.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Rp.131,800,000	Rp.121,215,072	91.97%				
17	2.16.01.2.09.0002.01 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	22.00	100.00%	Selesai	Paket pekerjaan telah dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Rp.1,279,172,547	Rp.1,266,257,750	98.99%				
18	2.16.01.2.09.0009.01 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.00	100.00%	Selesai	paket pekerjaan telah dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Rp.305,040,000	Rp.299,777,900	98.27%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					PERMASALAHAN
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
19	2.16.01.2.09.0011.01 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 Unit	16.00	100.00%	Selesai	paket telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

2.16.2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

2.16.02.2.01

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

2.16.02.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik		Rp.150,000,000	Rp.96,347,434	64.23%				
20	2.16.02.2.01.0001.01 Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Rancangan Peraturan Bupati tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 telah disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk selanjutnya dilakukan harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana, Salah Dalam Penyusunan Alokasi
2.16.02.2.01.0002 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik		Rp.200,000,000	Rp.177,708,400	88.85%				
21	2.16.02.2.01.0002.01 Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	2 Dokumen	2.00	100.00%	Selesai	Paket Pekerjaan Selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana, Salah Dalam Penyusunan Alokasi
2.16.02.2.01.0003 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah		Rp.1,050,000,000	Rp.900,916,321	85.80%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					PERMASALAHAN
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
22	2.16.02.2.01.0003.01 Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	2 Dokumen	2.00	100.00%	Selesai	Paket Pekerjaan Selesai Dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.02.2.01.0004 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		Rp.9,650,000,000	Rp.9,551,886,000	98.98%				
23	2.16.02.2.01.0004.01 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	3 Dokumen	3.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan kegiatan telah dilakukan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.02.2.01.0005 Pengelolaan Media Komunikasi Publik		Rp.12,930,000,000	Rp.11,888,198,905	91.94%				
24	2.16.02.2.01.0005.01 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	73 Dokumen	73.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan kegiatan sesuai target yang ditentukan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.02.2.01.0006 Pelayanan Informasi Publik		Rp.300,000,000	Rp.268,204,700	89.40%				
25	2.16.02.2.01.0006.01 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	5 Dokumen	5.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Uji Konsekuensi	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.02.2.01.0007 Layanan Hubungan Media		Rp.55,070,357,336	Rp.54,637,065,836	99.21%				
26	2.16.02.2.01.0007.01 Jumlah Layanan Hubungan Media	254 Layanan	254.00	100.00%	Selesai	kegiatan berjalan dengan semestinya	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.02.2.01.0008 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan		Rp.600,000,000	Rp.531,681,676	88.61%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					PERMASALAHAN
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
27	2.16.02.2.01.0008.01 Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	100 Dokumen	100.00	100.00%	Selesai	Sosialisai dan Vaalidasi telah dilaksanakan Bimtek dan Kompetisi KIM akan dilaksanakan tgl 9-10 Desember 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.02.2.01.0009 Manajemen Komunikasi Krisis		Rp.50,000,000	Rp.33,254,000	66.51%				
28	2.16.02.2.01.0009.01 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Paket Pekerjaan Selesai Dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.02.2.01.0010 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik		Rp.250,000,000	Rp.212,976,713	85.19%				
29	2.16.02.2.01.0010.01 Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	16 Orang	16.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Bimtek Kehumasan Pemerintah Daerah (Government Public Relations) tanggal 19 Mei 2024 s.d. 22 Mei 2024 dengan Pusadiklat Pemendagri di Yogyakarta diikuti 16 orang ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kukar	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.02.2.01.0011 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah		Rp.50,000,000	Rp.36,490,000	72.98%				
30	2.16.02.2.01.0011.01 Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Paket pekerjaan selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan,Salah Dalam Penyusunan Alokasi,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					PERMASALAHAN
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.16.02.2.01.0012 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas		Rp.300,000,000	Rp.193,009,644	64.34%				
31	2.16.02.2.01.0012.01 Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	6 Dokumen	6.00	100.00%	Selesai	1. Rapat Koordinasi Komunitas Informasi Masyarakat dengan Diskominfo Kab. Penajam Paser Utara dan KIM Kukar; 2. Sosialisasi ketentuan Komunitas Informasi Masyarakat berdasarkan Permenkominfo RI No. 4 Tahun 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA								
2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota								
2.16.03.2.01.0003 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		Rp.40,797,722,645	Rp.39,333,525,601	96.41%				
32	2.16.03.2.01.0003.01 Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	59 Unit	59.00	100.00%	Selesai	Realisasi Desember Kegiatan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.03.2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
2.16.03.2.02.0003 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah		Rp.39,437,683,158	Rp.38,028,715,835	96.43%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					PERMASALAHAN
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
33	2.16.03.2.02.0003.01 Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	3 Unit	3.00	100.00%	Selesai	1. Pelaksanaan Penyediaan Layanan dan Pengadaan Pusat Data Selesai dilaksanakan 2. Pelaksanaan Penyediaan Fasilitas Digital University Selesai Dilaksanakan 3. Pelaksanaan Platform Desa Proaktif Selesai Dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Anggaran Melebihi Kebutuhan
2.16.03.2.02.0007 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		Rp.9,686,000,000	Rp.9,336,707,770	96.39%				
34	2.16.03.2.02.0007.01 Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	1 Unit	1.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan hibah dan koordinasi pengembangan aplikasi 2024	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,SK terlambat,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana,Pelaksanaan terkendala batas kewenangan,Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan
2.16.03.2.02.0009 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas		Rp.200,000,000	Rp.136,164,718	68.08%				
35	2.16.03.2.02.0009.01 Jumlah Dokumen Program Inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	2 Dokumen	2.00	100.00%	Selesai	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.03.2.02.0010 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		Rp.18,352,946,667	Rp.17,499,139,713	95.35%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					PERMASALAHAN
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
36	2.16.03.2.02.0010.01 Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	10 Dokumen	10.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan pekerjaan pembangunan Tower Repeater telah selesai 100%, menandakan seluruh tahapan konstruksi berjalan sesuai rencana. Sementara itu, pekerjaan pembangunan Smart Pole kini memasuki tahap penting, yaitu pemasangan perangkat inti untuk mendukung fungsionalitas Smart Pole sebagai bagian dari pengembangan infrastruktur digital di wilayah ini. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan akses dan kualitas layanan telekomunikasi serta mendukung implementasi konsep Smart City yang berkelanjutan. dan akhir november 2024 seluruh pekerjaan selesai 100 persen	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.03.2.02.0011 Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)		Rp.100,000,000	Rp.94,320,938	94.32%				
37	2.16.03.2.02.0011.01 Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	6 Dokumen	6.00	100.00%	Selesai	Kegiatan telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.16.03.2.02.0012 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE		Rp.250,000,000	Rp.174,184,750	69.67%				
38	2.16.03.2.02.0012.01 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Menunggu Laporan Hasil Evaluasi Indeks SPBE 2024 dari Asesor Eksternal KemenPAN-RB	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana, SK terlambat

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					PERMASALAHAN
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	

2.20.2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

2.20.02.2.01

Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

2.20.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		Rp.1,600,000,000	Rp.1,357,465,414	84.84%				
39	2.20.02.2.01.0001.01 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	4 Dokumen	4.00	100.00%	Selesai	Seluruh paket pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.20.02.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi		Rp.150,000,000	Rp.126,502,862	84.34%				
40	2.20.02.2.01.0002.01 Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	114 Orang	122.00	107.02%	Selesai	Pelaksanaan Kegiatan Sudah Dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.20.02.2.01.0003 Membangun Metadata Statistik Sektoral		Rp.200,000,000	Rp.178,949,992	89.47%				
41	2.20.02.2.01.0003.01 Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	2 Dokumen	2.00	100.00%	Selesai	Kegiatan Pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					PERMASALAHAN
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.20.02.2.01.0004 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral		Rp.100,000,000	Rp.77,518,800	77.52%				
42	2.20.02.2.01.0004.01 Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	114 Orang	114.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Tahapan Kegiatan Selesai	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.20.02.2.01.0006 Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah		Rp.250,000,000	Rp.206,807,402	82.72%				
43	2.20.02.2.01.0006.01 Jumlah data Statistik Sektoral Daerah yang dihimpun	2 Dokumen	2.00	100.00%	Selesai	Kegiatan Pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.21.2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI								
2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota								
2.21.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Rp.150,000,000	Rp.147,234,480	98.16%				
44	2.21.02.2.01.0001.01 Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	1.00	100.00%	Selesai	Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Manajemen Keamanan Informasi sudah sampai tahap Harmonisasi di Kementerian HAM	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					PERMASALAHAN
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			
			Realisasi	%	Status	Keterangan	Progres	
2.21.02.2.01.0002 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Rp.350,000,000	Rp.336,474,410	96.14%				
45	2.21.02.2.01.0002.01 Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sudah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.21.02.2.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		Rp.200,000,000	Rp.199,366,871	99.68%				
46	2.21.02.2.01.0003.01 Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	1.00	100.00%	Selesai	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik telah selesai dilaksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana
2.21.02.2.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Rp.150,000,000	Rp.129,701,171	86.47%				
47	2.21.02.2.01.0004.01 Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	1 Perangkat Daerah	1.00	100.00%	Selesai	Laporan Penilaian Indeks Keamanan Informasi sudah selesai dikerjakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana,Salah Dalam Penyusunan Alokasi,waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana
2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaen / Kota								
2.21.02.2.02.0001 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Rp.200,000,000	Rp.196,752,917	98.38%				

NO	NOMENKELATUR	VOLUME/PAGU	REALISASI					PERMASALAHAN
			ANGGARAN/FISIK		PELAKSANAAN			
			<i>Realisasi</i>	<i>%</i>	<i>Status</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Progres</i>	
48	2.21.02.2.02.0001.01 Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	1 Perangkat Daerah	1.00	100.00%	Selesai	Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi sudah selesai di laksanakan	100 %	Progres pelaksanaan sesuai target rencana

Lembar Pengesahan

Mengetahui,
Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned over the text below.

SOLIHIN, S.Sos. MT

e-pantau.kukarkab.go.id

SIMASTON
KUTAI KARTANEGARA

Usulan
Usulan Komponen

- Usulan Baru
- Usulan Terkirim
- Rekap Komponen

DASHBOARD

Operator
Dinas Komunikasi dan Informatika

Erika Herdiyanti

Total Usulan Komponen + **Fase APBD Perubahan 2024**

Pembahasan	0	Dikembalikan	0	Perbaikan	0	Ditolak	0	Diseetujui	4
------------	---	--------------	---	-----------	---	---------	---	------------	---

Selasa Dibahas 01 Maret 2024

Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi dan Informatika

Fase: 2025 **Fase Anggaran Murni 2025**

ASB	0	HSPK	0	Aksi	...
SBU	10	SSH	0		

Pembahasan: 0, Dikembalikan: 0, Perbaikan: 0, Ditolak: 4, Diseetujui: 6

Selasa Dibahas 18 Oktober 2024

Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi dan Informatika

Fase: 2025 **Fase Anggaran Murni 2025**

ASB	1	HSPK	0	Aksi	...
SBU	36	SSH	8		

Pembahasan: 0, Dikembalikan: 0, Perbaikan: 0, Ditolak: 11, Diseetujui: 34

Selasa Dibahas 30 November 2024

Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi dan Informatika

Fase: 2025 **Fase Anggaran Murni 2025**

ASB	0	HSPK	0	Aksi	...
SBU	10	SSH	8		

Pembahasan: 0, Dikembalikan: 0, Perbaikan: 0, Ditolak: 0, Diseetujui: 18



No	OPD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0.0 %	20.0 %	3.8 %
2	Dinas Kesehatan	100.0 %	100.0 %	100.0 %
3	RSUD Aji Muhammad Parikesit	100.0 %	100.0 %	100.0 %
4	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	100.0 %	100.0 %	100.0 %
5	RSUD Dayaku Raja	100.0 %	100.0 %	100.0 %
6	Dinas Pekerjaan Umum	100.0 %	100.0 %	100.0 %
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	100.0 %	100.0 %	100.0 %
8	Satuan Polisi Pamong Praja	100.0 %	66.7 %	100.0 %
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100.0 %	20.0 %	83.3 %
10	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	100.0 %	100.0 %	100.0 %
11	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100.0 %	100.0 %	100.0 %
12	Dinas Sosial	100.0 %	100.0 %	100.0 %
13	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	100.0 %	88.9 %	100.0 %
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100.0 %	100.0 %	100.0 %
15	Dinas Ketahanan Pangan	100.0 %	100.0 %	100.0 %
16	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	100.0 %	100.0 %	100.0 %
17	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100.0 %	100.0 %	100.0 %
18	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	100.0 %	100.0 %	100.0 %
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100.0 %	100.0 %	100.0 %
20	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100.0 %	100.0 %	100.0 %
21	Dinas Perhubungan	100.0 %	100.0 %	100.0 %
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	100.0 %	100.0 %	100.0 %
23	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	100.0 %	87.5 %	93.3 %

24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	66.7 %	100.0 %	100.0 %
25	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	100.0 %	100.0 %	100.0 %
26	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100.0 %	100.0 %	100.0 %
27	Dinas Kelautan dan Perikanan	100.0 %	100.0 %	100.0 %
28	Dinas Pariwisata	50.0 %	80.0 %	82.4 %
29	Dinas Pertanian dan Peternakan	100.0 %	38.9 %	87.5 %
30	Dinas Perkebunan	100.0 %	100.0 %	100.0 %
31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0.0 %	72.7 %	61.9 %
32	Sekretariat Daerah	100.0 %	66.7 %	94.7 %
33	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	100.0 %	66.7 %	100.0 %
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	100.0 %	100.0 %	100.0 %
35	Badan Pendapatan Daerah	100.0 %	100.0 %	100.0 %
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	100.0 %	100.0 %	100.0 %
37	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	100.0 %	100.0 %	100.0 %
38	Badan Riset Dan Inovasi Daerah	50.0 %	0.0 %	0.0 %
39	Inspektorat Kabupaten	100.0 %	100.0 %	100.0 %
40	Kecamatan Tenggarong	100.0 %	100.0 %	100.0 %
41	Kecamatan Tenggarong Seberang	100.0 %	100.0 %	100.0 %
42	Kecamatan Loa Kulu	100.0 %	100.0 %	100.0 %
43	Kecamatan Loa Janan	100.0 %	100.0 %	100.0 %
44	Kecamatan Muara Badak	100.0 %	100.0 %	100.0 %
45	Kecamatan Marangkayu	100.0 %	100.0 %	100.0 %
46	Kecamatan Muara Jawa	100.0 %	100.0 %	100.0 %
47	Kecamatan Samboja	100.0 %	100.0 %	100.0 %

48	Kecamatan Sebulu	100.0 %	100.0 %	100.0 %
49	Kecamatan Muara Kaman	100.0 %	100.0 %	100.0 %
50	Kecamatan Kota Bangun	100.0 %	100.0 %	100.0 %
51	Kecamatan Muara Muntai	100.0 %	100.0 %	100.0 %
52	Kecamatan Kenohan	100.0 %	100.0 %	100.0 %
53	Kecamatan Kembang Janggut	100.0 %	100.0 %	100.0 %
54	Kecamatan Tabang	100.0 %	100.0 %	100.0 %
55	Kecamatan Muara Wis	100.0 %	100.0 %	100.0 %
56	Kecamatan Sanga Sanga	100.0 %	100.0 %	100.0 %
57	Kecamatan Anggana	100.0 %	100.0 %	100.0 %
58	Kecamatan Kota Bangun Darat	100.0 %	100.0 %	100.0 %
59	Kecamatan Samboja Barat	100.0 %	100.0 %	100.0 %



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PERIODE: 1 JANUARI 2024 - 30 DESEMBER 2024**

NILAI IKM

92.44
SANGAT BAIK

Pelayanan Komunikasi Publik
(Layanan Media dan Siaran Pers)

RESPONDEN	
JUMLAH	: 68 Orang
JENIS KELAMIN	: L= 54 Orang / P= 14 Orang
PENDIDIKAN	: TIDAK BERSEKOLAH = 0 Orang
	SD = 0 Orang
	SMP = 0 Orang
	SMA = 18 Orang
	D-I = 0 Orang
	D-II = 0 Orang
	D-III = 5 Orang
	D-IV = 1 Orang
	S1 = 38 Orang
	S2 = 6 Orang
	S3 = 0 Orang

TERIMAKASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMU AGAR TERUS
MEMPERBAIKI
DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT

Rekomendasi Kegiatan Statistik
Nomor : **V-23.6403.007**

**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PERIODE: 1 JANUARI 2024 - 30 DESEMBER 2024**

NILAI IKM

90.63
SANGAT BAIK

Pejabat Pengelola Informasi
Dokumentasi (Layanan Aduan Publik)

RESPONDEN

JUMLAH	:	24 Orang
JENIS KELAMIN	:	L= 15 Orang / P= 9 Orang
PENDIDIKAN	:	TIDAK BERSEKOLAH = 0 Orang
		SD = 0 Orang
		SMP = 0 Orang
		SMA = 4 Orang
		D-I = 0 Orang
		D-II = 0 Orang
		D-III = 2 Orang
		D-IV = 0 Orang
		S1 = 14 Orang
		S2 = 4 Orang
		S3 = 0 Orang

TERIMAKASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMU AGAR TERUS
MEMPERBAIKI
DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT

Rekomendasi Kegiatan Statistik
Nomor : **V-23.6403.007**

**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PERIODE: 1 JANUARI 2024 - 30 DESEMBER 2024**

NILAI IKM

87.65
BAIK

Pelayanan Jaringan (Aptika)

		RESPONDEN	
JUMLAH	:	130 Orang	
JENIS KELAMIN	:	L= 82 Orang / P= 48 Orang	
PENDIDIKAN	:	TIDAK BERSEKOLAH	= 0 Orang
		SD	= 0 Orang
		SMP	= 0 Orang
		SMA	= 45 Orang
		D-I	= 1 Orang
		D-II	= 1 Orang
		D-III	= 6 Orang
		D-IV	= 3 Orang
		S1	= 66 Orang
		S2	= 7 Orang
		S3	= 1 Orang

TERIMAKASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMU AGAR TERUS
MEMPERBAIKI
DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT

Rekomendasi Kegiatan Statistik
Nomor : **V-23.6403.007**

**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PERIODE: 1 JANUARI 2024 - 30 DESEMBER 2024**

NILAI IKM

87.36
BAIK

Aptika (Layanan Website dan Aplikasi)

RESPONDEN

JUMLAH	:	49 Orang
JENIS KELAMIN	:	L= 34 Orang / P= 15 Orang
PENDIDIKAN	:	TIDAK BERSEKOLAH = 0 Orang
		SD = 0 Orang
		SMP = 1 Orang
		SMA = 16 Orang
		D-I = 0 Orang
		D-II = 1 Orang
		D-III = 3 Orang
		D-IV = 1 Orang
		S1 = 23 Orang
		S2 = 4 Orang
		S3 = 0 Orang

TERIMAKASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMU AGAR TERUS
MEMPERBAIKI
DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT

Rekomendasi Kegiatan Statistik
Nomor : **V-23.6403.007**

**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PERIODE: 1 JANUARI 2024 - 30 DESEMBER 2024**

NILAI IKM

85.93
BAIK

Statistik (Layanan Pembinaan
Penyelenggaraan Statistik Sektoral)

RESPONDEN	
JUMLAH	: 76 Orang
JENIS KELAMIN	: L= 56 Orang / P= 20 Orang
PENDIDIKAN	: TIDAK BERSEKOLAH = 0 Orang
	SD = 1 Orang
	SMP = 0 Orang
	SMA = 29 Orang
	D-I = 1 Orang
	D-II = 2 Orang
	D-III = 4 Orang
	D-IV = 0 Orang
	S1 = 35 Orang
	S2 = 4 Orang
	S3 = 0 Orang

TERIMAKASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMU AGAR TERUS
MEMPERBAIKI
DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT

Rekomendasi Kegiatan Statistik
Nomor : **V-23.6403.007**

**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PERIODE: 1 JANUARI 2024 - 30 DESEMBER 2024**

NILAI IKM

85.80
BAIK

Tanda Tangan Elektronik (TTE)

RESPONDEN

JUMLAH	:	9 Orang
JENIS KELAMIN	:	L= 5 Orang / P= 4 Orang
PENDIDIKAN	:	TIDAK BERSEKOLAH = 0 Orang
		SD = 0 Orang
		SMP = 0 Orang
		SMA = 1 Orang
		D-I = 0 Orang
		D-II = 0 Orang
		D-III = 0 Orang
		D-IV = 0 Orang
		S1 = 6 Orang
		S2 = 2 Orang
		S3 = 0 Orang

TERIMAKASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMU AGAR TERUS
MEMPERBAIKI
DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT

Rekomendasi Kegiatan Statistik
Nomor : **V-23.6403.007**

**SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PERIODE: 1 JANUARI 2024 - 30 DESEMBER 2024**

No	Layanan	Indeks	Mutu
1	Pelayanan Komunikasi Publik (Layanan Media dan Siaran Pers)	92.44	Sangat Baik
2	Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (Layanan Aduan Publik)	90.63	Sangat Baik
3	Pelayanan Jaringan (Aptika)	87.65	Baik
4	Aptika (Layanan Website dan Aplikasi)	87.36	Baik
5	Statistik (Layanan Pembinaan Penyelenggaraan Statistik Sektoral)	85.93	Baik
6	Tanda Tangan Elektronik (TTE)	85.80	Baik



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Pahlawan No. 1 Bukit Biru ☎ (0541) 661350, Fax. (0541) 661834 Kode Pos 75511
Website : diskominfo.kukarkab.go.id Email : diskominfo@mail.kukarkab.go.id

TENGGARONG

Tenggarong, 24 Juni 2024

Kepada
Yth. Bupati Kutai Kartanegara
di -

Tenggarong

SURAT PENGANTAR

Nomor : B-145/Sekr/000/06/2024

NO	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Laporan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi 2024	1 (Satu) Berkas	Dikirim dengan hormat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

 Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KETATALAKSANAAN
DAN KEPEGAWALAN
MAULIDA SAVITRI SP
Penata Tk.I (III d)

Yang Menerima

Nama

Dayang Siti Rahliya

NIP

19891013 200212 2 002

Tanda Tangan

Tanggal

24 Juni 2024

**Realisasi Kinerja dan Keuangan
TAHUN ANGGARAN 2024**

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika
 Urusan : Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			LOKASI	PAGU INDIKATIF	Capaian Kinerja dan Keuangan			
		PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)					K	%	Rp	%
		Tolak Ukur/Indikator	Target	Satuan						
	Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks SPBE	3,20	Nilai	Kabupaten Kutai Kartanegara		3,09	96,56		
	Meningkatnya Kualitas Domain Tata Kelola SPBE	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	3,06	Nilai	Kabupaten Kutai Kartanegara		2,20	71,90		
	Meningkatnya Kualitas Domain Layanan SPBE	Indeks Domain Layanan SPBE	3,35	Nilai	Kabupaten Kutai Kartanegara		3,88	115,82		
	Meningkatnya Kualitas Domain Manajemen SPBE	Indeks Domain Manajemen SPBE	3,15	Nilai	Kabupaten Kutai Kartanegara		1,82	57,78		
	Meningkatnya Kualitas Domain Kebijakan Internal SPBE	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	3,03	Nilai	Kabupaten Kutai Kartanegara		3,60	118,81		
2.16.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86	Nilai		26.486.848.774	68,17	79,27	23.323.002.961	88,06
2.16.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16	Dokumen		200.000.000	16	100,00	184.580.247	92,29
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	Tenggarong	100.000.000	3	100,00	86.157.029	86,16
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7	Laporan	Tenggarong	100.000.000	7	100,00	98.423.218	98,42
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	2	Laporan		11.593.896.869	2	100,00	9.314.431.639	80,34

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			LOKASI	PAGU INDIKATIF	Capaian Kinerja dan Keuangan			
		PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)					K	%	Rp	%
		Tolak Ukur/Indikator	Target	Satuan						
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	888	Orang/Bulan	Tenggarong	11.282.604.705	766	86,26	9.028.535.039	80,02
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	Laporan	Kab. Kutai Kartanegara	311.292.164	4	100,00	285.896.600	91,84
2.16.1.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	4	Laporan		125.000.000	4	100,00	99.166.000	79,33
2.16.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Laporan	Kab. Kutai Kartanegara	125.000.000	4	100,00	99.166.000	79,33
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen		150.000.000	1	100,00	148.441.500	98,96
2.16.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	14	Orang	Kab. Kutai Kartanegara	150.000.000	14	100,00	148.441.500	98,96
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum Perangkat Daerah	5	Layanan		900.705.462	5	100,00	837.283.997	92,96
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	Tenggarong	100.000.000	1	100,00	96.649.750	96,65
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	Tenggarong	242.119.808	1	100,00	233.255.564	96,34
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	Tenggarong	50.000.000	1	100,00	39.692.709	79,39
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74	Laporan	Jakarta Semua Kecamatan	304.000.000	72	97,30	295.335.846	97,15
2.16.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	Tenggarong	204.585.654	1	100,00	172.350.128	84,24

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			LOKASI	PAGU INDIKATIF	Capaian Kinerja dan Keuangan			
		PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)					K	%	Rp	%
		Tolak Ukur/Indikator	Target	Satuan						
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	Persen		7.530.094.000	100	100,00	7.239.990.992	96,15
2.16.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	Unit	Tenggarong	1.830.094.000	3	100,00	1.803.384.952	98,54
2.16.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25	Unit	Tenggarong	5.700.000.000	25	100,00	5.436.606.040	95,38
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	Bulan		4.271.139.896	12	100,00	3.811.857.864	89,25
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	Tenggarong	5.100.000	1	100,00	5.100.000	100,00
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	Tenggarong	1.049.748.680	1	100,00	879.160.816	83,75
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	Laporan	Tenggarong	3.216.291.216	3	100,00	2.927.597.048	91,02
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	100	Unit		1.716.012.547	100	100,00	1.687.250.722	98,32
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22	Unit	Tenggarong	131.800.000	22	100,00	121.215.072	91,97
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	Tenggarong	1.279.172.547	1	100,00	1.266.257.750	98,99
2.16.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16	Unit	Tenggarong	305.040.000	16	100,00	299.777.900	98,27

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			LOKASI	PAGU INDIKATIF	Capaian Kinerja dan Keuangan			
		PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)					K	%	Rp	%
		Tolak Ukur/Indikator	Target	Satuan						
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik	100	Persen		80.600.357.336	100	100,00	78.527.739.629	97,43
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola	840	Informasi dan Komunikasi Publik		80.600.357.336	840	100,00	78.527.739.629	97,43
2.16.02.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1	Dokumen	Tenggarong	150.000.000	1	100,00	96.347.434	64,23
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	2	Dokumen	Tenggarong	200.000.000	2	100,00	177.708.400	88,85
2.16.02.2.01.03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	2	Dokumen	Tenggarong	1.050.000.000	2	100,00	900.916.321	85,80
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	3	Dokumen	Tenggarong Samarinda	9.650.000.000	3	100,00	9.551.886.000	98,98
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	73	Dokumen	Tenggarong	12.930.000.000	73	100,00	11.888.198.905	91,94
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	5	Dokumen	Semua Kecamatan	300.000.000	5	100,00	268.204.700	89,40
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	254	Layanan	Tenggarong Samarinda	55.070.357.336	254	100,00	54.637.065.836	99,21
2.16.02.2.01.08	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	100	Dokumen	Tenggarong Ma Badak Kota Bangun	600.000.000	100	100,00	531.681.676	88,61
2.16.02.2.01.09	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	1	Dokumen	Tenggarong	50.000.000	1	100,00	33.254.000	66,51
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	16	Orang	Tenggarong	250.000.000	16	100,00	212.976.713	85,19

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			LOKASI	PAGU INDIKATIF	Capaian Kinerja dan Keuangan			
		PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)					K	%	Rp	%
		Tolak Ukur/Indikator	Target	Satuan						
2.16.02.2.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1	Dokumen	Tenggarong	50.000.000	1	100,00	36.490.000	72,98
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	6	Dokumen	Tenggarong Ma. Badak Ma. Kaman	300.000.000	6	100,00	193.009.644	64,34
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan Aplikasi yang dikelola OPD	100	Persen		108.824.352.470	100	100,00	104.602.759.325	96,12
2.16.3.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mengelola e-government	58	OPD		68.026.629.825	56	96,55	65.269.233.724	95,95
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	3	Unit	Tenggarong	39.437.683.158	3	100,00	38.028.715.835	96,43
2.16.03.2.02.7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	1	Unit	Ka. Kutai Kartanegara	9.686.000.000	1	100,00	9.336.707.770	96,39
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	2	Dokumen	Jakarta Tenggarong	200.000.000	2	100,00	136.164.718	68,08
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	10	Dokumen	Desa Jembayan Desa Menamang Kiri Desa Muara Enggelam	18.352.946.667	10	100,00	17.499.139.713	95,35
2.16.03.2.02.11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	6	Dokumen	Yogyakarta	100.000.000	6	100,00	94.320.938	94,32
2.16.03.2.02.12	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1	Dokumen	Samarinda Tenggarong	250.000.000	1	100,00	174.184.750	69,67
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Sistem Informasi yang dikelola	100	Sistem Informasi		40.797.722.645	100	100,00	39.333.525.601	96,41

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			LOKASI	PAGU INDIKATIF	Capaian Kinerja dan Keuangan			
		PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)					K	%	Rp	%
		Tolak Ukur/Indikator	Target	Satuan						
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	59	Unit	Seluruh Kecamatan	40.797.722.645	59	100,00	39.333.525.601	96,41
2.20.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan OPD yang menyelenggarakan Satu Data Indonesia	100	Persen		2.300.000.000	100	100,00	1.947.244.470	84,66
2.20.2.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang menyelenggarakan Satu Data Indonesia	58	OPD		2.300.000.000	58	100,00	1.947.244.470	84,66
2.20.02.2.01.01	Koordinasi & Sinkronisasi Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	4	Dokumen	18 Kecamatan	1.600.000.000	4	100,00	1.357.465.414	84,84
2.20.02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	114	Orang	Yogyakarta Samarinda	150.000.000	122	107,02	126.502.862	84,34
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	2	Dokumen	Tenggarong	200.000.000	2	100,00	178.949.992	89,47
2.20.02.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	114	Orang	18 Kecamatan	100.000.000	114	100,00	77.518.800	77,52
2.20.02.2.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah data Statistik Sektoral Daerah yang dihimpun	2	Dokumen	Tenggarong	250.000.000	2	100,00	206.807.402	82,72
2.21.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Cakupan OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk Pengamanan Informasi	56,89	Persen		1.050.000.000	56,89	100,00	1.009.529.849	96,15
2.21.2.2.01	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah	11	OPD		850.000.000	11	100,00	812.776.932	95,62

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			LOKASI	PAGU INDIKATIF	Capaian Kinerja dan Keuangan			
		PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)					K	%	Rp	%
		Tolak Ukur/Indikator	Target	Satuan						
2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1	Dokumen	Kab. Kutai Kartanegara	150.000.000	1	100,00	147.234.480	98,16
2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	Laporan	Yogyakarta	350.000.000	1	100,00	336.474.410	96,14
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1	Laporan	Semua Kecamatan	200.000.000	1	100,00	199.366.871	99,68
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	1	Perangkat Daerah	Tenggarong	150.000.000	1	100,00	129.701.171	86,47
2.21.2.02.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaen / Kota	Jumlah Layanan JKS Pemerintah Daerah	1	Layanan JKS	Tenggarong	200.000.000	1	100,00	196.752.917	98,38
2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	1	Perangkat Daerah	Tenggarong	200.000.000	1	100,00	196.752.917	98,38
JUMLAH						219.261.558.580		99,63	209.410.276.234	95,51

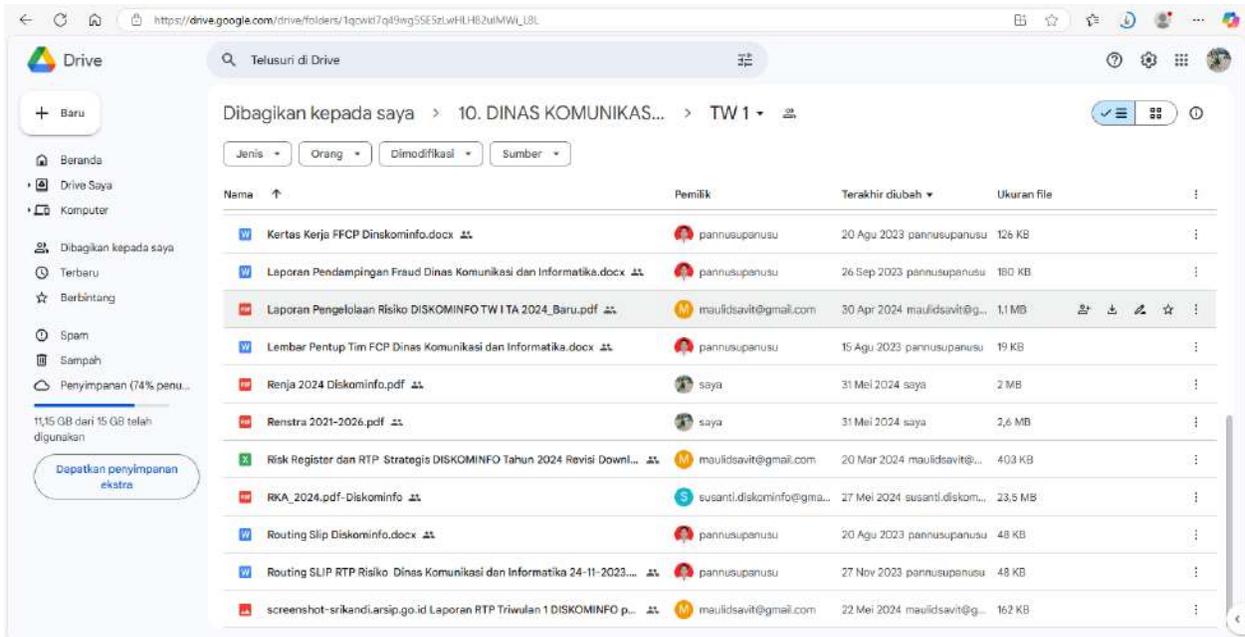
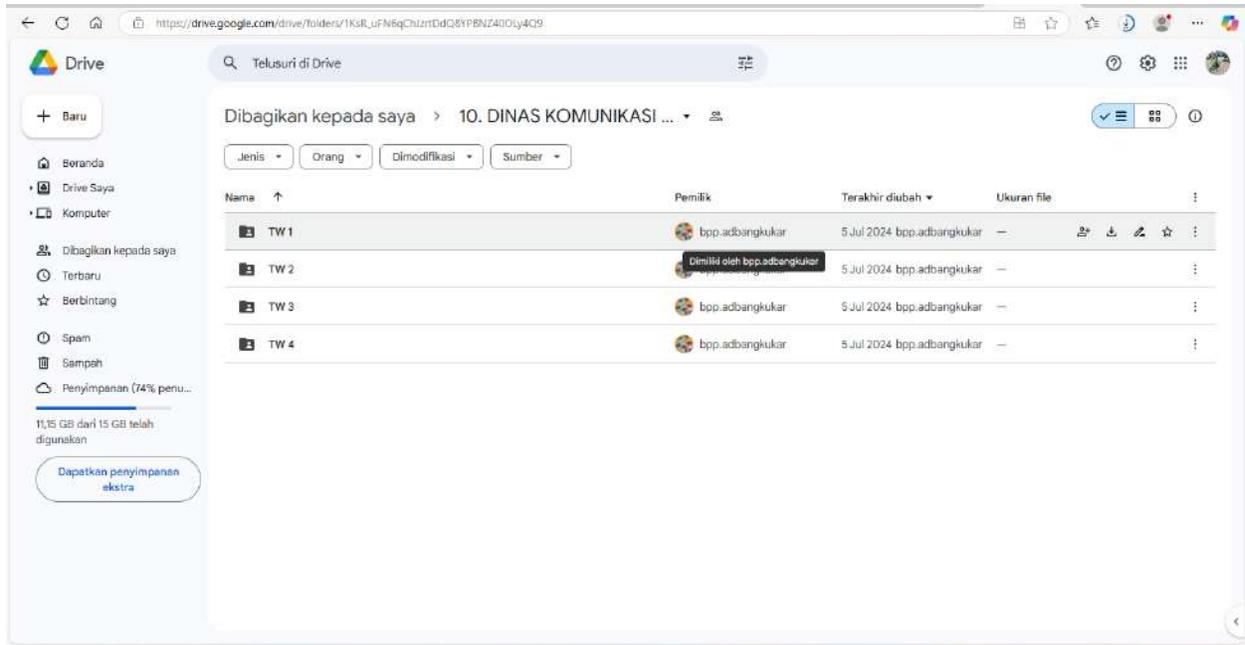
Realisasi Tahun 2024	
Fisik	99,63%
Keuangan	95,51%

Tenggarong, 31 Desember 2024
 Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

SOLIHIN, S.Sos., MT
 NIP.197210291991021001

Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko Per Triwulan

<https://bit.ly/PantauPengelolaanRisiko>





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jalan Panji Nomor 46 Kelurahan Panji Tenggara

Website : <http://diarpus.kukarkab.go.id> E-mail : diarpuskukar@gmail.com Kode Pos 75514

PENGUMUMAN

Nomor : B-2/P3A.DIARPUS/000.5.15.1/12/2024

TENTANG

HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL TAHUN 2024

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286) dan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menindaklanjuti dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 38/SK-SEKDA/HK/2024 tentang Tim Pengawas Kearsipan Internal untuk menyelenggarakan pengawasan kearsipan terhadap 59 (Lima Puluh Sembilan) Perangkat Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Lembaga Kearsipan Daerah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan pada Pasal 25 yang mengatur nilai dan kategori hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh Objek Pengawasan terdiri dari :

- a. > 90 - 100 (lebih dari sembilan puluh sampai dengan seratus) dengan kategori AA (sangat memuaskan);
- b. > 80 - 90 (lebih dari delapan puluh sampai dengan sembilan puluh) dengan kategori A (memuaskan);
- c. > 70 - 80 (lebih dari tujuh puluh sampai dengan delapan puluh) dengan kategori BB (sangat baik);
- d. > 60 - 70 (lebih dari enam puluh sampai dengan tujuh puluh) dengan kategori B (baik);
- e. > 50 - 60 (lebih dari lima puluh sampai dengan enam puluh) dengan kategori CC (cukup);
- f. > 30 - 50 (lebih dari tiga puluh sampai dengan lima puluh) dengan kategori C (kurang); dan
- g. > 0 - 30 (nol sampai dengan tiga puluh) dengan kategori D (sangat kurang).

Selanjutnya...

Selanjutnya berdasarkan hasil pengawasan kearsipan internal yang telah dilaksanakan pada 59 (Lima Puluh Sembilan) Perangkat Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara dan telah disampaikan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur sebagai Lembaga Kearsipan Provinsi dengan surat Nomor : P-388/P3A.DIARPUS/000.5.15/10/2024, tanggal 08 Oktober 2024 dengan nilai dan kategori sebagaimana terlampir dalam pengumuman ini.

Ditetapkan di : Tenggarong

Pada Tanggal : 16 Desember 2024



Lampiran : HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL TAHUN 2024

Nomor : B-2/P3A.DIARPUS/000.5.15.1/12/2024

Tanggal : 16 Desember 2024

No.	Nama Perangkat Daerah	Nilai Audit Kearsipan Internal	Kategori
1.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	89,54	Memuaskan
2.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	88,23	Memuaskan
3.	Dinas Perhubungan	85,43	Memuaskan
4.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	85,31	Memuaskan
5.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	84,90	Memuaskan
6.	RSUD Aji Muhammad Parikesit	84,58	Memuaskan
7.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	83,97	Memuaskan
8.	Kantor Kecamatan Muara Badak	83,93	Memuaskan
9.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	83,87	Memuaskan
10.	Dinas Sosial	83,83	Memuaskan
11.	Dinas Komunikasi dan Informatika	83,39	Memuaskan
12.	Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah	83,36	Memuaskan
13.	Inspektorat	82,61	Memuaskan
14.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	82,34	Memuaskan
15.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	81,18	Memuaskan
16.	Kantor Kecamatan Tenggarong	80,84	Memuaskan
17.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	80,10	Memuaskan
18.	Dinas Koperasi	79,29	Sangat Baik
19.	Kantor Kecamatan Marangkayu	78,89	Sangat Baik
20.	Badan Riset dan Inovasi Daerah	78,29	Sangat Baik
21.	Kantor Kecamatan Muara Wis	78,47	Sangat Baik
22.	Sekretariat Daerah	77,71	Sangat Baik

23.	Dinas Pariwisata	77,40	Sangat Baik
24.	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti (Samboja)	77,28	Sangat Baik
25.	Dinas Perkebunan	76,50	Sangat Baik
26.	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	76,36	Sangat Baik
27.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	76,31	Sangat Baik
28.	Kantor Kecamatan Loa Kulu	75,95	Sangat Baik
29.	Dinas Kesehatan	75,88	Sangat Baik
30.	RSUD Dayaku Raja Kota Bangun	75,47	Sangat Baik
31.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	75,38	Sangat Baik
32.	Dinas Pertanian dan Peternakan	74,83	Sangat Baik
33.	Kantor Kecamatan Anggana	74,74	Sangat Baik
34.	Satuan Polisi Pamong Praja	74,46	Sangat Baik
35.	Dinas Pendapatan Daerah	74,14	Sangat Baik
36.	Kantor Kecamatan Sangasanga	73,46	Sangat Baik
37.	Kantor Kecamatan Kota Bangun	73,21	Sangat Baik
38.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	73,08	Sangat Baik
39.	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	73,06	Sangat Baik
40.	Kantor Kecamatan Sebulu	72,98	Sangat Baik
41.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	72,77	Sangat Baik
42.	Kantor Kecamatan Muara Muntai	72,61	Sangat Baik
43.	Dinas Kelautan dan Perikanan	72,20	Sangat Baik
44.	Kantor Kecamatan Muara Jawa	72,01	Sangat Baik
45.	Kantor Kecamatan Tenggarong Seberang	71,91	Sangat Baik
46.	Kantor Kecamatan Samboja	71,88	Sangat Baik
47.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	71,53	Sangat Baik
48.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	71,39	Sangat Baik
49.	Dinas Pekerjaan Umum	70,62	Sangat Baik

50.	Kantor Kecamatan Loa Janan	69,84	Baik
51.	Dinas Ketahanan Pangan	66,41	Baik
52.	Kantor Kecamatan Kembang Janggut	66,27	Baik
53.	Kantor Kecamatan Muara Kaman	64,03	Baik
54.	Kantor Kecamatan Kenohan	61,52	Baik
55.	Kantor Kecamatan Tabang	60,34	Baik
56.	Kantor Kecamatan Kota Bangun Darat	43,64	Kurang
57.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	41,04	Kurang
58.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	22,89	Sangat Kurang
59.	Kantor Kecamatan Samboja Barat	13,44	Sangat Kurang

Ditetapkan di : Tenggarong

Pada Tanggal : 16 Desember 2024





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. P. Diponegoro No.34 Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong Kalimantan Timur 75514
Telpon (0541) 661036 Faksimile (0541) 661787

Laman inspektorat.kukarkab.go.id, Pos-el Inspektorat@kukarkab.go.id

TANDA TERIMA PENYERAHAN LHP

Nomor SPT : B - 399/ITDA/IP.II/094/06/2024
Tanggal SPT : 04-Jun-24
Nomor LHP : B - 353/ITDA/IP.II/700.1/11/2024
Tanggal LHP : 18 Nopember 2024.
Uraian Pemeriksaan : Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

Ketua Tim Pemeriksa : Indah Hayati,S,Sut
Entitas Pemeriksaan : Diskominfo
Tahun Pemeriksaan : 2024

Jumlah Halaman : 10 Halaman Lengkap Tidak Lengkap
Lampiran : Ada Tidak Ada
Dokumen Tindak Lanjut : Ada Tidak Ada
Kodetifikasi temuan dan saran : Sesuai Belum Sesuai

Catatan :

Tanggal Penyerahan LHP : 25. Nopember 2024

Yang menyerahkan
Ami
Laila Dwi Arina

Yang Menerima
[Signature]
Amu.S.Sos
NIP, 197110122007011023

No. Arsip LHP : LTB. SAKIP. 24.900.1 - 43 / LHP. 353
LHP disampaikan : 1 _____
2 _____
3 _____



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Diponegoro No. 34 Telp. (0541) 661036 Fex 661787 Tenggarong Kode Pos 75514

Email : inspektorat@kukarkab.go.id Website : inspektorat.kukarkab.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2024

NOMOR : B-353/ITDA/IP.II/700.1/11/2024

TANGGAL : 18 November 2024

IKHTISAR EKSEKUTIF

Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah dan khususnya untuk memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP, dan memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 diperoleh nilai **68,17** dengan kategori **B (Baik)**. Kategori "**Baik**" menginterpretasikan bahwa terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Pelaksanaan Evaluasi

Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

B. Tujuan Evaluasi

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bertujuan untuk:

1. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

C. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek. Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja, dimana dalam penerapannya mencakup:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

D. Metode dan Teknik Evaluasi AKIP

1. Metodologi Evaluasi AKIP

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Pengumpulan bukti/dokumen pendukung implementasi AKIP adalah pengumpulan informasi yang digunakan oleh tim evaluasi dalam menentukan kesesuaian hal pokok dengan kriteria evaluasi. Prosedur pengumpulan bukti dapat dilakukan melalui inspeksi, wawancara/pemintaan keterangan, perhitungan kembali, prosedur analitis, dan konfirmasi/klarifikasi serta prosedur lain yang dibutuhkan.

2. Teknik Evaluasi AKIP

Teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP antara lain sebagai berikut:

- a. *Checklist* Pengumpulan Data dan Informasi, yaitu teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh instansi pemerintah/unit kerja

secara mandiri. *Cheklis* kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen, data, dan/informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, sehingga pihak penyedia informasi dan data (responden) dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

- b. Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana, yaitu pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi. Jawaban yang diterima dari penyedia data dan informasi dicatat secara langsung. Komunikasi dapat dilakukan dengan wawancara secara langsung, maupun melalui media telekomunikasi yang tersedia, seperti telepon, chat, ataupun *digital meeting*.
- c. Studi Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dan informasi yang tidak secara langsung ditujukan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika, melainkan melalui sumber literasi lain seperti peraturan perundangan dan media informasi baik cetak maupun elektronik/digital.

E. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi Internal; dan (5) Capaian Kinerja.

Dalam Implementasi Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika telah melaksanakan perencanaan kinerja sesuai dengan Visi Bupati Kutai Kartanegara, yaitu mewujudkan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang sejahtera dan Bahagia dengan menjalankan misi ke-1, yaitu Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani; misi ke-2, yaitu Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya; misi Ke-3, yaitu

Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; misi ke-4, yaitu Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah; dan misi ke-5, yaitu Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan. Visi dan Misi tersebut dijabarkan dalam dokumen rencana strategis tahun 2021-2026, dan setiap tahunnya dituangkan dalam rencana kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja).

F. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

1. Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja tepat waktu pada website Dinas Komunikasi dan Informatika atau Media yang ditunjuk untuk publikasi oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

Hasil evaluasi implementasi SAKIP Tahun 2022 pada prinsipnya perangkat daerah telah melakukan upaya perbaikan. Namun capaian hasil evaluasi SAKIP tahun 2023 terjadi penurunan nilai, hal tersebut disebabkan adanya penyesuaian penilaian dalam mengimplementasikan sesuai pedoman Permenpan 88 Tahun 2021. Hal signifikan yang mempengaruhi diantaranya adalah pemenuhan kriteria nilai penilaian sebagai berikut:

1. AA (bobot nilai 100), jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.
2. A (bobot nilai 90), jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.
3. BB (bobot nilai 80), jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan.

BAB II GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Kondisi dan Catatan Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi implementasi SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 memperoleh nilai **68,17** dengan kategori **B** dan dapat diinterpretasikan **Baik**, yang telah menggambarkan bahwa terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja. Nilai angka hasil evaluasi implementasi SAKIP Tahun 2023 dan Tahun 2024 per komponen secara ringkas, sebagai berikut:

No	Komponen	Tahun 2023		Tahun 2024	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	26,10	30	21,34
2	Pengukuran Kinerja	30	30,00	30	20,20
3	Pelaporan Kinerja	15	14,10	15	8,30
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	23,75	25	18,33
Total		100	93,95	100	68,17
Kategori			AA		B
Interpretasi			Sangat Memuaskan		Baik

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Dari segi perencanaan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Perencanaan kinerja yang telah disusun sudah mencakup kinerja utama yang harus diawasi dan secara umum berfokus pada hasil akhir (outcome). Namun, terdapat beberapa indikator kinerja yang tidak sepenuhnya sesuai dengan tingkat jabatan yang seharusnya bertanggung jawab atasnya.
- Pohon kinerja yang disusun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja. Hal ini

mengakibatkan kualitas penjenjangan kinerja belum memenuhi prinsip logis (sebab-akibat). Selain itu, pohon kinerja tersebut cenderung hanya menjabarkan kinerja berdasarkan program atau kegiatan yang sudah ada, sehingga belum mampu menyajikan alternatif solusi untuk mencapai kinerja utama Perangkat Daerah.

2. Pengukuran Kinerja

Dari segi pengukuran kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Dokumen IKU belum memuat definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja
- Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang ada belum menggambarkan penggunaan aplikasi E-Pantau didalamnya sebagai media monitoring capaian output per bulan.

3. Pelaporan Kinerja

Dari segi pelaporan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Dokumen laporan kinerja belum menyajikan seluruh informasi tentang pencapaian kinerja yang terdapat pada perjanjian kinerja
- Belum ada dokumen laporan hasil reviu oleh Inspektorat Daerah/Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah/pejabat yang berwenang/tim internal perangkat daerah atas capaian Kinerja yang dinyatakan pada dokumen laporan kinerja
- Informasi dalam laporan kinerja belum digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya, dikarenakan terdapat penetapan target kinerja pada salah satu indikator kinerja utama pada tahun berjalan yang sangat tinggi dibandingkan dengan realisasi target kinerja tahun sebelumnya.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari segi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilaksanakan belum didukung dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

B. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melakukan reviu seluruh dokumen perencanaan PD. Hasil reviu agar digunakan untuk perbaikan kualitas perencanaan dengan memastikan dokumen perencanaan telah mengawal kinerja sesuai dengan tingkat jabatan yang seharusnya diampu dan telah berorientasi outcome.
2. Menyusun pohon kinerja/logical framework sesuai kaidah yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjurangan Kinerja. Pohon kinerja diharapkan dapat menjabarkan kinerja yang memenuhi unsur logis (sebab-akibat) serta menyajikan alternatif kinerja yang beragam dan efektif dalam mendorong tercapainya kinerja utama. Pohon kinerja yang disusun agar dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan cascading kinerja dan dokumen perencanaan.
3. Menyusun standar Operasional Prosedur (SOP) tentang EValuasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilengkapi dengan mekanisme monitoring yang efektif dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi perbaikan atas hasil evaluasi SAKIP
4. Melakukan identifikasi crosscutting kinerja sebagai bentuk sharing outcome sebagai upaya untuk mencapai suatu kinerja. Melakukan reviu terhadap dokumen IKU dan memastikan bahwa dokumen IKU telah memuat definisi operasional dan rumus perhitungan yang sesuai dan relevan dengan substansi indikator kerjanya.
5. Melakukan reviu terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang ada dengan menyesuaikan kondisi aktual.
6. Melakukan sinkronisasi data terhadap capaian output, capaian indikator program/kegiatan dan capaian indikator sasaran strategis dalam melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja.
7. Mengoptimalkan pemanfaatan laporan kinerja dalam perencanaan kinerja ke depan sehingga target yang ditetapkan lebih realistis.

8. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja agar dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan perencanaan kinerja dan peningkatan capaian kinerja.
9. Melengkapi dokumen data kinerja yang menjadi pembahasan dalam pelaksanaan evaluasi atau data yang disajikan sesuai dengan keperluan pengukuran kinerja yang diharapkan

BAB III PENUTUP

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 diperoleh nilai **68,17** dengan kategori **B (Baik)**. Kategori "**Baik**" menginterpretasikan bahwa terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.

Demikian hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada implementasi SAKIP Tahun 2024 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara kami sampaikan. Kami mengapresiasi saudara beserta seluruh jajaran atas dedikasi dan upaya yang maksimal dalam menerapkan manajemen kinerja di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,



H. Heriansyah, S.E., M.Si., CGCAE., CPSp.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19790801 200112 1 001

DATA SP4N-LAPOR 2024

Hingga 31 Desember 2024, terdapat 54 laporan yang masuk SP4N-LAPOR! Pemkab Kutai Kartanegara, dan secara keseluruhan telah selesai ditindaklanjuti (100%)

54

Total Laporan

54

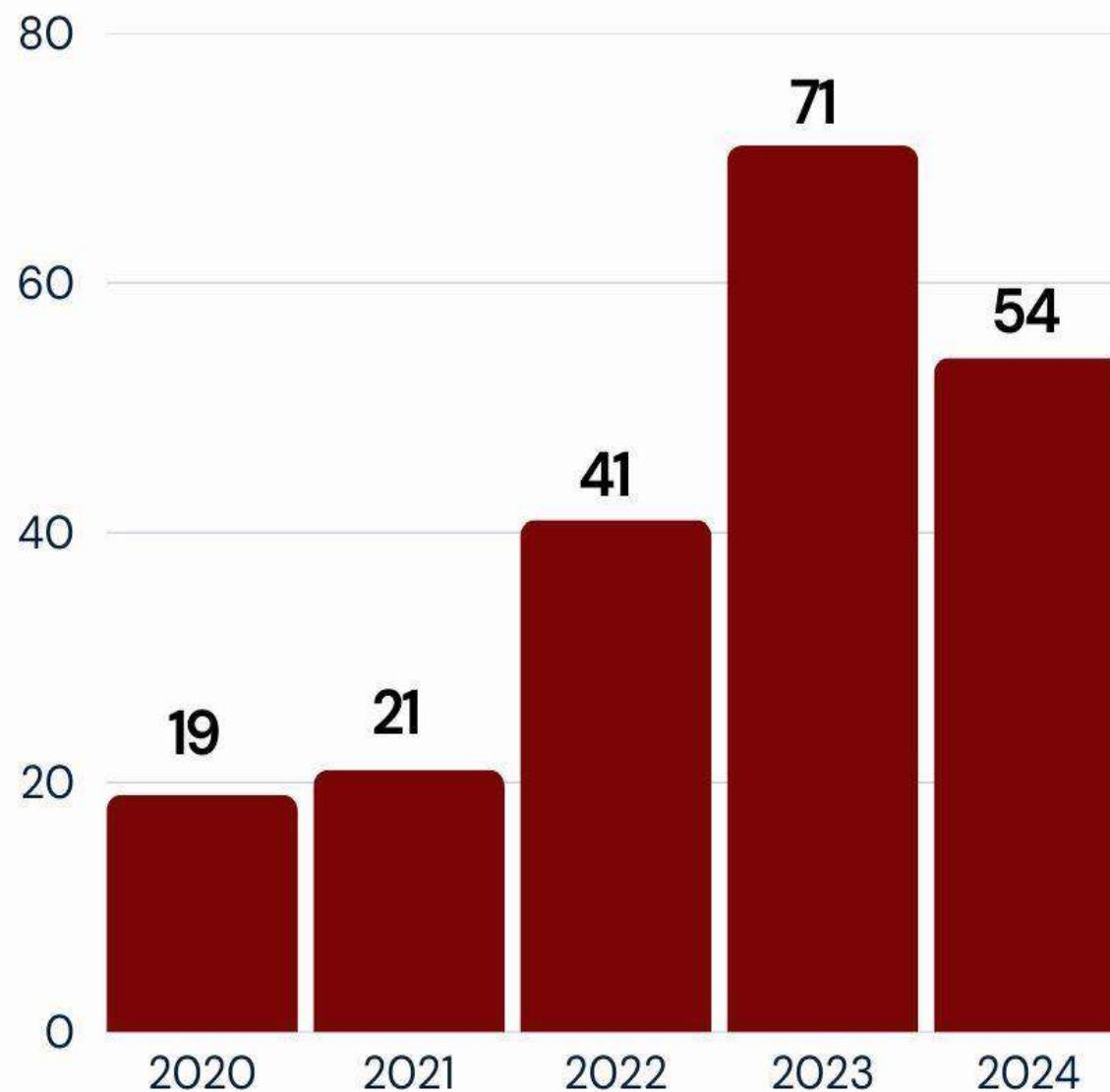
Laporan Selesai

0

Laporan Belum
Ditindaklanjuti

100%

Persentase
Tindak Lanjut





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Pahlawan, Kelurahan Timbau, Telp (0541) 661350, Fax. (0541) 664507 Kode Pos 75511

Website: diskominfo.kukarkab.go.id Email: diskominfo@kukarkab.go.id

TENGGARONG

GENDER BUDGRT STATEMEN (GBS)

SKPD : Dinas Kominikasi Dan Informatika
KABUPATEN : Kutai Kartanegara
TAHUN ANGGARAN : 2024

PROGRAM	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	
KEGIATAN	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten/Kota	
SUB KEGIATAN	Layanan Hubungan Media	
KODE KEGIATAN	2.16.2.20.2.21	
ANALISIS SITUASI	Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2022 sebesar 768.284 jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 394.417 jiwa dan perempuan sebanyak 366.867 jiwa. Secara umum peran perempuan dalam berbagai bidang kehidupan masih rendah, hal ini berdasarkan data Data Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2020 berkisar hanya pada angka 61,43, tahun 2021 ada kenaikan 1,33 poin menjadi 62,76, tahun 2022 ada kenaikan 0,64 menjadi 6340,. Angka ini rendah dari 10 Kabupaten/Kota se Kaltim berada pada urutan ke 6. Sehingga kebutuhan informasi yang ingin didapatkan oleh masyarakat menjadi kurang maksimal	
RENCANA AKSI	TUJUAN KEGIATAN	Jumlah Pelayanan Informasi yang dapat diwujudkan dalam menyampaikan informasi kegiatan pelaksanaan gerakan cegah stunting, aksi bergizi, bumil sehat, aktifkan posyandu, vaksinasi bersama mitra/kelompok masyarakat ini bertujuan untuk mengatasi masalah kesehatan yang sangat mendasar.
		<ol style="list-style-type: none">1. Rapat Koordinasi dengan Kepala Dinas,2. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran kegiatan publikasi stanting3. Menyiapkan perlengkapan kegiatan4. Menyiapkan jasa publikasi media online5. Membuat kontrak kerjasama dengan media6. Publikasi berita/informasi terkait stanting7. Dokumentasi dan Publikasi dalm membuat laporan kegiatan
ALOKASI SUMBER DAYA	ANGGARAN	Rp. 75.000.000,-

	SDM	<ul style="list-style-type: none"> - Staf Administrasi Bidang : 2 Orang - Tim Peliputan : 2 Orang - Editor : 1 Orang
	MESIN/ALAT	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer/Laptop - ATK - Mobil
OUTPUT / SUB KEGIATAN	Meningkatnya jumlah layanan hubungan media di wilayah kabupaten/kota	
IMMEDIATE OUTCOMES / KEGIATAN	Meningkatnya jumlah penyebaran informasi yang diterima oleh masyarakat di Wilayah Kabupaten/Kota	

Tenggarong, 14 Oktober 2024

**Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kutai Kartanegara**



Selihin, S.Sos, MT
NIP. 19721029 199102 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Pahlawan, Kelurahan Timbau, Telp (0541) 661350, Fax.(0541) 664507 Kode Pos 75511
Website: diskominfo.kukarkab.go.id Email: diskominfo@kukarkab.go.id
T E N G G A R O N G

GENDER ANALISIS PATHWAY (GAP)

KOLOM 1	SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Program	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
	Kegiatan	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	Indikator Kinerja	Jumlah Layanan Hubungan Media
	Tujuan	Jumlah Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola
KOLOM 2	Data Pembuka Wawasan	<p>Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2022 sebesar 768.284 jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 394.417 jiwa dan perempuan sebanyak 366.867 jiwa. Secara umum peran perempuan dalam berbagai bidang kehidupan masih rendah, hal ini berdasarkan data Data Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2020 berkisar hanya pada angka 61.43, tahun 2021 ada kenaikan 1,33 poin menjadi 62,76, tahun 2022 ada kenaikan 0,64 menjadi 63,40,. Angka ini rendah dari 10 Kabupaten/Kota se Kaltim berada pada urutan ke 6. Sehingga kebutuhan informasi yang ingin didapatkan oleh masyarakat menjadi kurang maksimal</p>
KOLOM 3	<p style="text-align: center;">I S U G E N D E R</p> <p style="text-align: center;">Faktor Kesenjangan/Permasalahan (Akses, Partisipasi, Kontrol, Manfaat)</p>	<p>Akses : Kurangnya informasi yang diperoleh perempuan secara komprehensif maka akan terjadi kesenjangan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang mana hal ini akan berpengaruh pada peningkatan kualitas kesehatan dalam keluarga dan isu stunting karena komunikasi tidak terjalin dengan baik.</p> <p>Partisipasi : Selama ini tingkat partisipasi perempuan dalam pembangunan masih rendah, sehingga suara perempuan tidak dapat mempengaruhi dalam setiap pengambilan keputusan, dengan demikian pada akhirnya akan menimbulkan kesenjangan dalam hasil pembangunan, hal ini dapat dilihat salah satunya adalah dalam menunjang program stunting yang mengintegrasikan perspektif gender dalam proses pembangunan tepat sasaran yaitu pelayanan kesehatan dan kesehatan lingkungan, sehingga percepatan</p>

		<p>Kontrol : Kurangnya peran perempuan dalam hal pengambilan keputusan yang terkait dengan kesetaraan gender, maka akan menjadi keterbatasan kompetensi dan kapasitas perempuan sehingga tidak optimal dalam hal pengambilan keputusan, partisipasi serta kebijakan penting membangun kesehatan lingkungan di masyarakat secara umum dan isu-stunting</p> <p>Manfaat : Kesetaraan gender sangat penting karena memberikan banyak manfaat bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Beberapa aspek penting dari manfaat kesetaraan gender salah satunya adalah kualitas kesehatan perempuan dalam keluarga. Ketika perempuan diberi kesempatan untuk mengontrol kesehatan dan tubuh mereka, mereka dapat membuat pilihan yang lebih baik tentang kesehatan mereka dan mencari perawatan kesehatan yang mereka butuhkan. Secara keseluruhan, kesetaraan gender sangat penting untuk kesehatan yang lebih baik bagi perempuan karena ini akan sangat berdampak pada isu stunting dalam keluarga</p>
KOLOM 4	Sebab Kesenjangan Internal	Masih kurangnya penyebaran informasi terkait isu stunting, Masih rendahnya tingkat pendidikan bagi perempuan, perempuan selalu banyak mengalami kekerasan dalam keluarga baik secara fisik maupun mental serta sikap apatis perempuan itu sendiri.
KOLOM 5	Sebab Kesenjangan Eksternal	Perempuan seringkali mendapatkan perlakuan tidak adil di dalam lingkungan masyarakat dan tidak semua perempuan bisa mendapatkan perlindungan serta pendampingan hukum, serta kurangnya kesempatan untuk peningkatan kompetensi dan kapasitas Suber Daya Manusia
KOLOM 6	Reformasi Tujuan	Jumlah Pelayanan Informasi yang dapat diwujudkan dalam menyampaikan informasi kegiatan pelaksanaan gerakan cegah stunting, aksi bergizi, bumil sehat, aktifkan posyandu, vaksinasi bersama mitra/kelompok masyarakat ini bertujuan untuk untuk mengatasi masalah kesehatan mendasar.

KOLOM 7	Rencana Aksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Koordinasi dengan kepala dinas, 2. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran publikasi stunting 3. Menyiapkan perlengkapan kegiatan 4. Menyiapkan jasa publikasi media online 5. Membuat kontrak Kerjasama dengan media online 6. Publikasi berita/informasi terkait stunting 7. Dokumentasi dan Publikasi dalam membuat laporan kegiatan
KOLOM 8	Data Dasar Terpilih (Baseline)	
KOLOM 9	P e n g u k u r a n O u t p u t	<p>Rumusan Kinerja : Terlaksananya Penyebaran Informasi terkait kesetaraan gender dalam partisipasi Pelaksanaan Gerakan Cegah stunting serta peningkatan kesehatan di masyarakat dan keluarga</p> <p>Rumusan Indikator : Jumlah perempuan yang mendapatkan kebijakan dan pendampingan untuk peningkatan kesetaraan gender agar capaian pelaksanaan gerakan cegah Stunting, aksi bergizi, bumil sehat, aktifkan posyandu, vaksinasi bersama mitra/kelompok masyarakat yang akan dilakukan pada setiap sasaran</p>
	H a s i l O u t c o m e	<p>Rumusan Kinerja : Meningkatnya penyebaran informasi publik dalam partisipasi kesetaraan gender dan isu stunting</p> <p>Indikator Kinerja : Meningkatnya kompetensi dan kapasitas perempuan dalam pengambilan keputusan terkait isu sosial, ekonomi dan kesehatan yang mencakup masyarakat luas.</p>



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Pahlawan No. 1 Kel. Timbau Kec. Tenggarong Telp (0541) 661350, Fax (0541) 664507
Website : diskominfo.kukarkab.go.id E-mail : diskominfo@kukarkab.go.id Kode Pos 75511

TELAAHAN STAF

Kepada Yth : Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara
Dari : Analis Pengelolaan Sarana Program Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kutai Kartanegara
Tanggal : 26 November 2024
Nomor : B-404/SEKR/000.1.2.311/2024
Lampiran : -
Perihal : **Benchmarking Capaian Kinerja ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Bontang di Bontang selama 3 (tiga) hari pada tanggal 28-30 Nopember
Tahun 2024.**

I. Pokok Persoalan

Dalam rangka memenuhi salah satu penilaian indikator pada Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) yaitu Benchmarking pada tingkat Nasional, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara akan mengadakan perbandingan Capaian Kinerja Perangkat Daerah.

II. Pra anggapan

Dengan dilakukan Benchmarking ke Dinas Komunikasi dan Informatika pada tingkat nasional diharapkan dapat meningkatkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) pada Tahun 2024.

III. Fakta Yang Mempengaruhi

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

IV. Analisis

Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada komponen Pelaporan Kinerja pada poin 3.b.6 Perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja) harus dilaksanakan agar nilai pada indikator tersebut bisa maksimal. Untuk meningkatkan Capaian nilai tersebut maka Dinas Komunikasi dan informatika akan mengadakan benchmarking ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang.

V. Simpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka kami mohon kepada Bapak agar dapat menyetujui Perjalanan Dinas dalam Rangka **Benchmarking Capaian Kinerja ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang di Bontang selama 3 (tiga) hari pada tanggal 28-30 Nopember Tahun 2024.**

Untuk itu kami mohon kepada bapak agar dapat menugaskan :

- 1 SUSANTI,S.Sos
.
Nip. 19701227 200701 2 018
Analisis Pengelolaan Sarana Program
- 2 CATUR MISIRAN
.
Nip. 19810812 200801 1 013
Analisis Keuangan
- 3 BUDIAN NOOR
.
Nip. 19830815 201001 1 035
Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
- 4 A. HAIRI PUTRA
.
Nip. 19830315 201001 1 006
Bendahara
- 5 ERWINSYAH
.
Nip. 19840919 201001 1 002
Verifikator Keuangan
- 6 MUHAMAD YANI
.
Nip. 19770425 200901 1 004
Pengadministrasi Umum
- 7 IRWAN FITRIANSYAH
.
Nip. 19780906 200701 1 020
Pengelola Data

Demikian telahaan ini dibuat, mohon persetujuan dan tindak lanjut bapak. Terima Kasih

}\${ttd}





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Pahlawan No. 1 Kel. Timbau Kec. Tenggarong Telp (0541) 661350, Fax (0541) 664507
Website : diskominfo.kukarkab.go.id E-mail : diskominfo@kukarkab.go.id Kode Pos 75511

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : B-536/SEKR/000.1.2.3/11/2024

PEJABAT YANG BERWENANG MEMERINTAHKAN

Kepada :

- Nama : Budian Noor
Nip : 19830815 201001 1 035
Jabatan : Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan (II/d)
- Nama : Erwinsyah
Nip : 19840919 201001 1 002
Jabatan : Verifikator Keuangan (II/d)
- Nama : Irwan Fitriansyah
Nip : 19780906 200701 1 020
Jabatan : Pengolah Data (II/d)

Dalam Rangka : Benchmarking Capaian Kinerja ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang

Tempat Berangkat : Tenggarong

Tempat Tujuan : Bontang

Lamanya : 3 (tiga) hari

Tanggal Berangkat : 28 Nopember 2024

Tanggal Kembali : 30 Nopember 2024

Beban Anggaran : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Setelah Melaksanakan Tugas Agar Membuat Laporan

Demikian Surat Tugas Ini Diberikan Agar Dipergunakan Sebagai Mana Mestinya.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 27 November 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
PLT. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SOLIHIN, S.Sos., MT
Pembina TK. I (IV/b)



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Pahlawan No.1 Kelurahan Timbau Telp. (0541) 661350, Fax (0541) 664507 Tenggarong 75511

Website: diskominfo.kukarkab.go.id Email: diskominfo@mail.kukarkab.go.id

LAPORAN PERJALANAN DINAS

1. Nomor/Tanggal SPPD : 616/Sekr/000.1.2.3/11/2024 27 Nopember 2024
(Atas nama dan Jabatan) : BUDIAN NOOR Nip. 19830815 201001 1 035
Penyusun Program Anggaran Dan Pelaporan (II/d)
- Pengikut : 1. Erwinsyah Nip. 19840919 201001 1 002
Verifikator Keuangan (II/d)
2. Irwan Fitriansyah Nip. 19780906 200701 1 020
Pengolah Data (II/d)
2. Maksud perjalanan Dinas : Benchmarking Capaian Kinerja ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang
3. Tujuan Perjalanan Dinas : Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang (Bontang)
4. Tanggal Pelaksanaan : 28 Nopember s/d 30 Nopember 2024 (3 Hari)
5. Pejabat yang ditemui :
Nama : Yassir Asyari, SE
Jabatan : Kepala Subbag Perencanaan dan Keuangan
6. Hasil Perjalanan Dinas :

1. Benchmarking Capaian Kinerja yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang adalah benchmarking / membandingkan Capaian Kinerja Utama yaitu Indeks SPBE
2. Capaian Indeks SPBE Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 lebih rendah dibandingkan Capaian Indeks SPBE Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang dengan perolehan :

No	Indikator Kinerja	Kutai Kartanegara (Tahun 2023)	Kota Bontang (Tahun 2023)	Hasil Perbandingan
1.	Indeks SPBE	2,54	2,83	Capain Kota Bontang lebih baik
2.	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	1,40	2,00	Capain Kota Bontang lebih baik
3.	Indeks Domain Layanan SPBE	3,51	3,76	Capain Kota Bontang lebih baik

4.	Indeks Domain Manajemen SPBE	1,00	1,45	Capain Kota Bontang lebih baik
5.	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	3,30	2,90	Capaian Kab Kukar lebih baik

3. Secara umum Capaian Indeks SPBE kota Bontang lebih baik dibanding capaian Indeks SPBE Kabupaten Kutai Kartanegara dengan selisih perolehan 0,29 poin
4. Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bontang adalah pada penerapan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik memiliki Indeks tertinggi yaitu 4.00. Keunggulan ini terlihat dari dengan adanya pengintegrasian dengan aplikasi umum berbagi pakai pada bidang Layanan Pengaduan Pelayanan Publik melalui penerapan SP4NLapor. Layanan Data Terbuka melalui Layanan Simpatiku. Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum menerapkan JDIH dan JDIHN. Untuk Layanan Publik Sektor dikembangkan Aplikasi Perizinan, Sistem Infomasi Pelayanan Unit Terpadu (Siput) dan SIMRS. Seluruh keunggulan tersebut saling terkait, sehingga dapat memberikan gambaran pelaksanaan SPBE di Pemerintah Kota Bontang menjadi efektif dan efisien, baik dari sisi anggaran maupun kinerja menjadi optimal. Namun, disisi lain Pemerintah Kota Bontang memiliki beberapa kelemahan yaitu Aspek Penerapan Manajemen SPBE merupakan aspek dengan indeks terendah yaitu 1.25. Pemerintah Kota Bontang belum menerapkan Manajemen Risiko SPBE, Penerapan Manajemen Keamanan Informasi, Penerapan Manajemen Data, Penerapan Manajemen Aset TIK ,Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Manajemen Pengetahuan, Penerapan Manajemen Perubahan dan Penerapan Manajemen Layanan SPBE
5. Keunggulan SPBE yang dimiliki oleh Kabupaten Kutai Kertanegara terdapat di 6 indikator pada Aspek Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE, yaitu pada indikator Kebijakan Internal Arsitektur SPBE, Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE, Kebijakan Pembangunan Aplikasi, Kebijakan Layanan Internal Pusat Data, Kebijakan Internal Manajemen Data, dan Kebijakan Internal Audit TIK (indikator 1,2,3,4,5 dan 9). Kemudian terdapat keunggulan di 10 indikator pada Layanan Administrasi, dan Layanan Publik. Dari 10 indikator tersebut terdiri dari 5 indikator yaitu Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, dan Layanan Kearsipan Dinamis. Kemudian pada 5 indikator yaitu Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Data Terbuka, Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Layanan Publik Sektor 1, Layanan Publik Sektor 3.

Demikian Laporan ini di sampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tenggarong, 2 Desember 2024
Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas


Budian Noor

Nip. 19830815 201001 1 035

Pengikut :

1. Erwinsyah


(.....)

2. Irwan Fitriansyah


(.....)

Benchmarking Capaian Kinerja ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang
Bontang, 28-30 Nopember Tahun 2024

